

**DISPARITAS SUB WILAYAH
(Kasus Perkembangan Antar Kecamatan
di Kabupaten Tanah Datar)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

RINA REZEKI
L4D 005 113



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat, 2001:13). Hal senada diungkapkan oleh Todaro (1994:15) bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan.

Pada mulanya upaya pembangunan negara sedang berkembang diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita, atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara sedang berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan “pembangunan” (*development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan diperdesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahril dalam Kuncoro, 2003:9). Hal ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) meski tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986:12; Meier, 1989:7). Pertumbuhan ekonomi hanya

mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hal inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (dalam Kuncoro, 2003:9), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan, yang dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. Meier (1989:6) lebih khusus mengatakan pembangunan ekonomi dengan kata lain tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Defenisi dari pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat dalam kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Peningkatan pendapatan sebagai hasil dari proses pembangunan dalam pengamatan empiris di berbagai negara berkembang hanya dinikmati oleh sebagian penduduk. Keadaan ini disebut sebagai adanya masalah dalam pembangunan. Tiga masalah utama pembangunan ekonomi adalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan, baik kesenjangan antargolongan penduduk, antar sektor, maupun antar daerah. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Pelaku pembangunan yang tidak memiliki sumber daya dan tidak mempunyai akses

dalam pembangunan akan menganggur, karena menganggur maka tidak memiliki pendapatan yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi kesenjangan yang paling buruk.

Kebijaksanaan pembangunan yang sistematis diperlukan untuk memperkecil kesenjangan. Berdasarkan pengalaman empiris, strategi pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan terbukti tidak mampu memecahkan masalah justru sebaliknya acapkali mempertajam kesenjangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan.

Kesenjangan atau disparitas pembangunan regional cukup semarak di negara-negara berkembang. Hasil observasi menunjukkan bahwa secara umum disparitas regional di negara-negara yang kurang maju lebih lebar dari pada yang terjadi di negara-negara maju (Williamson, 1975:159). Negara-negara yang maju telah membentuk strategi-strategi untuk memulai pembangunan wilayah-wilayah tertinggal yang ada. Inggris telah menerapkan instrumen seperti subsidi, kelonggaran pajak, dan sistem pengendalian kesempatan kerja untuk diarahkan menuju kepada aktifitas-aktifitas kepada wilayah-wilayah yang tertahan potensinya. Belgia, Denmark, Irlandia, dan Belanda telah mencari penyokong pembangunan regional dengan cara desentralisasi administratif dan memberi lebih banyak otoritas kepada pemerintahan lokal dan membuat otoritas regional terpisah. India untuk mengatasi disparitas regional diantaranya dengan melakukan *social equity*, yaitu pemerataan pelayanan dan fasilitas sosial (O.P Mathur dalam Lo Fu Chen & Salih, Kamal, 1978:131).

Studi-studi empiris diatas memperlihatkan bahwa negara-negara dengan perencanaan terpusat telah berusaha untuk membangun hirarki permukiman penduduk dengan sistem produksi. Struktur ini dirancang untuk memungkinkan pertumbuhan pusat-pusat perkotaan yang terkontrol melalui kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja mempromosikan investasi pada pusat-pusat yang diharapkan untuk pertumbuhan dan pembatasan investasi di wilayah lain. Pendekatan yang sama telah digunakan untuk membatasi ekspansi kota-kota kecil yang luas dan untuk mendorong pembangunan kota-kota kecil dan menengah.

Sementara di Indonesia sendiri, walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kesenjangan wilayah di Indonesia tidaklah terlalu besar apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai karakteristik yang sama (Hill, 1998:23), tetapi beberapa gejala di daerah membuktikan bahwa kesenjangan itu ada. Terdapat wilayah yang merasa bahwa perkembangan mereka jauh tertinggal dari wilayah lainnya terutama dari Pulau Jawa (Nurzaman, 2002:88).

Secara eksplisit ini dapat dilihat pada perkembangan ekonomi antardaerah di Indonesia yang memperlihatkan kecenderungan bahwa propinsi-propinsi di Pulau Jawa pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan propinsi lainnya diluar Pulau Jawa. Perbedaan perkembangan antardaerah itu menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan kemajuan antardaerah, terutama antar Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan antar daerah perkotaan dan daerah perdesaan (B. Bintoro dalam Winarno, 2003:6).

Sebagai gambaran awal bahwa walaupun laju pertumbuhan PDRB Kawasan Barat Indonesia lebih kecil, yaitu sekitar 4,48 persen tahun 1997 dan 4,28 persen pada tahun 2000 jika dibandingkan laju pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia yang sekitar 5,27 persen dan 4,53 persen pada tahun yang sama, namun secara absolut nilai PDRB yang dihasilkan oleh KBI lebih besar yaitu 490,48 milyar rupiah atau 83,26 persen tahun 1997 dan 951,97 milyar rupiah atau 81,62 persen pada tahun 2000, dibandingkan dengan nilai absolut PDRB KTI hanya sekitar 98,62 milyar rupiah atau 16,74 persen tahun 1997 dan 214,44 milyar rupiah atau 18,38 persen tahun 2000. (Statistik Indonesia dalam Winarno, 2003:6).

Seperti halnya dengan ketidakseimbangan antara KBI dan KTI, hal serupa juga terjadi antar kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota masing-masing memperoleh pendapatan perkapita yang lebih besar dibanding kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Datar pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2000, Kabupaten Tanah Datar digolongkan kedalam pertumbuhan rendah/lambat.

Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan secara signifikan tumbuh diatas rata-rata nasional dan Propinsi Sumatera Barat yaitu 5,17% (nasional 4,69% dan Propinsi Sumatera Barat 4,74%), namun secara absolut nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar masih dibawah Propinsi Sumatera Barat (7,75 juta rupiah) dan Nasional (8,90 juta rupiah) sedangkan Kabupaten Tanah Datar PDRB perkapita hanya

sebesar 7,01 juta rupiah (BPS Kab. Tanah Datar, 2005:12-21). Peningkatan ini terjadi karena adanya rekayasa keuangan daerah (*cash management*) yaitu suatu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar tanpa memberatkan masyarakat untuk meningkatkan PAD berupa tabungan/*saving* daerah dalam bentuk deposito pada bank, dengan cara membeli saham serta penyertaan modal pada lembaga perbankan yang juga dapat menghasilkan *dividen* yang cukup besar.

Pada dasarnya Kabupaten Tanah Datar perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. Meskipun dari data PDRB terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi dari tahun lalu, namun perkembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar memperlihatkan kondisi yang stagnan. Ibu kota Kabupaten Tanah Datar yaitu Kota Batusangkar sendiri juga masih didominasi sektor pertanian (*agriculture*). Dan ini bertentangan dengan definisi kota yaitu secara sektoral sebagai kawasan yang didominasi oleh kegiatan non pertanian. Akibat adanya disparitas antar kecamatan, perkembangan Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan otomatis menjadi terhambat, tidak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Dibanding *hinterlandnya* yaitu Kota Padang Panjang, Bukittinggi dan Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar dari segi perkembangan wilayah jauh tertinggal.

Demikian pula dengan disparitas antar kecamatan, dilihat dari perkembangan kota kecamatan, Kecamatan V Kaum, Sungai Tarab, X Koto dan Kecamatan Batipuh digolongkan kedalam kecamatan yang pertumbuhannya cepat, sedangkan Kecamatan Tanjung Baru, Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh

Selatan, dan Kecamatan Rambatan termasuk kedalam kecamatan yang memiliki desa tertinggal paling besar.

Penelitian ini didasarkan pada dua paradigma dalam pengembangan wilayah yaitu pembangunan harus merata dan pembangunan tidak harus merata. Pemuka-pemuka teori yang menganut paradigma pembangunan harus merata mengatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan (Myrdal dalam Kuncoro, 2004:133). Sementara itu pemuka teori yang menganut paradigma pembangunan tidak harus merata mengatakan bahwa perkembangan seharusnya tidaklah seimbang. Perkembangan terjadi karena ada sektor yang berkembang lebih pesat dari sektor lainnya. Perkembangan adalah suatu keadaan ketidakseimbangan yang berantai. Dalam perkembangan selalu ada sektor yang memimpin (*leading*), yang menjalarkan perkembangan ke sektor lainnya (Hirschman, 1968:62-63).

Dan dalam hal ini penulis menyatakan ketidakberpihakan pada kedua paradigma diatas karena keduanya mempunyai alasan yang kuat. Pembangunan harus merata, selain untuk memperkecil kesenjangan antar daerah yang dipandang dapat mengancam stabilitas suatu daerah juga karena sesuai dengan prinsip dan azas keadilan bahwa setiap orang punya hak yang sama dalam menikmati manfaat dan hasil-hasil pembangunan. Selain itu karena ketidakmerataan pembangunan mengakibatkan sulitnya mencapai lokasi-lokasi daerah yang terkena bencana

terutama pada daerah-daerah terisolir akibat akses yang sangat rendah. Sedangkan paradigma pembangunan tidak harus merata juga dirasa tepat, karena jika semua daerah terbangun akan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan dan merusak ekosistem beserta habitat yang hidup didalamnya. Dan akan terjadi eksploitasi sumberdaya alam akibat terbukanya akses. MT Zen (dalam Alkadri et.al, 1999:4) secara tegas menyebutkan bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kondisi lingkungan harus menjadi perhatian yang sangat serius, karena alasan-alasan yang sama kuatnya tersebut diatas maka penulis menyatakan ketidakberpihakan pada kedua paradigma tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Ketidakmerataan pengalokasian program pembangunan di Kabupaten Tanah Datar telah berdampak langsung pada terjadinya ketimpangan pembangunan di tiap kecamatan. Selama kurun waktu tertentu program pembangunan terkonsentrasi pada Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Sungayang (APBD Kabupaten Tanah Datar), sehingga berkembang di kalangan masyarakat dari kecamatan lain yang menyebutkan bahwa pada kedua kecamatan tersebut tidak ada lagi jalan yang belum diaspal. Ketidakmerataan pembangunan mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial terutama pada kecamatan-kecamatan yang merasa dimarjinalkan.

Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan belum lama ini santer menghembuskan keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Tanah Datar dan lebih memilih bergabung dengan daerah tetangga yaitu Kota Padang Panjang. Mereka merasa lebih diperhatikan pemerintah daerah Kota Padang Panjang dari pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar itu sendiri. Meskipun keinginan ini bermuatan politis dan bersifat temporer, tapi jika dibiarkan begitu saja lama kelamaan akan berakibat pada terjadinya konflik sosial. Hal ini disebabkan mereka merasa bahwa selama kurun waktu tertentu sedikit sekali program pembangunan yang masuk kedaerah mereka.

Ketidakmerataan pembangunan tersebut dapat dilihat dari banyaknya desa tertinggal di Kecamatan Lintau Buo Utara, Batipuh Selatan, Tanjung Baru dan Kecamatan Rambatan (Data Pokok Kab. Tanah Datar). Tapi kenapa bukan kecamatan-kecamatan ini yang diprioritaskan dalam pembangunan. Seharusnya dalam pengalokasian program pembangunan pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengkaji terlebih dahulu daerah mana yang benar-benar harus diprioritaskan.

Dampak ikutan lain yang ditimbulkan dari ketidakmerataan program pembangunan selain terancamnya stabilitas daerah juga terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah kecamatan dan berimbas juga pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar itu sendiri. Sebaran penduduk menjadi tidak merata, penduduk cenderung terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan yang lebih berpotensi mampu memberikan kehidupan yang lebih layak.

Banyak desa yang mulai ditinggalkan terutama oleh kaum usia muda, selain sifat orang Minang yang suka merantau terlebih lagi karena kampung halaman tidak lagi mampu memberikan peluang kerja. Pertanian tidak lagi menarik untuk mereka. Sedangkan lapangan pekerjaan lain tidak ada, jadi terpaksa penduduk pergi merantau ke daerah lain.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas *Research Question* yang muncul adalah :

Mengapa terjadi disparitas dan apakah pembangunan itu harus merata?

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji dan menemukenali konsep disparitas antar sub wilayah melalui Kabupaten Tanah Datar.

1.3.2 Sasaran Studi

Sedangkan sasaran yaitu alat untuk mencapai tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas.
2. Menemukenali dan menganalisis karakteristk wilayah studi (fisik, sosial, ekonomi) serta mengkaji permasalahan disparitas di Kabupaten Tanah Datar.
3. Menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas di Kabupaten Tanah Datar.

4. Menganalisis kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dan interaksi ruang serta mengkaji konsep disparitas.
5. Menemukenali konsep disparitas.

1.4 Posisi dan Keaslian Penelitian

1.4.1 Posisi Penelitian Dalam Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota

Penelitian atau studi disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk menemukenali konsep disparitas antar kecamatan melalui Kabupaten Tanah Datar. Posisi penelitian dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota adalah merupakan studi dari perencanaan wilayah yang lingkup materinya didasarkan pada dua paradigma pengembangan wilayah yaitu pembangunan harus merata dan pembangunan tidak harus merata. Posisi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber : Hasil analisis

GAMBAR 1.1
DIAGRAM POSISI PENELITIAN

1.4.2 Keaslian Penelitian

Studi disparitas antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, merupakan penelitian yang baru dan berbeda dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.1.

TABEL I.1
PENELITIAN TENTANG DISPARITAS WILAYAH

Nama	Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Output
Winarno	2003	Faktor-faktor terjadinya disparitas ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur	Menemukanali sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas ekonomi antar kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur	Metoda kualitatif	Faktor – faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur adalah perbedaan peranan sektor ekonomi, pola dan persebaran penduduk yang tidak merata dan hirarki wilayah

Sumber : Data Sekunder Tahun 2003

1.5 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi terdiri atas ruang lingkup substansial yaitu berisikan batasan-batasan substansi yang dibahas dalam studi dan ruang lingkup spasial yaitu berisikan batasan-batasan administrasi dari wilayah studi.

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansi penulisan studi ini dijabarkan dalam upaya untuk menemukanali faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Dalam ruang lingkup substansial ini permasalahan yang dikaji menyangkut sistem tata ruang, sistem sarana prasarana, potensi ekonomi, kebijaksanaan pembangunan, kebijakan pemerintah dan sosial kependudukan Wilayah Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan ruang lingkup substansial ini didasarkan atas

pertimbangan bahwa kelima hal tersebut merupakan *katalisator* bagi tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah. Secara lebih rinci lingkup materi studi ini adalah :

- a. Tata ruang dalam analisis studi ini merupakan keterkaitan kegiatan-kegiatan produksi dan pola interaksi ruang antar kecamatan dan interaksinya dengan ibukota kabupaten dan kota-kota lainnya yang berbatasan.
- b. Sistem sarana prasarana dalam analisis studi ini untuk melihat ketersediaan sarana prasarana air bersih, listrik, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan pasar sebagai pusat koleksi dan distribusi dan sarana transportasi sebagai urat nadi pembangunan daerah sesuai fungsinya untuk menghubungkan simpul-simpul produksi ke simpul pemasaran dan menghubungkan penduduk ke pusat-pusat pelayanan.
- c. Potensi ekonomi, analisis ini untuk mengetahui kondisi perkembangan ekonomi (meliputi sektor usaha, kesempatan kerja, tingkat produksi, sektor-sektor unggulan), dan keterkaitan kegiatan produksi intra dan antarwilayah.
- d. Sistem kebijaksanaan pembangunan dalam analisis studi ini merupakan konsep perwilayahan sebagai arah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- e. Kebijakan pemerintah, analisis ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap terjadinya disparitas.
- f. Sosial kependudukan untuk mengetahui kondisi sosial kependudukan meliputi laju dan tingkat pertumbuhan penduduk, kesejahteraan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°12'' sampai dengan 00°39'' LS dan 100°19'' sampai dengan 100°51 BT mempunyai luas 1336 Km². Dan terdiri atas 14 kecamatan dan dialiri oleh 25 sungai serta terletak di kaki tiga buah gunung yaitu Merapi, Singgalang dan Sago. Dalam penelitian ini ruang lingkup wilayah studi meliputi satu kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan empat belas kecamatan.

Secara administratif Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Agam dan 50 Kota

Sebelah Selatan : Kabupaten Solok

Sebelah Barat : Kabupaten Padang Pariaman

Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.

1.6 Kerangka Pemikiran Studi

Pengembangan wilayah (*regional development*) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah bersangkutan (Ambardi & Prihawantoro (ed), 2002:47).

Pembangunan nasional merupakan rangkaian proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Demikian pula dengan Kabupaten Tanah Datar yang memiliki visi: ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Sejahtera dan Berkeadilan dilandasi Filosofi ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah“***. Tapi tak mudah mewujudkan visi tersebut, karena dalam implementasinya perencanaan pembangunan tak semudah diatas kertas. Walaupun proses pembangunan telah dijalankan, tapi tetap saja pemerataan dan keadilan belum tercapai. Seringkali terjadi usulan-usulan pembangunan pada tahap musrenbang (*bottom up*) menjadi mentah ketika sampai ditangan para elite-elite politik, yang berimplikasi pada ketidakmerataan pembangunan dan pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan pertumbuhan antar kecamatan (disparitas).

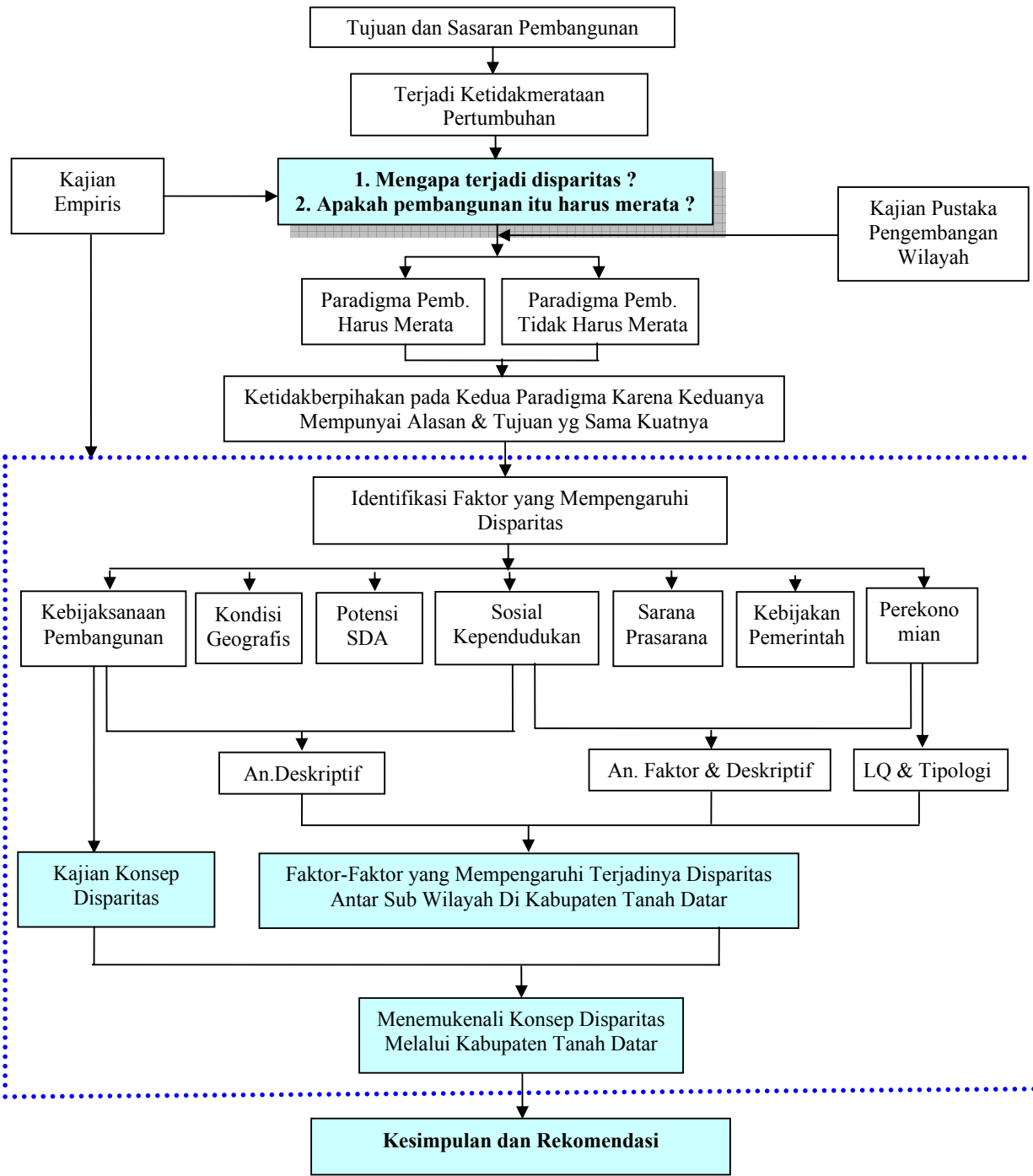
Menghadapi kondisi tersebut dibutuhkan suatu kajian yang mendalam di Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kecamatan lebih berkembang dibanding kecamatan lainnya atau dengan kata lain untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi terjadinya disparitas antar kecamatan.

Sebagai langkah pertama, pada kerangka yang merupakan gambaran umum alur berpikir dari studi yang dilakukan ini adalah mendiskripsikan isu, fenomena dan permasalahan sebagai latar belakang pemilihan tema, yaitu mencari hal-hal apa yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah baik dari

segi teoritis maupun empiris melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang terjadinya disparitas antar daerah.

Tahapan berikutnya adalah menemukenali karakteristik wilayah studi, yaitu dari aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi. Kajian dalam studi ini, aspek-aspek tersebut meliputi karakteristik tata ruang, sistem sarana prasarana, potensi ekonomi, kebijaksanaan pembangunan, kebijakan pemerintah dan sosial kependudukan. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar kecamatan dengan menggunakan analisis faktor, analisis LQ, analisis tipologi daerah dan analisis deskriptif.

Selanjutnya hasil analisis terhadap aspek empiris dan teoritis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menemukenali konsep disparitas sebagai pertimbangan untuk merumuskan rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menemukan konsep disparitas sebagai bagian dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari pendekatan tersebut, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.4.



GAMBAR 1.4
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI
DISPARITAS SUB WILAYAH (KASUS PERKEMBANGAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN TANAH DATAR)

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Nazir (2003: 44) mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian.

1.7.1 Pendekatan Studi

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yaitu meliputi semua informasi dan data-data yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penelitian. Selanjutnya dari kompilasi data yang dihasilkan akan dianalisis untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan dan fakta tertentu dengan kondisi empiris atau variabel yang diselidiki secara komprehensif. Pendekatan kualitatif digunakan analisis deskriptif, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan analisis faktor, LQ dan analisis tipologi daerah.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Somodiningrat, 2001;52).

1.7.2 Kerangka Analisis

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan studi yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa alat analisis yang akan dilakukan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut. Adapun analisis yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran-sasaran studi ini adalah analisis faktor, LQ, tipologi daerah dan analisis deskriptif yang variabelnya diperoleh dari studi literatur berdasarkan kondisi eksisting yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

1.7.3 Tahapan analisis

Sesuai dengan kerangka analisis yang dipergunakan dalam mencapai tujuan pelaksanaan studi melalui sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan analisis yang akan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran studi ini adalah sebagai berikut :

- Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar kecamatan melalui kajian pustaka dan dari faktor-faktor temuan tersebut kemudian direduksi sesuai dengan kondisi empiris Kabupaten Tanah Datar sehingga menghasilkan variabel-variabel yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan analisis faktor dan analisis kualitatif.
- Menganalisis karakteristik eksisting dan potensi sosial ekonomi pada tiap-tiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanah Datar meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah tenaga kerja persektor, kondisi perekonomian perkecamatan, potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil dan pariwisata, untuk mengetahui

pengaruh potensi sosial ekonomi tersebut terhadap terjadinya disparitas antar kecamatan. Analisis yang digunakan yaitu analisis LQ, tipologi daerah dan kualitatif.

- Menganalisis variabel-variabel yang telah ditentukan berdasarkan kondisi empiris Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan analisis faktor, sehingga dihasilkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar dan kemudian dikualitatifkan.
- Menganalisis kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Tanah Datar dan interaksi ruang sebagai bahan kajian terhadap konsep disparitas di Kabupaten Tanah Datar.
- Menganalisis kajian konsep disparitas dan menggabungkan dengan teori yang diperoleh dari studi literatur untuk memperoleh rumusan konsep disparitas.

1.7.4 Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam studi ini data yang digunakan adalah data primer hasil observasi lapangan, wawancara dan data-data sekunder yang dikumpulkan dari instansi-instansi terkait.

Data yang diperoleh berdasarkan survei primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan melalui *interview guide* dan *schedule*. Data hasil kuesioner diolah dengan menggunakan teknik analisis faktor sedangkan hasil *interview schedule* diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Sedangkan dalam

**TABEL I.2
TAHAPAN ANALISIS**

Sasaran	Hasil Yang diharapkan	Cara / Proses	Metode
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas.	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antarwilayah sebagai acuan untuk memperoleh variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar	Studi kepustakaan melalui kajian-kajian teoritis yang ada kemudian disesuaikan dengan kondisi empiris wilayah studi	Analisis Deskriptif
2. Menemukenali dan menganalisis karakteristik wilayah studi (fisik, sosial, ekonomi) serta mengkaji permasalahan disparitas di Kabupaten Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kondisi empiris dan karakteristik sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar • Mengetahui pengaruh potensi sosial ekonomi terhadap terjadinya disparitas antar sub wilayah • Memetakan kondisi perekonomian sub wilayah • Mengetahui potensi sektor perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi data sekunder : <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi perekonomian • Tenaga kerja persektor • Kondisi penyediaan air bersih • Listrik • Telekomunikasi • Fasilitas pendidikan • Fasilitas kesehatan • Fasilitas ekonomi • Moda angkutan • Kondisi sosial kependudukan • Tanaman pangan • Perkebunan • Perikanan • Peternakan • Industri kecil 	Analisis LQ Analisis Tipologi Daerah Analisis Deskriptif

Lanjutan :

		<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Melakukan survey lapangan dengan wawancara untuk memperoleh data primer 	
3. Menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas.	Mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar melalui variabel-variabel yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survey lapangan dengan alat kuesioner untuk memperoleh data primer. • Mengolah variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya sehingga diperoleh hasil akhir yaitu faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar. 	Analisis Faktor Analisis Deskriptif
4. Menganalisis kebijaksanaan pembangunan dan interaksi ruang serta mengkaji konsep disparitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui pengaruh kebijaksanaan pembangunan dan interaksi ruang terhadap terjadinya disparitas antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar • Kajian konsep disparitas di Kabupaten Tanah Datar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Data sekunder : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijaksanaan pembangunan • Kondisi geografis • Survey lapangan interaksi ruang 	Analisis Deskriptif
5. Menemukanali konsep disparitas melalui Kabupaten Tanah Datar	Rumusan konsep disparitas dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah sebagai suatu proses pengkayaan konsep disparitas	Analisis terhadap kajian konsep disparitas di Kabupaten Tanah Datar dan studi kepustakaan.	Analisis Deskriptif

Sumber:HasilAnalisis

mendapatkan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen mengenai kumpulan data, perencanaan, peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai bahan analisis. Sumber data dapat diperoleh dari hasil penelitian, seminar, artikel, penelusuran pustaka serta dokumen resmi instansi yang berkaitan dengan tema penelitian. Secara garis besar variabel yang diteliti dan pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat dilihat pada tabel I.3.

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai dilakukan, untuk memudahkan proses analisis data yang kemudian disajikan kedalam bentuk tabel (tabulasi data secara sistematis), grafik maupun peta.

TABEL I.3
VARIABEL PENELITIAN

No.	Variabel	Deskripsi
1.	Kebijakan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pemerintah terhadap masyarakat • Dukungan pemda terhadap kegiatan masyarakat • Kegiatan pembangunan dan kaitannya dengan kemajuan daerah
2.	Ketersediaan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana transportasi • Kondisi jaringan jalan dan alat angkut • Ketersediaan dan kondisi sarana pelayanan umum (sekolah, rumah sakit, dll) • Kondisi utilitas (air bersih, listrik, telepon, drainase) • Kelengkapan dan kondisi fasilitas ekonomi • Jangkauan ke ibu kota kabupaten
3.	Kondisi Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lapangan kerja • Kegiatan perekonomian
4.	Sosial kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan masyarakat • Keamanan lingkungan • Tingkat pendidikan

Sumber : Hasil Analisis

1.7.5 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini diperlukan pengambilan data melalui metode survei. Survei data primer dilakukan dengan teknik interview menggunakan *interview guide* atau *schedule*. Pemilihan teknik ini didasari oleh pertimbangan pada pihak-pihak atau tokoh kunci pengambil kebijakan. Daftar pertanyaan dalam *interview guide* atau *schedule* tersebut diisi oleh *enumerator* didepan responden dengan cara tatap muka (Nazir, 2003: 278).

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel bertujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Jadi elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode ini merupakan salah satu pemilihan sampel non-probabilitas (Indriantoro dan Supomo, 1999: 131). Metode pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* ini didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Indriantoro dan Supomo, 1999: 131 ; Arikunto 2002: 117).

Pertimbangan pemilihan sampel dengan *purposive sampling* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Arikunto, 2002: 117) :

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-siri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Oleh karena survei data primer yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menetapkan sebaran program pembangunan, maka populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah dibatasi hanya pada tokoh-tokoh kunci pengambil kebijakan. Dengan demikian teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *judgment sampling* dirasa tepat karena telah mencerminkan karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi dan sesuai dengan butir (a) sampai (c) diatas. Dengan pertimbangan ini diharapkan sampel yang terpilih dapat mewakili populasi. Kelemahannya adalah bahwa peneliti tidak dapat menggunakan statistik parametrik sebagai teknik analisis data, karena tidak memenuhi persyaratan random (Arikunto, 2002: 117). Oleh sebab itulah teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang tidak memerlukan persyaratan random.

Sedangkan jumlah sampel dalam pengumpulan data primer dengan menggunakan kuisisioner ditentukan berdasarkan *proportional random sampling* yang dilakukan untuk penyempurnaan penggunaan sampel wilayah, sebab banyaknya subyek yang terdapat pada setiap strata tidak sama. Untuk memperoleh sampel yang *representatif*, ditentukan dengan seimbang dan sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata. (Arikunto, 2002:117).

1. Jumlah Populasi

Jumlah populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa, yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi penelitian ini meliputi jumlah keluarga di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 86.147 keluarga.

2. Jumlah Sampel

Jumlah ukuran sampel, menggunakan rumus dari Toro Yamane (dalam Rakhmat, 1998 :82), yaitu :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d² = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Berdasarkan rumus diatas, dimana N = 86.147 unit pengamatan dan d = 10 %, maka ukuran sampel (n) adalah 99.9 dibulatkan **100** unit pengamatan dan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk pada tiap-tiap kecamatan.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini secara garis besar terbagi dalam dua kelompok analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

1.7.6.1 Analisis Kuantitatif

Data kuantitatif yang diperoleh diolah dengan menggunakan alat analisis untuk dapat menghasilkan suatu temuan atau informasi yang diinginkan dari hasil olahan data tersebut. Hasil akhir dari analisis kuantitatif ini masih perlu diperkuat dengan interpretasi dan deskripsi secara kualitatif.

1. Analisis Faktor

Alat analisis ini digunakan untuk mereduksi satu set data dalam jumlah besar kepada dimensi dasar namun dengan relevansi statistik yang tetap terjaga. Pengidentifikasian faktor yang mempengaruhi disparitas diperlukan. Untuk keperluan ini digunakan analisis faktor yang bertujuan untuk mengekstraksi sejumlah besar variabel menjadi kelompok-kelompok faktor. Melalui analisis faktor ini dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar wilayah. Keunggulan metoda ini adalah faktor yang diolah merupakan faktor yang independen yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Analisis faktor juga bermanfaat untuk mencari faktor tersamar yang sebetulnya mendasari variabel-variabel dari suatu observasi.

Case yang digunakan dalam analisis faktor ini adalah seluruh kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Tanah Datar yaitu terdiri atas empat belas (14) kecamatan. Operasional dari pengolahan data yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Membentuk matriks dasar $X = (X_{ji})$, dengan i variabel dan j observasi untuk setiap variabel. Elemen-elemen matriks x ini merupakan indeks dari data-data mentah. Pengindeksan diperlukan karena perbedaan dimensi dari variabel-variabel yang ditinjau.
2. Penyusunan matriks korelasi dari variabel-variabel yang ada dan menghasilkan koefisien korelasi antar variabel. Kontribusi suatu faktor (misal faktor j) terhadap total variasi dari keseluruhan set variabel dapat dilihat dari nilai eigen faktor j yang dapat dihitung dengan rumus :

$$V_j = \sum_{i=1}^p \lambda^2_{i,j}$$

keterangan : V_j = nilai eigen faktor j
 λ = nilai eigen
 p = faktor ke p
 j = faktor ke j
 i = jumlah ke bawah

3. Ekstraksi faktor utama, yang merupakan proses reduksi data dan pembentukan faktor-faktor dari data yang ada. Dalam ekstraksi ini :
 - a. Faktor-faktor yang disusun sesuai dengan peranan tiap faktor, faktor pertama adalah faktor terpenting, demikian seterusnya.
 - b. Faktor pertama cenderung merupakan faktor umum, sehingga hampir semua variabel dalam faktor pertama menunjukkan proporsi yang tinggi.
 - c. Semua faktor adalah orthogonal/tidak mempunyai korelasi.
4. Rotasi faktor yang merupakan tahapan untuk menyederhanakan struktur faktor dan menghasilkan faktor yang secara teoritis merupakan faktor-faktor yang mempunyai pengertian paling benar. Hal ini dikarenakan pada faktor yang tidak dirotasikan dapat memuat variabel yang sama dalam beberapa faktor, sehingga sukar diinterpretasikan.
5. Dengan menggunakan faktor *loading*, maka setiap unit observasi bisa dihitung nilai "faktor skornya" untuk masing-masing faktor dasar, dan pengelompokan unit-unit wilayah analisis bisa dilakukan dengan mengkombinasikan dua faktor. Banyak pasangan yang dikombinasikan

tergantung pada tujuan studinya. Faktor skor (Fij) dapat dihitung dengan rumus :

$$\mathbf{F_{ij}} = \mathbf{B_1 X_{i1}} + \mathbf{B_2 X_{i2}} + \dots + \mathbf{B_p X_{ip}}$$

Keterangan : Fij = faktor skor
P = hasil observasi ke i

Dimana B1, B2,....., Bp berdasarkan kofesien regeresi, dan Xi1, Xi2,.....,Xip dimana p adalah hasil observasi ke i. Dalam bentuk matriks rumusnya adalah :

$$\mathbf{F = X B}$$

$$(\mathbf{nxq}) \quad (\mathbf{nxp}) \quad (\mathbf{pxq})$$

keterangan : F = matrik skor faktor
X = matrik data standar
B = matrik koefesien skor faktor

2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis ini digunakan untuk menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val (dalam Kuncoro, 2004:183) sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\frac{JumlahTenagaKerja_{Sektor A} Kec}{JumlahTenagaKerja_{Total} Kec}}{\frac{JumlahTenagaKerja_{Sektor A} Kab}{TenagaKerja_{Total} Kab}}$$

dimana :

1. $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat kecamatan lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat kabupaten.
2. $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat kecamatan lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat kabupaten.
3. $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat kecamatan sama dengan sektor yang sama pada tingkat kabupaten.

3. Analisis Tipologi Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah. Tipologi daerah membagi daerah menjadi empat (4) klasifikasi yaitu (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang tinggi dari rata-rata kabupaten/kota yang diamati; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota yang diamati; (3) daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota yang diamati; (4) daerah relatif

tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota yang diamati (Kuncoro, 2004:118).

1.7.6.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mencapai fakta dengan penginterpretasian yang tepat yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, antara lain dengan cara: mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai situasi dan kondisi yang ada; menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada; memperhatikan yang sedang berlangsung serta memprediksikan kecenderungan yang akan terjadi kemudian; sehingga dari data yang ada dapat ditafsirkan serta disimpulkan. Dalam studi ini, analisis deskriptif secara umum digunakan pada semua tahapan analisis. Lebih jelasnya kerangka analisis secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.5.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi ini terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang yang menguraikan dasar-dasar pemikiran awal dari penelitian yang dilakukan, pokok permasalahan yang dihadapi dan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari studi ini. Selanjutnya dikemukakan ruang lingkup; kerangka pemikiran; keterbatasan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab. II Konsep Pendekatan Perencanaan Dan Pembangunan Wilayah Dan Kaitannya Dengan Disparitas Antar Wilayah

Bab ini mencakup uraian tentang tinjauan aspek teoritis dari berbagai literatur yang bertujuan untuk memahami konsep dasar perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, dan disparitas antar daerah.

Bab. III Karakteristik Wilayah Kabupaten Tanah Datar

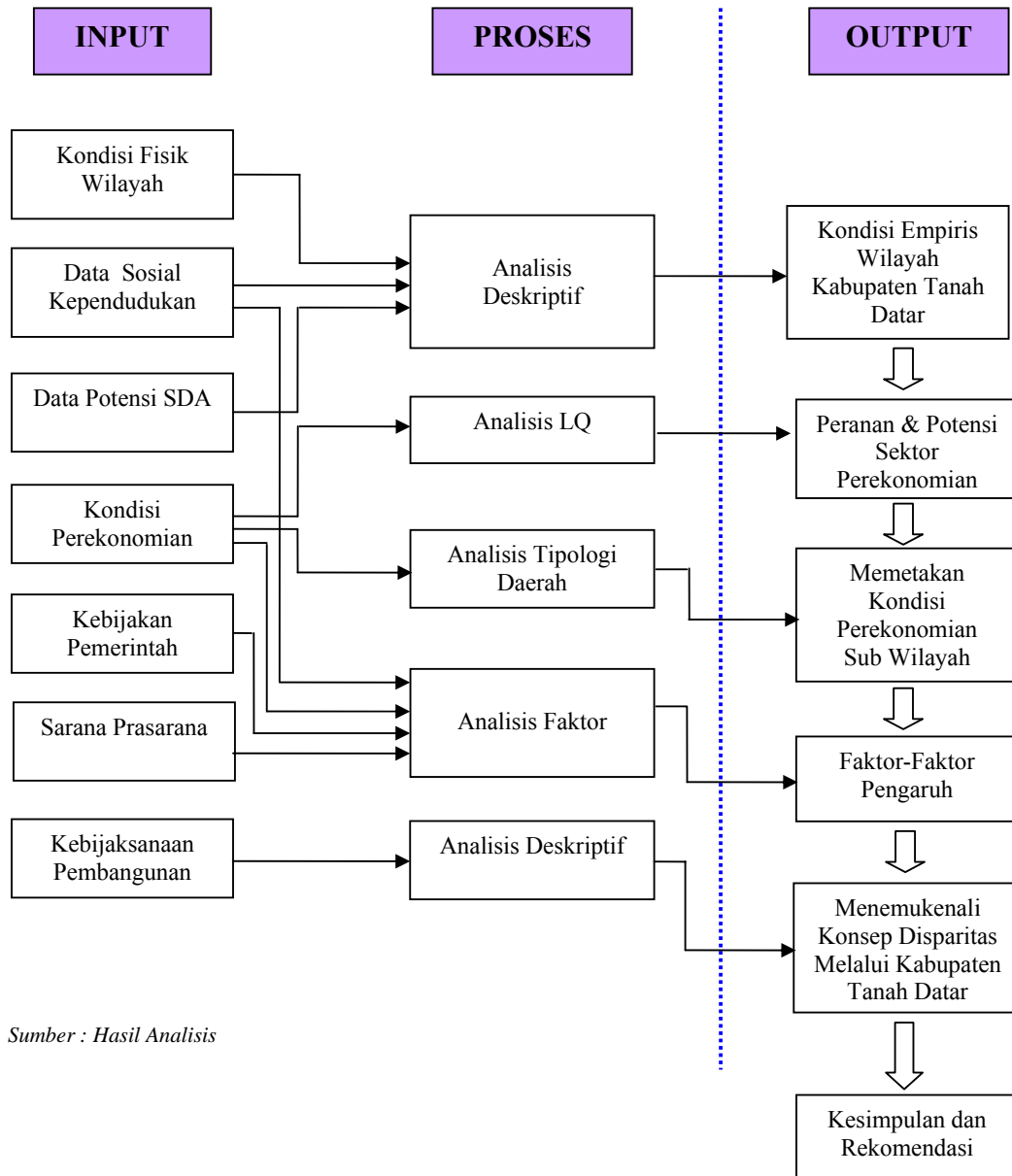
Bab ini menggambarkan secara umum mengenai karakteristik wilayah studi, yang meliputi keadaan fisik dasar; kependudukan; sosial budaya; perekonomian; dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Bab ini juga merupakan suatu tinjauan terhadap potensi-potensi yang dimiliki wilayah studi sebagai suatu pra-analisis terhadap daerah studi.

Bab. IV Analisis Disparitas Antar Sub Wilayah

Bab ini berisikan analisis kondisi empiris dan potensi wilayah studi, analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas di Kabupaten Tanah Datar, analisis kebijaksanaan pembangunan, temuan studi, sintesa hasil analisis dan perumusan konsep disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar.

Bab. V Penutup

Bab ini berisikan temuan studi, kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar.



GAMBAR 1.5
KERANGKA ANALISIS

BAB II

KONSEP PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAITANNYA DENGAN DISPARITAS ANTAR WILAYAH

2.1 Perencanaan Wilayah

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda menurut pandangan orang yang berbeda. Terdapat banyak definisi perencanaan, yang terlihat berbeda antara buku teks yang satu dengan buku teks lainnya. Perbedaan definisi terutama terdapat antara buku teks pada satu cabang ilmu dengan buku teks cabang ilmu lainnya. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan sudut pandang, perbedaan fokus perhatian, dan perbedaan luasnya bidang yang tercakup dalam perencanaan itu sendiri.

2.1.1` Pengertian Perencanaan Wilayah

Salah satu yang menjadi persoalan dalam *regional planning* begitu banyaknya pendekatan yang berbeda, diantaranya begitu banyak pengertian-pengertian dalam ilmu-ilmu sosial, "*regional planning*" berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda dan dalam tempat yang berbeda (Conyers, 1984:340).

Menurut Friedmann dalam Glasson (1974:5) perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, perencanaan adalah terutama berorientasi kepada masa datang, sangat berkenaan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijaksanaan dan program yang menyeluruh. Bilamana cara berpikir ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan sedan dilaksanakan.

Menurut Conyers & Hills (dalam Arsyad (1999:19) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Lewis dalam Faridad (1981:93) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu hal yang mengandung elemen-elemen berikut :

- a. Suatu survei dari kondisi-kondisi ekonomi saat ini.
- b. Membuat daftar usulan belanja publik.
- c. Melakukan diskusi mengenai kemungkinan pembangunan oleh sektor swasta.
- d. Proyeksi ekonomi makro.
- e. Kilas balik dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut Friedmann & Weaver (1979:129) perencanaan wilayah adalah hampir merupakan suatu upaya dalam membuat suatu formula bagi pusat-pusat pertumbuhan dengan mengabaikan dimensi-dimensi lain dari kebijakan wilayah. Wilayah atau teritorial kebijakan-kebijakan khusus menjadi latar belakang diskusi akademik. Sebagai kesimpulan dalam perencanaan wilayah perhatian tidak hanya diberikan sebatas pada sumberdaya alam, implelementasi politik dan organisasi administrasi bagi pembangunan perdesaan.

Kritikan penting diberikan oleh Gore (1984:165) terhadap teritorial perencanaan wilayah, dia mengklaim bahwa Friedmann dan Weaver kelewat idealis dalam pembelaan mereka terhadap perbaikan kehidupan teritorial. Hal yang paling mendasar, gambaran mereka tentang unit-unit teritorial adalah

problematik karena dugaan digunakannya ruang berasal dari ketidakmampuan memahami dan perencanaan dunia sosial. Padahal menurut Gore yang menjadi persoalan mengenai teritorial perencanaan wilayah meliputi tiga aspek yaitu :

1. Unit-unit teritorial (nasional, regional, distrik) merupakan suatu organisme.
2. Region bukan merupakan organisme objektif dengan kehidupan mereka sendiri, tapi diartikan sebagai subjektif dengan hubungan manusia dan kehidupan sosial didalamnya.
3. Keyakinan bahwa perbaikan integritas wilayah akan tercapai dengan `tindakan yang disengaja` dimana populasi lokal akan membangun diri mereka sendiri.

Defenisi perencanaan wilayah yang lebih komprehensif dan mungkin dengan orientasi yang berbeda diberikan oleh Profesor Kosta Mihailovic dalam Faridad (1981:87), yang menyebutkan “pembangunan wilayah diartikan sebagai perubahan sosial ekonomi dalam berbagai tipe wilayah, hubungan interregional yang dinamis dan faktor-faktor relevan yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan hasil dari pembangunan.” Defenisi ini menurut Faridad memiliki kelemahan kurang detail penjelasan secara ilmiah dan terlalu luas serta tidak menyentuh faktor-faktor yang relevan dalam pembangunan.

Faridad (1981:94) sendiri mendefenisikan perencanaan wilayah sebagai suatu aplikasi dari model pertumbuhan bagi perencanaan pembangunan dengan rujukan yang sangat jelas dalam dimensi ruang bagi proses pembangunan. Sebagai alternatif, hal ini dapat ditunjukkan sebagai persiapan *action plan* pemerintah dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah.

2.1.2 Konsep Perwilayahan

John Glasson dalam Sitohang ed. (1990:19) mengemukakan konsep tentang wilayah melalui 2 *fase* metode pengklasifikasian yang berbeda dan mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Pada *fase* pertama memperlihatkan wilayah formal, yaitu berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. *Fase* kedua memperlihatkan perkembangan wilayah fungsional yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Pada mulanya, kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan wilayah formal adalah terutama bersifat fisik seperti topografi, iklim atau vegetasi, dikaitkan dengan konsep determinisme geografik. Tapi belakangan terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi seperti tipe industri atau tipe pertanian dan malahan juga kriteria sosial dan politik.

Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, apabila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah ini kadang-kadang dinamakan daerah nodal atau "*polarised region*" dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti kota dan desa, yang secara fungsional saling berkaitan. Hubungan-hubungan fungsional biasanya terlihat dalam bentuk arus, dengan menggunakan kriteria sosio ekonomi seperti perjalanan ketempat kerja atau

ketempat berbelanja yang menghubungkan pusat-pusat lapangan kerja dan pembelanjaan dengan pusat-pusat subsider.

Tarigan (2004:102) mendefenisikan wilayah sebagai satu kesatuan ruang secara geografi yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya.

Keragaman dalam mendefenisikan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Kenyataannya tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah.

Blair (1991) memandang konsep wilayah nodal terlalu sempit untuk menjelaskan fenomena yang ada dan cenderung menggunakan konsep wilayah fungsional (*functional region*) yaitu suatu konsep wilayah yang lebih luas, dimana konsep wilayah nodal adalah salah satu bagian dari konsep wilayah fungsional. Lebih lanjut Blair cenderung mengistilahkan wilayah perencanaan sebagai wilayah administratif (*administrative region*).

Sementara itu Hoover dan Garantani (dalam Dawkins, 2003:133) memandang konsep wilayah sebagai ruang yang saling berkaitan atau “nodal”. Dan menurut mereka wilayah nodal memiliki dua karakteristik yaitu (1) secara fungsional terintegrasi secara internal pada tingkat tenaga kerja, modal, atau aliran komoditas yang lebih umum terjadi di dalam wilayah daripada daerah lain, dan (2) dalam suatu wilayah, aktivitas terkonsentrasi pada satu titik, atau inti, yang dianggap dominan dan melingkupi daerah belakangnya (*periphery*).

Richardson dalam Sitohang ed. (2001:59) membagi wilayah dalam tiga tipe yaitu :

- Wilayah Homogen

Wilayah dilihat dari segi kesamaan karakteristik serta dimana perbedaan internal dan interaksi regional dianggap bukan suatu yang penting. Wilayah homogen menunjukkan bahwa beberapa daerah berkumpul membentuk sebuah wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kesamaan secara ekonomi, keadaan geografi, atau sosial politik. Dalam konsep wilayah homogen, hubungan regional yang didasari oleh ekonomi lebih penting dari pada perbedaan intraregional.

- Wilayah Nodal (*Polarized*)

Pada wilayah ini keseragaman hanya sedikit diperhatikan. Keterpaduan merupakan hasil dari aliran-aliran internal, hubungan dan saling ketergantungan biasanya terpolarisasi menuju sebuah pusat (*node*) yang dominan. Dalam konsep ini dipahami bahwa ruang ekonomi sangatlah heterogen. Penduduk dan industri tidak tersebar di seluruh lokasi tetapi berkumpul pada lokasi-lokasi yang spesifik. Pada tingkat regional, wilayah disusun oleh titik-titik yang heterogen dengan ukuran berbeda-beda (kota besar, kota kecil, desa) yang berkaitan secara fungsional.

- Wilayah Perencanaan

Dalam konsep ini kesatuan diperoleh dari kontrol politik atau administratif. Wilayah perencanaan lebih mudah dipahami sebagai sebuah daerah dimana kebijaksanaan ekonomi diterapkan, dan hal ini merupakan satu-satunya

kekuatan yang menyatukan. Ukuran wilayah perencanaan yang optimal dibedakan dengan panjang waktu perencanaan. Daerah yang lebih besar dibutuhkan untuk perencanaan jangka panjang, sebaliknya wilayah perencanaan yang lebih kecil menawarkan berbagai keuntungan sistem desentralisasi, antara lain : kesempatan partisipasi masyarakat, biaya informasi rendah, penghematan waktu manajerial, dan kualitas keputusan yang lebih tinggi. Selain itu keuntungan utama dari pendekatan wilayah perencanaan adalah bahwa data dikumpulkan pada unit administrasi yang menjadikan dampak kebijakan lebih mudah untuk dievaluasi, dan struktur administrasi wilayah memudahkan implementasi kebijakan. Kerugiannya adalah kemungkinan tidak konsistennya antara batas administrasi wilayah dengan batas wilayah ekonomi.

Menurut Friedman (dalam United Nations, 1979:37) dalam perencanaan, wilayah homogen dan wilayah fungsional memiliki keterkaitan yang kuat, meskipun kedua wilayah tersebut tidak serupa dengan wilayah perencanaan. Friedman membagi wilayah perencanaan (yang disebutnya sebagai wilayah pengembangan) dalam lima tipe yang berbeda yaitu :

- *Core regions*, yang dicirikan dengan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan terdiri atas satu atau lebih kota-kota yang mengelompok beserta daerah belakangnya.
- *Upward transitional areas*, merupakan kawasan-kawasan yang terhubung dengan daerah inti (*core regions*) dan mempunyai kapasitas sumber daya. Suatu karakteristik menyolok ditandai sebagai tujuan imigrasi. Pembangunan ekonomi akan meningkat karena adanya permintaan dari daerah inti.

- *Resource frontier regions*, merupakan kawasan-kawasan yang terdiri atas permukiman baru dan didominasi pertanian.
- *Downward transitional areas*, merupakan kawasan lama dan stagnan dengan kegiatan ekonomi perdesaan.
- *Special problems region*, merupakan kawasan-kawasan yang perlu perhatian dengan pengembangan khusus karena kekayaan sumber daya atau lokasi yang strategis, seperti lembah sungai, dapat dikembangkan sebagai tempat pariwisata dan zona perbatasan.

2.2 Pengembangan Wilayah

Pada hakekatnya pengembangan (*development*) merupakan upaya untuk memberi nilai tambah dari apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut MT Zen dalam buku Tiga Pilar Pengembangan Wilayah (1999) pengembangan lebih merupakan motivasi dan pengetahuan daripada masalah kekayaan. Tetapi bukan berarti bahwa kekayaan itu tidak relevan. Pengembangan juga merupakan produk belajar, bukan hasil produksi; belajar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki bersandar pada lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya proses pengembangan itu juga merupakan proses belajar (*learning process*). Hasil yang diperoleh dari proses tersebut, yaitu kualitas hidup meningkat, akan dipengaruhi oleh instrumen yang digunakan (Alkadri et.al, 1999:4).

Mengacu pada filosofi dasar tersebut maka pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan *stake holders* (masyarakat, pemerintah, pengusaha) di suatu wilayah, terutama dalam memanfaatkan sumberdaya alam

dan lingkungan di wilayah tersebut dengan instrument yang dimiliki atau dikuasai, yaitu teknologi. Dengan lebih tegas MT Zen menyebutkan bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumberdaya alam, manusia dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri (Alkadri et.al, 1999:4).

Tujuan utama dari pengembangan wilayah adalah menyasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada didalamnya dapat optimal mendukung kegiatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan. Optimal berarti dapat dicapai tingkat kemakmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial budaya dan dalam alam lingkungan yang berkelanjutan (Ambardi dan Prihawantoro, 2002:49).

Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Untuk itu pengertian wilayah menjadi penting dalam pembahasan ini. Menurut PP Nomor 47 Tahun 1997 wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Susilo, 2002:2).

2.2.1 Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan yang terkenal dikembangkan oleh Francois Perroux seorang ahli ekonomi Perancis yang berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial, sebagaimana halnya dengan perkembangan industri, adalah bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak

terjadi secara serentak, pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah dan perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian (Adisasmita, 2005:59).

Lebih spesifik lagi Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruh daerah pengaruhnya (Dawkins, 2003:140).

Konsep-konsep yang dikemukakan di dalam teori pusat pertumbuhan antara lain (Glasson dalam Sitohang ed., 1990:155) :

1. Konsep *leading industries* dan perusahaan *propulsif*, menyatakan bahwa di pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan besar yang bersifat propulsif yaitu perusahaan yang relatif besar, menimbulkan dorongan dorongan pertumbuhan nyata terhadap lingkungannya, mempunyai kemampuan inovasi tinggi, dan termasuk ke dalam industri-industri yang cepat berkembang.

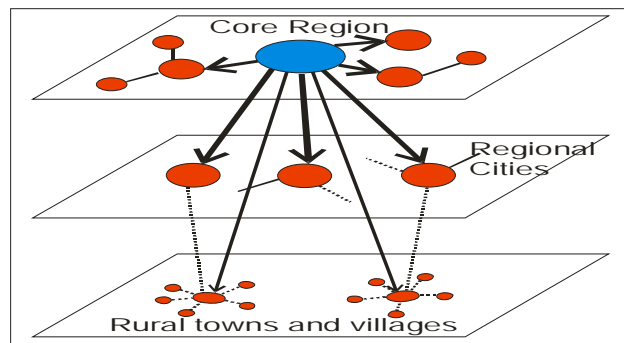
Dalam konsep ini *leading industries* adalah :

- a. Relatif baru, dinamis, dan mempunyai tingkat teknologi maju yang mendorong iklim pertumbuhan kondusif ke dalam suatu daerah permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi dan biasanya dijual ke pasar-pasar nasional.
- b. Mempunyai kaitan-kaitan antara industri yang kuat dengan sektor – sektor lainnya sehingga terbentuk *forward linkages* dan *backward linkages*.

2. Konsep polarisasi. Konsep ini mengemukakan bahwa pertumbuhan *leading industries* yang sangat cepat (*propulsive growth*) akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan.
3. Konsep *spread effect*. Konsep ini mengemukakan bahwa pada suatu waktu kualitas propulsif dinamis dari kutub pertumbuhan akan memencar dan memasuki ruang-ruang di sekitarnya. Menurut Myrdal dan Hirschman, *spread effect* atau *trickling down effect* merupakan lawan dari *back wash effect* atau *polarization effect*.

Secara diagram model pusat pertumbuhan seperti pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Growth Pole Industrial Diffusion Model



Sumber : Mike Douglas, 1998, *A Regional Network Strategy For Reciprocal Rural – Urban Linkages*

Dalam penerapannya, teori kutub pertumbuhan digunakan sebagai alat kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Banyak negara telah menerima konsep kutub pertumbuhan sebagai alat transformasi ekonomi dan sosial pada skala regional. Namun demikian konsep ini banyak mendapat kritik para ahli, yang pada umumnya berpendapat bahwa penerapan konsep ini cenderung semakin meningkatkan disparitas wilayah negara sedang berkembang, terutama antara daerah pusat atau kutub dengan daerah pengaruhnya. Gejala ini disebabkan karena

pusat pertumbuhan yang umumnya adalah kota-kota besar ternyata sebagai pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial adalah cukup kuat, sehingga terjadi tarikan urbanisasi dari desa-desa wilayah pengaruh ke pusat pertumbuhan (kota besar), atau terjadi dampak polarisasi yaitu daerah pusat atau kutub cenderung lebih banyak menarik sumber daya dari daerah belakang daripada *spread effect* yang ditimbulkannya, akibatnya daerah pusat yang lebih maju akan bertambah maju, sedangkan daerah belakang akan semakin tertinggal.

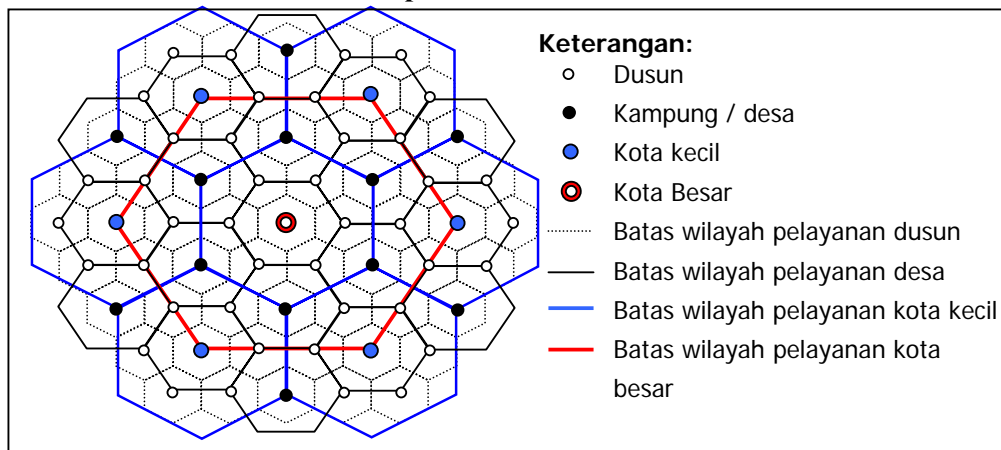
2.2.2 Teori Tempat Pusat

Teori tempat pusat (*Central Place Theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Walter Christaller seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman. Teori ini timbul dari perhatian Christaller terhadap penyebaran permukiman, desa, dan kota-kota yang berbeda-beda ukuran luasnya di Jerman Selatan. Penyebaran tersebut kadang bergerombol atau berkelompok, kadang juga terpisah jauh antara satu dengan yang lainnya. Menurut Christaller dalam Jayadinata (1999:180), pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terjadi secara jelas di wilayah yang mempunyai syarat : (1) topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan, (2) kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batubara.

Menurut proses yang sama, jika perkembangan wilayah meningkat akan berkembang hierarki jenjang ketiga, yaitu salah satu kampung akan tumbuh

menjadi kota yang dikelilingi oleh enam kampung yang dilayaninya. Pada hierarki jenjang keempat terdapat kota besar yang dikelilingi oleh enam kota yang dilayaninya. Karena perkembangan tersebut, dapat dikatakan bahwa kota-kota umumnya timbul sebagai akibat perkembangan potensi wilayah (alam dan manusia), dan kemudian kota sebagai pusat pelayanan berperan dalam mengembangkan wilayah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Hipotesis Christaller



Sumber : Jayadinata, 1999:181

Sedangkan ide dasar yang dikemukakan oleh Losch dalam Dawkins (2003:137) adalah bahwa ukuran relatif wilayah pemasaran suatu perusahaan, digambarkan sebagai tempat penjualan produk perusahaan dipengaruhi oleh biaya-biaya transportasi dan skala ekonomi. Jika pengaruh skala ekonomi relatif lebih besar dari biaya transportasi maka seluruh produksi akan terkumpul pada satu tempat. Sedangkan jika pengaruh biaya transportasi relatif lebih besar dari skala ekonomi maka perusahaan akan menyebar keseluruh wilayah.

Christaller mengembangkan model suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri berikut :

- Wilayahnya adalah dataran tanpa roman, semua adalah datar dan sama.
- Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (*isotropic surface*).
- Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah.
- Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip jarak dan biaya.

Christaller mencoba mengekspresikan hukum tentang persebaran dan besarnya permukiman (tempat pusat) yang bersifat keruangan di bidang ekonomi, sehingga muncul lima asumsi dari Christaller (F.M. Dieleman dikutip dari Daldjoeni, 1992 : 108) yaitu :

- a) Karena para konsumen yang menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat yang dinyatakan dalam biaya dan waktu sangatlah penting.
- b) Karena konsumen yang memikul ongkos angkutan, maka jangkauan (*range*) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
- c) Semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ketempat pusat yang paling dekat letaknya.
- d) Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya. Artinya ada hubungan antara besarnya tempat pusat dan besarnya (luasnya) wilayah pasaran, banyaknya penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah yang bersangkutan.
- e) Wilayah tersebut digagaskan sebagai dataran dimana penduduknya tersebar merata dan ciri-ciri ekonomisnya sama (besar penghasilan sama).

Dari kelima asumsi tersebut, Christaller mendapatkan teorinya tentang tahapan pembentukan wilayah pasaran yang berpola heksagonal sebagai berikut :

- a) Suatu barang yang ditawarkan dari suatu tempat pusat berdasarkan kelima asumsi diatas, suatu tempat akan membentuk suatu wilayah lingkaran di sekitar tempat pusat.
- b) Adanya tawaran berupa barang yang berasal dari banyak tempat pusat akan membentuk suatu pola yang terdiri atas wilayah-wilayah yang berbentuk lingkaran.
- c) Pola tersebut akan membuat orang keluar wilayah pelayanan. Jika terdapat pemenuhan terhadap barang dan jasa, lingkaran-lingkaran tersebut akan saling mendahului, sehingga tidak ada ruang yang terbuka.
- d) Pada kenyataannya pola berbentuk lingkaran tersebut disebabkan karena akibat dari asumsi, sehingga terbentuklah heksagon.
- e) Dari berbagai macam tempat yang ditawarkan banyak barang dengan jangkauan (*range*) yang beraneka ragam. Dari asumsi-asumsi sebelumnya dikembangkan suatu pola persebaran heksagonal dari tingkat yang tinggi hingga tingkat yang rendah.

Pembagian hierarki pusat-pusat pelayanan di suatu wilayah sering tidak merata sehingga mengakibatkan ketidakmerataan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kadang akses untuk mencapai pusat pelayanan sulit, sehingga mengakibatkan wilayah belakang (*Hinterland*) menjadi terbelakang karena tidak ditunjang dengan jumlah fasilitas yang memadai untuk dapat meningkatkan produktivitasnya maupun pelayanannya kepada masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan peran pusat-pusat pelayanan, termasuk dengan meningkatkan akses kemudahan pencapaian dari wilayah belakang (*hinterland*) menuju pusat pelayanan yang terdekat. Di dalam sistem pelayanan yang baik harus memiliki keseimbangan antara pola kebutuhan dan jasa pelayanan sehingga dalam peningkatan kebutuhan akan diikuti dengan jasa pelayanan yang semakin besar.

Apabila jumlah penduduk di suatu wilayah dengan satu pusat telah melebihi ambang batas dan terus meningkat hingga mencapai jumlah tertentu, kemungkinan penduduk yang berada jauh dari pusat telah melebihi jarak ekonomi, sehingga mereka akan mencari pelayanan di pusat-pusat lainnya yang terdekat. Dalam melakukan strategi pengembangan wilayah di pusat-pusat pelayanan memiliki beberapa keuntungan :

- a) Adanya penghematan terhadap investasi yang dikeluarkan, karena strategi yang bersifat desentralisasi konsentrasi sehingga tidak semua wilayah mendapatkan investasi tetapi hanya wilayah yang berpotensi saja.
- b) Adanya perkembangan pusat-pusat pelayanan hingga ke wilayah belakang (*hinterland*) melalui akses pencapaian yang memadai untuk mengatasi kesenjangan wilayah.
- c) Terselenggaranya pengembangan antara kota dan desa dengan baik karena saling menguntungkan.

Selain itu Fisher dan Rushton menyatakan bahwa jaringan pusat-pusat pelayanan yang memiliki hierarki akan menguntungkan penduduk di sekitar pusat

tersebut (Fisher dan Rushton dalam Rondinelli, 1985:5-6). Keuntungan tersebut adalah :

- a) Membuat efisiensi bagi konsumen karena pemenuhan terhadap kebutuhan yang berbeda-beda akan didapatkan dengan sekali bepergian keluar dari desa.
- b) Mengurangi jumlah transportasi yang dibutuhkan untuk melayani pergerakan antar desa karena masyarakat sudah mengenal berbagai cara alternatif terhadap jalur hubungan sehingga jalur yang paling penting dan kemampuan pemenuhan kebutuhan fasilitas transportasi yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.
- c) Mengurangi panjang jalan yang harus ditingkatkan karena sudah diketahui jalur yang paling penting bagi setiap desa sehingga dapat ditentukan prioritas dalam pengembangan jalan.
- d) Mengurangi biaya untuk penyediaan berbagai kebutuhan pelayanan bagi fasilitas-fasilitas yang ada, karena biaya tersebut ditanggung secara bersama-sama.
- e) Pengawasan lebih efektif dan ekonomis karena berbagai aktivitas bergabung menjadi satu di pusat pelayanan.
- f) Memudahkan adanya pertukaran informasi antar berbagai aktivitas yang saling berhubungan.
- g) Lokasi-lokasi dengan keunggulan lokasi sumberdaya akan berkembang secara spontan sebagai respon terhadap kebutuhan di wilayah belakangnya (*hinterland*).

Dari pembahasan di atas jelas bahwa wilayah dalam perkembangannya memiliki pusat dan sub pusat sebagai wilayah pengaruhnya. Pusat dapat diartikan sebagai kota yang menjadi pusat pelayanan dan terkonsentrasinya kegiatan. Besarnya wilayah kota dipengaruhi oleh jarak pelayanan bagi penduduknya, sehingga dalam satu pusat dapat memberikan pelayanan maksimalnya. Penduduk yang belum menerima pelayanan, akan dilayani oleh pusat lainnya sehingga hubungan antar pusat tersebut akan membentuk pola heksagonal dimana masing-masing wilayah pengaruh memiliki pusat sendiri.

2.2.3 Interaksi Desa Kota

Menurut Singer (dalam Douglass, 1998:1) peran kota-kota terhadap perdesaan masih dipertanyakan apakah masih bersifat parasit atau sebagai pendorong. Menurut pandangan filosofis pembangunan sangat mewarnai perkembangan terhadap pandangan suatu model ekonomi. Teori Lewis menjelaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pembangunan dibutuhkan adanya '*transfer surplus*' dari sektor atau kawasan pertanian ke industri-industri perkotaan. *Transfer surplus* dapat terjadi melalui pengambilan dan penarikan sumberdaya-sumberdaya manusia (tenaga kerja), modal dan sumber daya lainnya oleh perkotaan atas nama kepentingan pembangunan (Fei dan Ranis dalam Douglass, 1998:1).

Menurut Gibb dan Samluckrat (dalam Douglass, 1998:9) bentuk keterkaitan desa kota dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.1
KETERKAITAN FUNGSI DESA-KOTA DAN KONDISI
SALING KETERGANTUNGAN

Fungsi Sistem Perkotaan	Saling Ketergantungan	Fungsi Sistem Perdesaan
○ Pusat perdagangan hasil pertanian dan produk perdesaan lainnya dengan keterkaitannya dengan daerah lain	↔	○ Perubahan volume produksi dan peningkatan produktivitas produk pertanian dan produk perdesaan lainnya
○ Layanan pendukung pertanian : sarana produksi, jasa perbaikan alat pertanian, kredit, informasi metode berproduksi (inovasi)	↔	○ Intensifikasi pertanian yang dipengaruhi oleh : - Infrastruktur perdesaan - Insentif produksi (harga, dll) - Pendidikan dan peningkatan kapasitas untuk mengadopsi dan mengadaptasi inovasi
○ Pasar produk non pertanian : - Produk pertanian olahan - Pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi)	↔	○ Peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang & jasa non pertanian
○ Industri berbasis pertanian (untuk menciptakan sebanyak mungkin nilai tambah bagi daerah)	↔	○ Produksi komoditas yang potensial untuk dilakukan pengolahan, dan diversifikasi pertanian
○ Lapangan kerja di luar pertanian	↔	○ Semua fungsi di atas

Sumber : Douglass, 1998:9

Berbagai konsep dan strategi pembangunan telah ditawarkan untuk memperbaiki keterkaitan desa kota yaitu dalam bentuk intervensi pembangunan oleh pemerintah. Upaya seperti ini akan berhadapan dengan kecenderungan mekanisme pasar "status quo" dan *mainstream* praktis pembangunan yang cenderung "urban bias" dan mengedepankan pembangunan aglomerasi pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan utama. Friedman (1968:115) berpendapat bahwa pertumbuhan kota-kota kecil di kawasan *periphery*

(*hinterland*) atau di kawasan perdesaanlah yang dapat menandingi kecenderungan aglomerasi yang berlebihan ke kota-kota besar utama. Ketiadaan atau tidak berkembangnya (*stagnasi*) kota-kota skala kecil dan sedang serta tidak berkembangnya unsur-unsur urbanism positif di perdesaan pada akhirnya menyebabkan penyebaran pertumbuhan (*spread effect*) dari kota-kota utama hanya terperangkap secara lokal (*local capture*).

Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah salah satunya dapat dicapai dengan adanya interaksi fisik, ekonomi, sosial dan kelembagaan serta teknologi desa-kota melalui '*transfer surplus*' dari sektor atau kawasan pertanian ke industri-industri perkotaan selain itu diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan seperti irigasi, pembangunan jalan/sistem transportasi, listrik, komunikasi, pelabuhan, pembangunan pasar, outlet-outlet produk, *urban service*, perbankan/permodalan dan lain-lain.

2.3 Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005:108).

Todaro (1994:15) mendefenisikan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran dalam kerangka pembangunan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, Todaro melihat

bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan.

Sementara itu dalam kerangka yang lebih empiris, dua teori besar yang mewarnai pelaksanaan pembangunan di banyak negara berkembang pasca perang dunia II adalah teori Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan (*stages of growth*) dan teori Harrod-Domar tentang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1994:69). Rostow yang mengajukan lima tahap pertumbuhan dalam pembangunan ekonominya, memandang bahwa tingkatan kritis bagi negara berkembang adalah tahap tinggal landas, dimana masyarakat suatu negara berkembang akan mengalami transformasi menuju masyarakat yang maju. Selanjutnya Rostow berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu dilaksanakan dalam tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan luar negeri agar dapat menghasilkan investasi yang cukup bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1994:70).

Uraian Rostow mengenai investasi, kemudian dijelaskan lebih dalam oleh teori Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar menyatakan bahwa agar tumbuh suatu perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam proporsi tertentu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin banyak tabungan dan investasinya, semakin cepat perekonomian tersebut tumbuh. Lebih jauh Harrod-Domar juga menekankan pentingnya proses transformasi struktural yang alami dalam suatu pembangunan ekonomi. Dalam ekonomi, proses tersebut harus dimulai dengan menciptakan lapangan pekerjaan (*employment*). Penciptaan

lapangan pekerjaan harus berdampak positif pada peningkatan pendapatan (*income generation*), yang pada gilirannya selain untuk dikonsumsi juga dialokasikan untuk tabungan (*saving mobilization*). Tabungan tersebut pada saatnya dapat bermanfaat bagi usaha untuk peningkatan modal (*capital accumulation*), yang akan berguna bagi proses produksi yang dilakukan. Langkah terakhir inilah yang pada akhirnya dipandang akan menciptakan perubahan pada pola produksi (*technical change*), yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup pelaku ekonomi yang bersangkutan (Sumodiningrat, 2001:17).

Peningkatan tabungan dan investasi tentunya memiliki kaitan yang sangat erat dengan peran serta masyarakat. Secara historis, pendekatan *people oriented*, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal baru. Semakin besar masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan maka diharapkan semakin tinggi pula tabungan dan investai, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

2.4 Disparitas Antar Daerah

Disparitas pembangunan regional merupakan fenomena universal. Di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya, disparitas pembangunan merupakan masalah regional yang tidak merata. Disparitas ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai setiap bangsa. Ketidakeimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah/kawasan *hinterland* menjadi lemah karena pengurusan sumberdaya yang berlebihan

(*backwash*) yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah di pusat-pusat pembangunan secara masif dan berlebihan.

Profesor Gunnar Myrdal dalam Jhingan (1996:268) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang.

Myrdal juga menjelaskan bahwa asal ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Penyebab gejala ini menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Dia berkata "Jika segala sesuatu diserahkan pada kekuatan pasar tanpa dirintangi oleh intervensi kebijaksanaan apa pun maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan dan hampir semua kegiatan ekonomi yang cenderung mendatangkan keuntungan pada umumnya akan mengelompok di daerah atau di wilayah tertentu saja dan meninggalkan daerah-daerah lain di negara tersebut tetap terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1996:270).

Menurut Lay (1993:53) indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan

konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana. Jadi berdasarkan pernyataan Lay diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketidakmerataan itu terbagi atas :

Fisik : Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian.

Ekonomi : Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing kecamatan.

Sosial : Jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan.

Menurut Myrdal dalam Jhingan (1996:272), faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan regional di negara miskin adalah kebijaksanaan nasional ”lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter dan struktur kekuasaan yang membantu si kaya menghisap si miskin”. Pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijaksanaan yang bersifat adil (*egaliter*) guna memperlemah dampak balik dan memperkuat dampak sebar.

Dalam konteks pemikiran yang lebih universal, proses pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan sesuatu yang dinamis. Suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang akan tetapi dapat juga mengalami kemunduran dalam perkembangannya, setidak-tidaknya apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemajuan atau kemunduran perkembangan di satu atau beberapa wilayah dapat mempengaruhi keadaan sistem yang terbentuk diwilayah tersebut. Seandainya suatu proses kemajuan terjadi pada wilayah yang tingkat perkembangannya sudah tinggi sedangkan perkembangan wilayah lainnya relatif masih kurang, maka dalam sistem wilayah tersebut akan terjadi disparitas perkembangan yang semakin

besar. Sebaliknya, jika perkembangan yang tinggi terjadi di wilayah-wilayah yang tingkat perkembangannya masih rendah, maka disparitas perkembangan antarwilayah akan semakin kecil (Nurzaman, 1996:16).

Sehubungan dengan hal tersebut, Williamson menyatakan bahwa disparitas antarwilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan. Lebih jauh dikatakannya bahwa secara umum beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas antarwilayah tersebut yaitu (Williamson dalam Friedman dan Alonso (ed), 1975:166) :

1. Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian (terdidik) dari daerah-daerah kurang berkembang ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar.
2. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar (skala ekonomi, ekonomi eksternal, dan lain sebagainya), dimana keuntungannya relatif besar, demikian pula resiko kerugian relatif kecil pada umumnya. Disamping itu, terjadi pula pengaliran modal dari daerah miskin menuju daerah yang telah berkembang.
3. Kebijakan pemerintah, disadari atau tidak cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi didaerah yang telah berkembang – karena adanya kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru telah mendorong perkembangan industri yang lebih pesat didaerah yang lebih maju.

4. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri-industri di daerah yang telah berkembang. Industri di daerah yang kaya telah menjadi sumber dari barang-barang yang diperdagangkan, dan demikian industri yang dikembangkan di daerah miskin akan mengalami banyak kesulitan dalam memperoleh pasarnya. Ketidaksanggupan untuk bersaing dengan industri di daerah yang lebih maju menjadi lebih serius lagi keadaannya sebagai akibat dari buruknya jaringan perangkutan dan prasarana ekonomi lainnya di daerah yang lebih miskin (Sukirno, 1976:14).
5. Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (regional market) telah menyebabkan terjadinya rintangan untuk pemencaran dan pelipatgandaan pendapatan.

Menurut Tambunan (2001:176-181) beberapa faktor utama penyebab terjadinya disparitas antar wilayah sebagai berikut:

- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ekonomi dari wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan wilayah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

- b. Alokasi investasi

Indikator lain yang juga menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Berdasarkan teori pertumbuhan Harrod-Domar yang menerangkan adanya

korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita diwilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarwilayah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, juga merupakan faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Relasi antar mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antar provinsi dapat lebih jelas dipahami dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input. Dasar teorinya adalah sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antarwilayah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarwilayah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah), mempengaruhi mobilitas atau alokasi faktor produksi antarwilayah. Sesuai teori penawaran yang tak terbatas dari A. Lewis, jika perpindahan faktor produksi antarwilayah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antarwilayah akan tercapai dan semua wilayah akan lebih baik (dalam pengertian optimal Pareto: semua daerah menjadi lebih baik daripada sebelum terjadi perpindahan tersebut).

d. Perbedaan SDA antarwilayah

Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur

dibandingkan daerah yang miskin SDA, sehingga sumberdaya alam merupakan modal utama. Dan untuk maksud ini diperlukan faktor-faktor lain diantaranya sangat penting SDM dan teknologi.

e. Perbedaan demografis antar wilayah

Ketimpangan ekonomi regional disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antarwilayah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

f. Kurang lancarnya perdagangan antarwilayah

Kurang lancarnya perdagangan antardaerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi wilayah. Ketidاكلancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka fenomena disparitas antardaerah perlu menjadi perhatian penting dalam upaya pengembangan wilayah secara spasial. Dalam konteks ini, suatu pengembangan wilayah selain ditujukan pada pendayagunaan potensi serta manajemen berbagai sumberdaya melalui pembangunan perkotaan, perdesaan, dan prasarana untuk peningkatan kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut, maka dalam lingkup yang lebih luas

pengembangan wilayah perlu ditujukan bagi upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi melalui keterkaitan serta mengurangi kesenjangan antarwilayah (Firman, 1995:4).

Memandang fenomena disparitas antar daerah diatas, tidak semua ahli sependapat bahwa pembangunan harus terjadi secara serentak di segala sektor dan seluruh wilayah harus tumbuh dan berkembang secara serentak. Hirschman berpendapat bahwa perkembangan seharusnya tidaklah seimbang. Perkembangan terjadi karena ada sektor yang berkembang lebih pesat dari sektor lainnya. Sektor ini berkembang dengan ekonomis sehingga dapat menyerap perkembangan sektor lainnya. Sektor yang baru ini, dengan harapan dapat memenuhi permintaan sektor sebelumnya, berkembang lebih pesat lagi melebihi sektor semula. Demikian seterusnya. Jadi perkembangan adalah suatu keadaan ketidakseimbangan yang berantai. Dalam perkembangan selalu ada sektor yang memimpin (*leading*), yang menjalarkan perkembangan ke sektor lainnya (Hirschman, 1968:62-63).

Menurut Hirschman perkembangan adalah perubahan dari satu tipe ekonomi ke tipe ekonomi lainnya. Negara berkembang adalah negara dengan ciri ekonomi yang *stagnant* dan *selfcontained*. Apabila pada tipe ekonomi seperti ini dibangun industri/sektor maju yang merupakan ciri tipe ekonomi maju secara serentak, maka sukar sekali terjadi kaitan antara kedua tipe ekonomi dengan ciri yang berbeda tersebut. Dan yang terjadi bukanlah perubahan, akan tetapi dualisme ekonomi. Lebih lanjut Hirschman menerangkan bahwa negara berkembang terlalu banyak memiliki kekurangan sumberdaya sehingga tidak mungkin membangun begitu banyak sektor sekaligus. Andai negara berkembang mampu melakukan hal

tersebut, maka sudah tentu negara tersebut tidak tergolong kedalam negara berkembang (Hirschman, 1968:51-52).

Hampir bersamaan dengan pendapat Hirschman pada tahun 1958, Perroux mengemukakan konsep *growth pole* (kutub pertumbuhan). Dasar dari konsep ini juga ketidakseimbangan (*unbalanced development*). Menurut Perroux perkembangan tidak terjadi secara serentak dimana-mana (Nurzaman, 2002:2). Menurut Glasson salah satu alasannya adalah dari segi anggaran belanja negara, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang besar (Sihotang ed, 1990:164).

2.5 Sintesa Kajian Teori

Dari uraian teori-teori dan konsep tentang pengembangan wilayah dan fenomena terjadinya disparitas antar wilayah akibat ketidakseimbangan pembangunan, sehingga untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam bagian awal studi ini digunakan teori-teori dan konsep pengembangan wilayah serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah yang digunakan dalam merumuskan variabel-variabel penelitian (lihat Tabel II.2). Teori-teori dan konsep tersebut diantaranya adalah :

- Faridad (1981:94) mendefenisikan perencanaan wilayah sebagai suatu aplikasi dari model pertumbuhan bagi perencanaan pembangunan dengan rujukan yang sangat jelas dalam dimensi ruang bagi proses pembangunan.
- Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah (Susilo, 2002:2).

- Francois Perroux berpendapat bahwa bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah (Adisasmita, 2005:59).
- Menurut Christaller pembagian hierarki pusat-pusat pelayanan di suatu wilayah sering tidak merata sehingga mengakibatkan ketidakmerataan di dalam pelayanan kepada masyarakat (Daldjoeni, 1992 : 108).
- Friedman (1968) berpendapat bahwa pertumbuhan kota-kota kecil di kawasan *periphery (hinterland)* atau di kawasan perdesaanlah yang dapat menandingi kecendrungan aglomerasi yang berlebihan ke kota-kota besar utama.
- Todaro (1994:15) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran dalam kerangka pembangunan ekonomi.
- Harrod-Domar menyatakan bahwa agar tumbuh suatu perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam proporsi tertentu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Sumodiningrat, 2001:17).
- Menurut Lay (1993:53) indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana.
- Menurut Myrdal dalam Jhingan (1996:272), faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan regional di negara miskin adalah kebijaksanaan nasional ”lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter dan struktur kekuasaan yang membantu si kaya menghisap si miskin”.

- Williamson menyatakan bahwa disparitas antarwilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan (Williamson dalam Friedman dan Alonso (ed), 1975:166).
- Menurut Tambunan (2001:176-181) beberapa faktor utama penyebab terjadinya disparitas antar wilayah yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarwilayah, perbedaan SDA antarwilayah, perbedaan demografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antarwilayah.
- Namun tidak semua ahli sependapat bahwa pembangunan harus terjadi secara serentak di segala sektor dan seluruh wilayah harus tumbuh dan berkembang secara serentak. Hirschman berpendapat bahwa perkembangan seharusnya tidaklah seimbang (Hirschman, 1968:62-63).

Pro dan kontra dari para ahli tentang apakah pembangunan itu harus serentak atau tidak menjadi suatu telaah yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Teori perkembangan yang seimbang menganut paham bahwa perekonomian dapat berkembang apabila semua sektor berkembang secara serempak dan selaras. Namun tentu saja hal ini tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena pembangunan yang serempak membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit terutama sumberdaya finansial. Ahli lain yang menganut paham pembangunan tidak seimbang menyatakan bahwa kesenjangan adalah bagian dari perkembangan wilayah. Kesenjangan wilayah tidak selalu berkonotasi negatif, karena minimnya sumberdaya finansial menyebabkan pembangunan harus dilakukan secara bertahap, dan bertahap bukan berarti kesenjangan.

TABEL II.2
VARIABEL TERPILIH DARI KAJIAN TEORI

Variabel	Sumber	Topik Bahasan
Kebijakan pemerintah	Myrdal dalam Jhingan (1996:272)	Pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijaksanaan yang bersifat adil (egaliter) guna memperlemah dampak balik dan memperkuat dampak sebar.
	Williamson dalam Friedman dan Alonso (ed), 1975:166)	Cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi didaerah yang telah berkembang.
Ketersediaan sarana prasarana	Lay, 1993	Indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana.
	Christaller dalam Daldjoeni, 1992 : 108	Akses untuk mencapai pusat pelayanan sulit, mengakibatkan wilayah belakang (<i>Hinterland</i>) menjadi terbelakang karena tidak ditunjang dengan jumlah fasilitas yang memadai.
	Sukirno, 1976:14	Ketidaksanggupan untuk bersaing dengan daerah yang lebih maju sebagai akibat dari buruknya jaringan perangkutan dan prasarana ekonomi lainnya di daerah yang lebih miskin.
Kondisi perekonomian	Williamson dalam Friedman dan Alonso ed.(1975:166)	Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar (skala ekonomi, ekonomi eksternal, dan lain sebagainya).
Kondisi geografis, kondisi SDA, kondisi sosial kependudukan	Tambunan, 2001:176-181	Faktor-faktor utama penyebab terjadinya disparitas yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan SDA, perbedaan demografis, dan kurang lancarnya perdagangan antarwilayah.
Kebijaksanaan pembangunan	Hirschman (1968:62-63)	Perkembangan seharusnya tidaklah seimbang.

Sumber : Hasil Sintesa dari Kajian Teori

BAB III

KARAKTERISTIK WILAYAH KABUPATEN TANAH DATAR

3.1 Isu Perkembangan Wilayah Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah kabupaten agraris yang menyandarkan perekonomiannya pada sektor primer (pertanian). Dimana kontribusi sektor pertanian pada tahun 2004 hampir 30 % bagi pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar. Perkembangan Kabupaten Tanah Datar cenderung lambat dibanding hinterlandnya yaitu Kota Padang Panjang, Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003-2013, Kabupaten Tanah Datar masuk kedalam kategori pertumbuhan rendah/lambat. Dalam upaya mengoptimalkan pengembangan Wilayah Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah mengembangkan wilayah-wilayah strategis yang diperkirakan cepat tumbuh dan berkembang dan ke depan akan direncanakan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang dijadikan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Tanah Datar yaitu Kawasan Koto Baru di Kecamatan X Koto dan Kawasan Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung. Dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah kabupaten sebagai berikut :

a. Ketersediaan Sumberdaya Alam

Ketersediaan sumberdaya alam di Kabupaten Tanah Datar sebagai sumberdaya pembangunan sangat dominan mengandalkan ketersediaan tanah bagi kegiatan pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor basis kabupaten. Namun kondisi topografi dari lahan di Kabupaten Tanah Datar umumnya mempunyai tingkat ketererangan yang cukup tinggi. Wilayah dengan tingkat kemiringan > 15%

mempunyai porsi terluas hampir mencapai 60% dari total luas kabupaten. Kondisi ini menyebabkan eksploitasi lahan bagi kegiatan pertanian memerlukan suatu penanganan khusus dan teknik yang tepat, agar tidak menyebabkan menurunnya kualitas lahan secara permanen akibat terkikisnya unsur hara tanah oleh aliran air hujan.

b. Tingginya Migrasi Penduduk Keluar

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan sangat rendah. Dalam kurun waktu 1995-2004 pertumbuhan penduduk bahkan negatif yaitu -1,13%. Hal ini disebabkan tingginya migrasi penduduk keluar kabupaten. Pada satu sisi, tingkat pertumbuhan dan kepadatan yang rendah serta migrasi penduduk keluar kabupaten menyebabkan tingkat optimasi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam juga rendah jika tidak dibarengi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung, terutama jika yang melakukan migrasi adalah penduduk dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang baik maka merupakan suatu kerugian bagi perkembangan pembangunan kabupaten.

c. Terjadi Kesenjangan Perkembangan Antar Sub Wilayah

Perbedaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan ketidakmerataan pembangunan menyebabkan terjadi kesenjangan perkembangan antar sub wilayah. Dimana terdapat daerah/kecamatan yang maju dan kecamatan yang kurang maju atau lambat pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota-kota kecamatan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Dan masih terdapat desa-desa tertinggal terutama pada kecamatan-kecamatan yang lambat pertumbuhan dan perkembangannya.

d. Masalah Pembebasan Lahan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar sering menghadapi kendala karena sulitnya dalam pembebasan lahan. Kondisi ini disebabkan kepemilikan tanah tidak berada pada satu tangan atau disebut juga dengan tanah ulayat. Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan kerap kali terjadi sengketa akibat pemilik lahan tidak berada pada satu tangan.

3.2 Gambaran Umum Wilayah Studi

Menggambarkan kondisi wilayah studi meliputi letak geografis dan administrasi, topografi dan iklim.

3.2.1 Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Tanah Datar terletak pada $00^{\circ}12''$ sampai dengan $00^{\circ}39''$ LS dan $100^{\circ}19''$ sampai dengan $100^{\circ}51$ BT mempunyai luas 1336 Km^2 . Dan terdiri atas 14 kecamatan dan dialiri oleh 25 sungai serta terletak di kaki tiga buah gunung yaitu Merapi, Singgalang dan Sago. Danau Singkarak juga merupakan sebagian dari wilayah Kabupaten Tanah Datar yang terletak di Kecamatan Rambatan dan Batipuh.

Diantara 14 kecamatan, 3 kecamatan terletak pada ketinggian antara 750-1000 m dpl, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung dan Tanjung Baru. Empat kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450-550 m dpl. Sementara 7 kecamatan lagi berada pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang berada pada ketinggian antara 200-750 m dpl.

Bila dilihat dari luas wilayah kecamatan, maka kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50 Km², sedangkan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara yakni 203,26 Km², kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,99 Km².

Secara administratif Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Agam dan 50 Kota
Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
Sebelah Barat : Kabupaten Padang Pariaman
Sebelah Timur : Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Dari sektor ekonomi, Kabupaten Tanah Datar masih di dominasi oleh sektor pertanian. Dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Tanah Datar tahun 2000-2004, prioritas pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan kemajuan teknologi dengan mengutamakan produk-produk unggulan daerah terutama pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kerajinan rakyat serta pariwisata.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah diseluruh Indonesia, khususnya Sumatera Barat terjadi perubahan pemerintahan ditingkat terendah, yang sebelumnya berada di tingkat desa/kelurahan pada saat ini beralih ke nagari, dan untuk Kabupaten Tanah Datar yang semula terdiri dari 221 desa/kelurahan, sekarang menjadi 75 nagari, yang dalam pelaksanaan pemerintahan dibantu 280 desa.

TABEL III.1
WILAYAH ADMINISTRASI
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2004

NO	Kecamatan	Luas (Km ²)	Prosentase Luas (%)
1	X Koto	152,02	11.45
2	Batipuh	144,27	10.80
3	Batipuh Selatan	82,73	6.19
4	Pariangan	76,43	5.72
5	Rambatan	129,15	9.67
6	Lima Kaum	50,00	3.74
7	Tanjung Emas	112,05	8.39
8	Padang Ganting	83,50	6.26
9	Lintau Buo	60,22	4.51
10	Lintau Buo Utara	204,31	15.21
11	Sungayang	65,45	4.90
12	Sungai Tarab	71,85	5.38
13	Salimpaung	60,88	3.94
14	Tanjung Baru	43,14	3.84
TOTAL		1.336,00	100

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar

3.2.2 Topografi

Kabupaten Tanah Datar berada pada satu cekungan gunung dan perbukitan yang melingkar dengan ketinggian berkisar antara 100-2.891 m dpl. Bentuk bentang alam yang sekarang ini merupakan pencerminan dari proses alam yang bekerja di Kabupaten Tanah Datar, dimana proses pembentukan bentang alam sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis batuan, struktur geologi serta intensitas erosi.

Berdasarkan prosentase (%) sudut lereng, secara umum Kabupaten Tanah Datar dikelompokkan menjadi 4 satuan morfologi yaitu :

- Morfologi dataran dengan kemiringan 0-2 %, dataran yang mempunyai satuan morfologi relatif kecil dengan ketinggian antara 226-274 meter di atas permukaan laut.

- Morfologi dataran bergelombang dengan kemiringan 2-15 %, umumnya terletak pada lembah diantara perbukitan atau pada lereng perbukitan dengan ketinggian antara 365-615 .
- Morfologi perbukitan dengan kemiringan 15-40 % merupakan daerah peralihan antara satuan dataran bergelombang dengan satuan perbukitan terjal dan mempunyai ketinggian antara 612-952 meter diatas permukaan laut.
- Morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan > 40 %, merupakan daerah puncak-puncak perbukitan seperti yang terdapat pada Selatan Gunung Merapi.

Untuk lebih jelasnya proporsi kemiringan lahan dapat dilihat pada Tabel III.2 dan Gambar 3.1.

TABEL III.2
TINGKAT KELERENGAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

NO	Topografi	Tingkat Kelerengan	Luas (Ha)	Prosentase Luas (%)
1	Wilayah Datar	0 - 3 %	6,160	4.61
2	Wilayah Berombak	3 - 8 %	3,567	2.67
3	Wilayah Bergelombang	8 - 15 %	44,023	32.95
4	Wilayah Berbukit	> 15 %	79,850	59.77
	JUMLAH		133,600	100.00

Sumber : Bappeda Kab. Tanah Datar

3.3 Kependudukan

3.3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Seperti diketahui tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang biasa diukur dengan kenaikan pendapatan riil perkapita. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar dan penyebarannya selama tahun 2004 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.3.

TABEL III.3
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2004

NO	Kecamatan	Luas	Jumlah	Kepadatan	Penyebaran
		(Km ²)	Penduduk (Jiwa)	(Jiwa/ Km ²)	(%)
1	X Koto	152,02	39,287	258	11.76
2	Batipuh	144,27	31,353	217	9.39
3	Batipuh Selatan	82,73	11,262	136	3.37
4	Pariangan	76,43	21,005	275	6.29
5	Rambatan	129,15	34,075	264	10.20
6	Lima Kaum	50,00	34,238	685	10.25
7	Tanjung Emas	112,05	20,768	185	6.22
8	Padang Ganting	83,50	13,684	164	4.10
9	Lintau Buo	60,22	15,580	259	4.66
10	Lintau Buo Utara	204,31	32,930	161	9.86
11	Sungayang	65,45	16,686	255	5.00
12	Sungai Tarab	71,85	28,950	403	8.67
13	Salimpaung	60,88	21,044	346	6.30
14	Tanjung Baru	43,14	13,164	305	3.94
TOTAL		1.336,00	334.026	250	100

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar

Penduduk Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2004 berjumlah 334.026 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Dimana penduduk terbesar terkonsentrasi di Kecamatan X Koto yaitu 39.287 jiwa dengan penyebaran penduduk 11,76 %. Kemudian Kecamatan Lima Kaum sebesar 34.238 jiwa dengan penyebaran penduduk sebesar 10,25 %. Dan penduduk terkecil berada di Kecamatan Batipuh Selatan sebesar 11.262 jiwa yang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Batipuh. Penyebaran penduduk yang tidak merata dapat disebabkan oleh terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi di suatu tempat, yang mengakibatkan penduduk semakin banyak datang ketempat tersebut.

3.3.2 Perkembangan dan Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar cenderung negatif (berkurang) dengan tingkat pertumbuhan – 0,82 %. Dari kurun waktu tahun 1995

sampai tahun 2004 terjadi penurunan jumlah penduduk dari 361,526 jiwa menjadi 334,026 jiwa. Pertumbuhan negatif jumlah penduduk terutama disebabkan tingginya migrasi penduduk keluar kabupaten. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar, dari beberapa wilayah administrasinya tingkat pertumbuhan positif hanya dimiliki Kecamatan Lima Kaum dan Batipuh Selatan. Sedangkan kecamatan dengan tingkat pertumbuhan negatif (-) paling besar adalah Kecamatan Lintau Buo Utara yang berarti kecenderungan penduduk berkurang/menurun dengan tingkat penurunan jumlah penduduk sebesar 3,28 %.

**TABEL III.4
PERKEMBANGAN PENDUDUK TAHUN 1995-2004**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)										R
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	X Koto	40,868	41,045	41,185	41,299	41,540	38,678	38,834	38,925	39,141	39,287	-0.41
2	Batipuh	33,530	33,512	33,607	33,681	33,810	30,401	30,725	30,816	31,225	31,353	-0.68
3	Batipuh Selatan	11,177	11,171	11,202	11,227	11,270	10,134	10,188	10,279	11,278	11,262	0.19
4	Pariangan	24,134	22,068	22,011	21,996	22,052	21,027	20,921	21,012	20,949	21,005	-1.49
5	Rambatan	38,889	39,063	38,974	39,014	39,066	33,804	33,671	33,762	33,968	34,075	-1.36
6	Lima Kaum	32,277	33,724	33,696	34,192	34,325	33,602	33,887	33,978	34,151	34,238	0.67
7	Tanjung Emas	21,191	21,509	21,584	21,721	21,855	20,328	20,513	20,604	20,675	20,768	-0.19
8	Padang Ganting	15,346	15,473	15,412	15,452	15,468	13,247	13,238	13,329	13,572	13,684	-1.14
9	Lintau Buo	16,719	16,834	16,778	16,813	16,850	15,329	15,413	15,472	15,519	15,580	-0.74
10	Lintau B. Utara	45,809	46,123	45,972	46,068	46,167	42,002	42,420	42,511	32,814	32,930	-3.28
11	Sungayang	18,896	19,076	19,105	19,157	19,175	16,273	16,340	16,431	16,614	16,686	-1.24
12	Sungai Tarab	33,442	32,739	32,839	32,870	32,962	28,233	28,474	28,565	28,703	28,950	-1.47
13	Salimpaung	24,626	24,781	24,873	24,835	24,965	20,867	20,913	21,004	21,000	21,044	-1.58
14	Tanjung Baru	15,094	15,189	15,245	15,222	15,301	12,790	12,991	13,082	13,065	13,164	-1.35
TOTAL		371,998	372,307	372,483	373,547	374,806	336,715	338,528	329,962	332,674	334,026	-1.131

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar

3.4 Kondisi Potensi Ekonomi

Menggambarkan kondisi dan potensi ekonomi yang meliputi kondisi pertanian, industri kecil dan pariwisata.

3.4.1 Pertanian

Sektor pertanian terdiri dari 4 (empat) sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sektor ini masih merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Tanah Datar pada saat sekarang ini. Hal ini disebabkan karena sekitar 60 % penduduk Kabupaten Tanah Datar bekerja di sektor Pertanian dan didukung pula oleh keadaan demografinya dimana areal pertanian masih cukup luas.

3.4.1.1 Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Produksi yang dihasilkan oleh sub sektor ini adalah tanaman padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, sayuran serta buah-buahan.

3.4.1.2 Perkebunan

Komoditi tanaman perkebunan rakyat yang utama di Kabupaten Tanah Datar adalah kulit manis (*cassia-verra*), kopi (*Arabica* dan *robusta*), karet, pala, cengkeh, tembakau, tebu, merica, tembakau, kelapa, kapuk.

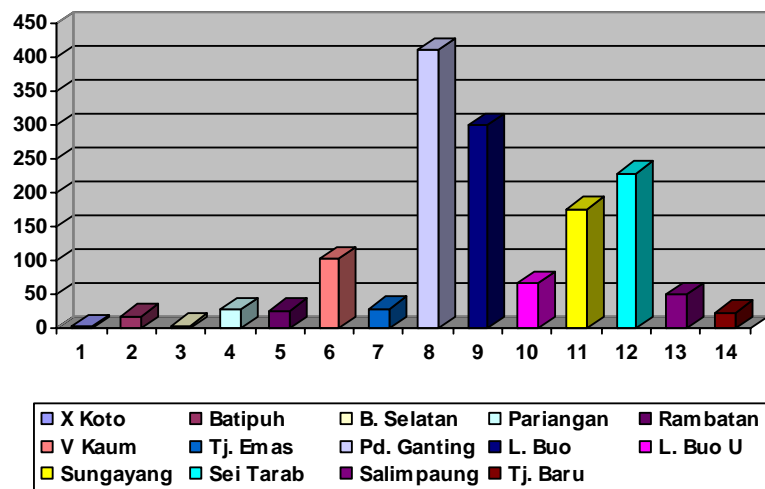
3.4.1.3 Peternakan

Kegiatan peternakan adalah kegiatan pemeliharaan segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan.

3.4.1.4 Perikanan

Kegiatan perikanan adalah segala kegiatan pemeliharaan dan penangkapan segala jenis ikan, semua jenis binatang air dan hasil-hasil lainnya yang dapat

ditangkap dan diambil di air tawar dan asin. Produksi ikan yang dihasilkan selama tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 160,7 ton bila dibandingkan dengan tahun 2003. Kecamatan penghasil ikan terbesar adalah Kecamatan Padang Ganting dan diikuti Kecamatan Lintau Buo. Sedangkan kecamatan penghasil ikan terkecil adalah Kecamatan Batipuh Selatan yaitu hanya 4 ton.



Sumber : BPS Kab. T. Datar Tahun 2004

GAMBAR 3.2
PRODUKSI PERIKANAN PER KECAMATAN
DI KABUPATEN TANAH DATAR

3.4.2 Industri Kecil (UKM)

Suatu daerah yang memiliki industri dalam jumlah besar tentu lebih maju dibanding daerah dengan jumlah industri sedikit. Jumlah industri kecil terbesar berada di Kecamatan X Koto, diikuti oleh Kecamatan Sungai Tarab, Lima Kaum dan Salimpaung. Dan Kecamatan Tanjung Baru paling sedikit jumlahnya hanya 13.

TABEL III.5
JUMLAH INDUSTRI KECIL (UKM)
DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2004

NO	Kecamatan	Unit Usaha
1	X Koto	1581
2	Batipuh	779
3	Batipuh Selatan	20
4	Pariangan	352
5	Rambatan	1044
6	Lima Kaum	1403
7	Tanjung Emas	379
8	Padang Ganting	150
9	Lintau Buo	657
10	Lintau Buo Utara	32
11	Sungayang	541
12	Sungai Tarab	1428
13	Salimpaung	1400
14	Tanjung Baru	13
TOTAL		9779

Sumber : BPS Kab.Tanah Datar

3.4.3 Pariwisata

Sumber daya wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar meliputi wisata alam, budaya dan sejarah. Objek wisata alam mengandalkan pada potensi panorama/pemandangan alam. Jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Tanah Datar diidentifikasi sebanyak 21 objek dengan 5 objek yang telah dikelola. Wisata budaya dan peninggalan sejarah merupakan potensi objek wisata utama di Kabupaten Tanah Datar. Terdapat 57 objek wisata, dan yang telah ditata dan dikelola hanya 12 objek serta sisanya masih bersifat alami. Dua lokasi objek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Istana Pagaruyung dan Lembah Anai. Sedangkan objek wisata yang paling rendah tingkat kunjungannya adalah Puncak Pato. Secara umum dapat dikatakan objek wisata alam maupun budaya dan peninggalan sejarah di Kabupaten Tanah Datar belum dikelola dengan baik

masih bersifat alami dan belum berwujud suatu kawasan wisata lengkap dengan sarana pendukung. Padahal sektor pariwisata ini jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan khususnya dan Kabupaten Tanah Datar pada umumnya. Sebaran objek wisata dapat dilihat pada Gambar 3.3.

TABEL III.6
JUMLAH KUNJUNGAN OBJEK WISATA YANG
TELAH DIKELOLA TAHUN 2004

No	Objek Wisata Yang Telah Dikelola	Wisatawan		
		Domestik	Asing	Jumlah
1	Istano Pagaruyung	107,863	9,832	117,695
2	Panorama Tabek Patah	11,520	1,133	12,653
3	Rumah Adat Ds. Belimbing	11,480	4,325	15,805
4	Batu Angkek-Angkek	20,551	1,127	21,678
5	Rumah Adat Balerong Bunta	9,973	3,638	13,611
6	Ngalau Pangian	19,731	2,533	22,264
7	Nagari Tuo Pariangan	10,365	1,428	11,793
8	Tanjung Mutiara	14,478	2,225	16,703
9	Balairung Sari	11,039	1,224	12,263
10	Puncak Pato	9,505	1,150	10,655
11	Lembah Anai	47,606	2,507	50,113
12	Batu Basurek Lima Kaum	14,064	4,837	18,901
13	Batu Basurek Pagaruyung	10,365	1,428	11,793
	Jumlah	298,540	37,387	335,927

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Tanah Datar hanya bersifat sementara (tidak menetap). Jika dilihat dari kecenderungan rute wisata yang dilakukan, Kabupaten Tanah Datar masih merupakan daerah tujuan wisata sementara (transit). Kota Padang dan Bukittinggi merupakan pintu masuk wisata ke Kabupaten Tanah Datar. Kota Bukittinggi merupakan pintu masuk wisata ke Kabupaten Tanah Datar. Kota Bukittinggi sendiri yang merupakan satu wilayah pusat pengembangan Kawasan Andalan Bukittinggi-Agam merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama di Sumatera Barat.

3.5 Infrastruktur

3.5.1 Transportasi

Moda transportasi umum untuk angkutan orang dan barang di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari angkutan kota dan angkutan desa/ojek. Pelayanan ojek mempunyai proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan perdesaan. Moda transportasi umum ini sangat penting untuk mengangkut orang dan barang berupa produktivitas pertanian ke Kota Batusangkar dan ke kecamatan lainnya. Jumlah moda transportasi umum ini tersebar secara tidak merata pada tiap-tiap kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.7
JUMLAH ANGKUTAN

NO	Kecamatan	Jumlah Angkutan (unit)
1	X Koto	23
2	Batipuh	5
3	Batipuh Selatan	3
4	Pariangan	17
5	Rambatan	26
6	Lima Kaum	20
7	Tanjung Emas	27
8	Padang Ganting	12
9	Lintau Buo	12
10	Lintau Buo Utara	10
11	Sungayang	12
12	Sungai Tarab	15
13	Salimpaung	21
14	Tanjung Baru	10
TOTAL		213

Sumber : RTRW Kab. Tanah Datar

3.5.2 Listrik

Di Kabupaten Tanah Datar masih ada desa yang belum dialiri listrik yaitu satu desa di Kecamatan Tanjung Emas, satu desa di Kecamatan Batipuh dan

empat desa di Kecamatan Lintau Buo Utara. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa masih banyak KK yang rumahnya belum dialiri listrik. Hal ini dapat disebabkan belum tersedianya jaringan listrik dan dapat juga disebabkan ketidakmampuan warga untuk berlangganan listrik. Dari total jumlah KK yang ada di Kabupaten Tanah Datar baru sekitar 65 % yang rumahnya telah dialiri listrik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.8.

TABEL III.8
JUMLAH PELANGGAN LISTRIK TAHUN 2004

NO	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah KK Pelanggan Listrik	%
1	X Koto	8,899	6986	78.5
2	Batipuh	7,320	4680	63.9
3	Batipuh Selatan	2,630	1787	67.9
4	Pariangan	5,782	3964	68.6
5	Rambatan	8,542	4238	49.6
6	Lima Kaum	8,215	8215	100.0
7	Tanjung Emas	5,576	2181	39.1
8	Padang Ganting	3,572	2272	63.6
9	Lintau Buo	3,861	3265	84.6
10	Lintau Buo Utara	9,725	4133	42.5
11	Sungayang	4,564	3350	73.4
12	Sungai Tarab	7,905	5363	67.8
13	Salimpaung	6,049	4287	70.9
14	Tanjung Baru	3,507	1222	34.8
TOTAL		86,147	55943	64.9

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar

3.5.3 Telekomunikasi

Pelayanan telepon di Kabupaten Tanah Datar masih terpusat pada ibu kota kecamatan, dan hanya satu kecamatan yang belum terlayani jaringan telepon yaitu Kecamatan Tanjung Baru. Sementara itu jaringan telepon seluler masih terbatas pada ibu kota kabupaten yaitu Kota Batusangkar dan beberapa ibukota kecamatan yaitu Kecamatan Salimpaung dan Pariangan. Selengkapnya jumlah pelanggan

telepon dapat dilihat pada Tabel III.9 dan daerah pelayanannya dapat dilihat pada Gambar 3.4.

TABEL III.9
JUMLAH PELANGGAN TELEPON TAHUN 2004

NO	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Pelanggan (KK)
1	X Koto	8,899	360
2	Batipuh	7,320	190
3	Batipuh Selatan	2,630	34
4	Pariangan	5,782	820
5	Rambatan	8,542	90
6	Lima Kaum	8,215	3274
7	Tanjung Emas	5,576	166
8	Padang Ganting	3,572	92
9	Lintau Buo	3,861	360
10	Lintau Buo Utara	9,725	410
11	Sungayang	4,564	213
12	Sungai Tarab	7,905	296
13	Salimpaung	6,049	110
14	Tanjung Baru	3,507	-
TOTAL		86,147	6,415

Sumber : Laporan Ekonomi Bappeda Kab. T. Datar

3.5.4 Air Bersih

Sumber air bersih bagi kebutuhan penduduk di Kabupaten Tanah Datar didapatkan dari tiga sumber utama yaitu air permukaan (sungai), air tanah dangkal (sumur gali dan sumur bor) serta dari PDAM Kabupaten. Jumlah instalasi unit PDAM Kabupaten Tanah Datar cukup banyak yaitu 11 unit instalasi dan terdapat hampir diseluruh kecamatan meskipun yang terbesar ada di Kota Batusangkar. Tapi daerah yang dilayani baru sebatas ibu kota kecamatan belum menjangkau nagari-nagari lainnya. Selengkapny sumber air bersih di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel III.10.

TABEL III.10
SUMBER AIR BERSIH DI KABUPATEN TANAH DATAR

No	Sumber Air Baku	Lokasi	Kapasitas Sumber (ltr/dt)	Kapasitas Terpasang (ltr/dt)
1	- Kiambang	Kota Batusangkar	424.00	30.00
	- Sitakuak		272.00	20.00
	- Saruni		304.00	20.00
2	- Minang	Kec. Sungayang	16.00	5.00
	- Baburai		65.00	5.00
3	- Saruni	Kec. Padang Ganting	-	-
4	- Pincuran Gadang	Kec. Rambatan	8.60	2.50
	- Kubang Cacang		17.00	10.00
	- Tumanggung		8.60	5.00
5	- Air Tabik I	Kec. Lintau Buo	30.24	10.00
	- Air Tabik II		36.16	10.00
	- Bar-bar		16.46	10.00
6	- Surau Gadang	Kec. Lima Kaum	15.65	5.00
	- Tabek Tinggi		6.60	5.00
7	- Pincuran Bungo	Kec. X Koto	8.20	5.00
8	- Sungai Jambu	Kec. Sungai Tarab	6.60	2.50
9	- Gunuang Kaciak	Kec. Salimpaung	18.70	10.00
	TOTAL		1,253.81	155.00

Sumber : RTRW Kab. Tanah Datar

3.6 Fasilitas Pelayanan Umum

3.6.1 Fasilitas Pendidikan

Sebaran sarana pendidikan pada TK memperlihatkan angka yang cukup berbeda antar kecamatan. Kecamatan Batipuh Selatan jumlah TK yang ada hanya 4. Sedangkan Perguruan Tinggi hanya ada di Kecamatan Lima Kaum. Jumlah total sarana pendidikan yang tertinggi berada di Kecamatan X Koto. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.11.

TABEL III.11
JUMLAH DAN SEBARAN SARANA PENDIDIKAN TAHUN 2004

No.	Kecamatan	Sarana Pendidikan					Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	PT	
1.	X Koto	15	34	10	5	-	64
2	Batipuh	13	28	9	4	-	54
3.	B. Selatan	4	12	9	5	-	30
4.	Pariangan	15	22	7	3	1	48
5.	Rambatan	13	31	9	3	-	56

Lanjutan

No.	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	PT	Jumlah
6.	Lima Kaum	13	26	8	9	6	62
7.	Tjg. Emas	8	19	4	-	-	31
8.	Pd. Ganting	10	13	3	2	-	28
9.	Lintau Buo	8	13	5	2	-	28
10.	L.B.Utara	21	34	5	3	-	63
11.	Sungayang	9	14	4	2	-	29
12.	Sei. Tarab	15	27	5	2	-	49
13.	Salimpaung	12	20	5	3	-	40
14.	Tjg. Baru	8	15	3	2	-	28
TOTAL		164	309	85	45	2	610

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar

3.6.2 Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan di Kabupaten Tanah Datar tersebar hampir secara merata, hanya Kecamatan Tanjung Baru yang memperlihatkan jumlah yang paling sedikit.. Perkembangan sarana kesehatan dalam kurun waktu 1990-2004 untuk rumah sakit tidak memperlihatkan perkembangan yang berarti, hingga kini satu-satunya rumah sakit berada di Kota Batusangkar. Sedangkan puskesmas pembantu dari tahun 1990 ketahun 2004 bertambah sebesar 27 %. Dari sebaran fasilitas kesehatan dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 kesenjangan semakin berkurang, ini terlihat dengan telah terlayani semua kecamatan akan fasilitas kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.12
PERKEMBANGAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1990-2004

NO	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan														
		1990			1995			1998			2000			2004		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	X Koto	3	1	-	4	2	-	6	2	-	4	2	-	6	3	-
2	Batipuh	2	1	-	2	2	-	4	2	-	4	2	-	7	2	-
3	Batipuh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-
4	Pariangan	1	1	-	2	1	-	4	1	-	5	1	-	5	1	-
5	Rambatan	2	1	-	5	1	-	6	2	-	8	2	-	8	2	-
6	Lima Kaum	2	1	1	3	2	1	5	2	1	6	2	1	6	2	1
7	Tanjung Emas	-	-	-	1	1	-	3	1	-	4	2	-	4	2	-
8	Padang Ganting	1	1	-	2	1	-	3	1	-	3	1	-	3	1	-
9	Lintau Buo	2	1	-	2	1	-	3	2	-	5	2	-	6	2	-
10	Lintau Buo Utara	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	1	-	2	1	-

Lanjutan

No.	Kecamatan	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11	Sungayang	1	-	-	2	1	-	2	1	-	4	1	-	4	1	-
12	Sungai Tarab	2	1	-	3	2	-	3	2	-	5	2	-	5	2	-
13	Salimpaung	1	-	-	1	1	-	1	2	-	2	2	-	4	1	-
14	Tanjung Baru	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-
TOTAL		17	8	1	28	15	1	43	20	1	54	21	1	64	22	1

Sumber : BPS Kab.Tanah Datar

Keterangan : 1 = Pustu, 2 = Puskesmas, 3 = RS

3.6.3 Fasilitas Ekonomi

Fasilitas perdagangan dan jasa berupa pasar, toko dan kios. Fasilitas perdagangan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dominan berupa sembako. Jumlah fasilitas perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 1 (satu) pasar umum yang terletak di pusat Kota Batusangkar. Selain pasar umum, juga ada pasar-pasar pembantu/lokal yang terdapat di setiap kecamatan dengan jumlah 33 buah menyebar disetiap kecamatan, toko sebanyak 224 dan kios sebanyak 441. Sedangkan perkembangan jumlah fasilitas ekonomi dalam kurun waktu 1990-2004 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.13
PERKEMBANGAN JUMLAH PASAR TAHUN 1990-2004

NO	Kecamatan	Jumlah Pasar				
		1990	1995	1998	2000	2004
1	X Koto	2	2	3	3	3
2	Batipuh	2	3	3	4	5
3	Batipuh Selatan	-	1	1	1	1
4	Pariangan	1	1	1	1	1
5	Rambatan	1	2	3	3	3
6	Lima Kaum	1	1	1	1	1
7	Tanjung Emas	1	2	2	3	3
8	Padang Ganting	1	1	1	2	4
9	Lintau Buo	1	2	2	2	2
10	Lintau Buo Utara	1	2	2	2	2
11	Sungayang	-	1	1	1	2
12	Sungai Tarab	1	2	2	2	2
13	Salimpaung	1	2	3	3	3
14	Tanjung Baru	-	1	2	2	2
TOTAL		13	23	27	30	34

Sumber : BPS Kab.Tanah Datar

BAB IV

ANALISIS DISPARITAS ANTAR SUB-WILAYAH

4.1 Analisis Kondisi Empiris dan Potensi Wilayah Studi

Analisis ini bertujuan untuk menemukenali karakteristik dan potensi serta melihat sejauhmana terjadi disparitas antar sub wilayah di wilayah studi, meliputi analisis kependudukan, struktur perekonomian dan kesenjangan, dan analisis potensi sumberdaya alam.

4.1.1 Analisis Kependudukan

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik wilayah studi dari aspek kependudukan, meliputi analisis sebaran kependudukan dan tingkat pertumbuhan penduduk.

4.1.1.1 Analisis Sebaran Penduduk

Analisis ini didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk yang diperoleh dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam studi ini adalah luas kecamatan. Sebaran penduduk di Kabupaten Tanah Datar sampai akhir tahun 2004 mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda pada tiap-tiap kecamatan. Berdasarkan klasifikasi yang dibagi dalam tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah yang nilai rangenya diperoleh dengan mengurangkan jumlah penduduk tertinggi dengan penduduk terendah dibagi jumlah kelas. Berdasarkan data sekunder kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Lima Kaum (685 jiwa/km^2) dan kepadatan terendah adalah Kecamatan Batipuh Selatan (136 jiwa/km^2).

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Range} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{685 - 136}{3} \\ &= 183 \end{aligned}$$

Dari tiga kelas klasifikasi dan nilai range sebesar 183 dan dipadukan dengan tingkat kepadatan penduduk maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut dan Gambar 4.1.

TABEL IV.1
KLASIFIKASI TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK

Tingkat Kepadatan Per Kecamatan (Jiwa /Km ²)	Klasifikasi	Kecamatan	Keterangan
> 502	Tinggi	1. Lima Kaum	Ibu kota kabupaten
319-502	Sedang	1. Sungai Tarab	Dekat dengan ibukota kabupaten, 10 desanya bagian dari ibukota kabupaten
		2. Salimpaung	Berbatasan dengan Kabupaten Agam
< 319	Rendah	1. X Koto	Berbatasan dengan Kabupaten Agam
		2. Batipuh	Berbatasan dengan Kota Padang Panjang
		3. Batipuh Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Batipuh
		4. Pariangan	Berbatasan dengan Kabupaten Agam
		5. Rambatan	Berbatasan dengan ibukota kabupaten 2 desa bagian dari ibukota kabupaten
		6. Tanjung Emas	Dekat dengan ibukota kabupaten, 7 desa bagian dari ibukota kabupaten (pusat pemerintahan kabupaten)
		7. Padang Ganting	Berbatasan dengan Kabupaten Solok
		8. Lintau Buo	Berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
		9. Lintau Buo Utara	Berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota

Lanjutan

Tingkat Kepadatan	Klasifikasi	Kecamatan	Keterangan
		10. Sungayang	Dekat dengan ibukota kabupaten, 3 desa bagian dari ibukota kabupaten
		11. Tanjung Baru	Berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota

Sumber : Hasil Analisis

Menurut Kajian Ekonomi yang dilakukan oleh LPEM-FE Universitas Indonesia, kepadatan penduduk dalam satu wilayah dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kriteria kepadatan, yaitu:

- Kepadatan tinggi (>10.000 jiwa/km²)
- Kepadatan sedang ($5.000 - 10.000$ jiwa/km²)
- Kepadatan rendah (<5.000 jiwa/km²)

Berdasarkan kriteria diatas, tingkat kepadatan penduduk pada seluruh kecamatan tergolong rendah. Kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu daerah mengindikasikan adanya daya tarik pada daerah tersebut seperti konsentrasi aktivitas, kelengkapan sarana prasarana maupun lahan yang subur. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kecamatan memiliki kepadatan rendah. Kepadatan yang tinggi hanya pada Kecamatan Lima Kaum, ini terkait erat dengan fungsinya sebagai bagian dari ibukota kabupaten yaitu Kota Batusangkar yang merupakan pusat koleksi, distribusi, jasa dan pelayanan sosial. Sedangkan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Batipuh Selatan hanya sebesar 136 jiwa/km², disebabkan kurangnya ketersediaan lapangan usaha, sarana prasarana yaitu diantaranya belum terdapat fasilitas SLTP sehingga penduduk harus pergi kedaerah lain dan lahan yang kurang subur.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup tinggi dari segi sebaran penduduk terutama pada Kecamatan Lima Kaum, Sungai Tarab dan Salimpaung dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Namun jika dilihat dari kepadatan rata-rata seluruh kecamatan yaitu sebesar 250 jiwa/km² perbedaan tersebut tidak terlalu tinggi. Kaitannya dengan disparitas antar sub wilayah, terdapat kesenjangan dari segi sebaran penduduk yang lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Lima Kaum, Sungai Tarab dan Salimpaung. Dan ada empat (4) kecamatan yang memiliki kepadatan dibawah rata-rata kepadatan seluruh kecamatan (<250 jiwa/km²) yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas dan Padang Ganting.

4.1.1.2 Analisis Laju dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Jika diperhatikan jumlah penduduk dari tahun 1999-2000 mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan pada tahun 2000, yaitu mengalami penurunan hampir sebesar 37.138 jiwa dari tahun 1999. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar berkembang dengan rendah, bahkan cenderung negatif. Kurun waktu 1995-2004 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar – 0,82 %. Hal ini tentu saja tidak benar karena sebenarnya pertumbuhan penduduk terus bertambah meskipun pada tahun 2000 terjadi kontraksi penurunan jumlah penduduk yang sangat signifikan. Pada dasarnya pertumbuhan penduduk alami tentu jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk ini adalah akibat banyaknya penduduk yang melakukan migrasi ke daerah lain. Indikator migrasi ini umumnya terkait dengan ekonomi

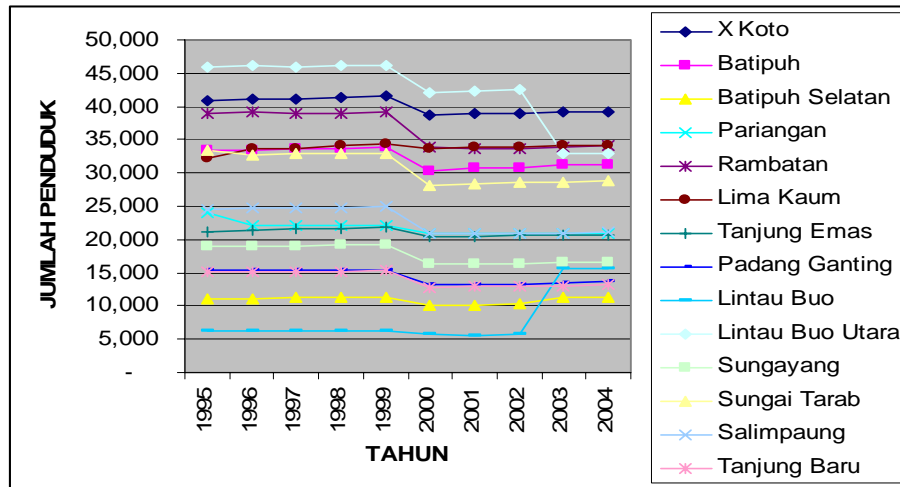
yaitu dalam mencari penghidupan dan pendapatan yang dianggap lebih menarik dibanding daerah asal.

Laju pertumbuhan penduduk positif hanya terdapat pada Kecamatan Lima Kaum yaitu sebesar 0,67 %, hal ini di karenakan Kecamatan Lima Kaum merupakan bagian dari Kota Batusangkar yaitu ibu kota Kabupaten Tanah Datar yang merupakan pusat kota/pelayanan seluruh kabupaten dan Kecamatan Batipuh Selatan sebesar 0,19 %. Tingkat pertumbuhan terendah berada pada Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu -3,28 %. Rendahnya jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk dapat merugikan pembangunan karena bagaimanapun perkembangan suatu wilayah didasarkan pada kecukupan jumlah penduduk dalam mengeksplorasi sumberdaya yang tersedia.

TABEL IV.2
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 1995-2004

NO	Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)										R rata-rata
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	X Koto	-	0.43	0.34	0.28	0.58	-6.89	0.40	0.23	0.55	0.37	-0.41
2	Batipuh	-	-0.05	0.28	0.22	0.38	-10.08	1.07	0.30	1.33	0.41	-0.68
3	Batipuh Selatan	-	-0.05	0.28	0.22	0.38	-10.08	0.53	0.89	9.72	-0.14	0.19
4	Pariangan	-	-8.56	-0.26	-0.07	0.25	-4.65	-0.50	0.44	-0.30	0.27	-1.49
5	Rambatan	-	0.45	-0.23	0.10	0.13	-13.47	-0.39	0.27	0.61	0.32	-1.36
6	Lima Kaum	-	4.48	-0.08	1.47	0.39	-2.11	0.85	0.27	0.51	0.25	0.67
7	Tanjung Emas	-	1.50	0.35	0.63	0.62	-6.99	0.91	0.44	0.34	0.45	-0.19
8	Padang Ganting	-	0.83	-0.39	0.26	0.10	-14.36	-0.07	0.69	1.82	0.83	-1.14
9	Lintau Buo	-	0.69	-0.33	0.21	0.22	-9.02	0.55	0.38	0.30	0.39	-0.74
10	Lintau Buo Utara	-	0.69	-0.33	0.21	0.21	-9.02	1.00	0.21	-22.81	0.35	-3.28
11	Sungayang	-	0.95	0.15	0.27	0.09	-15.13	0.41	0.56	1.11	0.43	-1.24
12	Sungai Tarab	-	-2.10	0.31	0.09	0.28	-14.35	0.85	0.32	0.48	0.86	-1.47
13	Salimpaung	-	0.63	0.37	-0.15	0.52	-16.41	0.22	0.44	-0.02	0.21	-1.58
14	Tanjung Baru	-	0.63	0.37	-0.15	0.52	-16.41	1.57	0.70	-0.13	0.76	-1.35
TOTAL		-	0.07	0.06	0.29	0.34	-10.20	0.48	0.39	0.82	0.41	-1.13

Sumber : Hasil Analisis



Sumber : Hasil Analisis

GAMBAR 4.2
PERKEMBANGAN PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 1995-2004

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan pada hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yang paling mempengaruhi yaitu terjadi migrasi keluar yang disebabkan berbagai faktor diantaranya pendidikan dan mencari pekerjaan ke daerah lain. Kaitannya dengan disparitas antar sub wilayah menunjukkan tidak terjadi kesenjangan dari segi laju dan tingkat pertumbuhan penduduk.

4.1.2 Analisis Struktur Perekonomian, Kemiskinan dan Kesenjangan

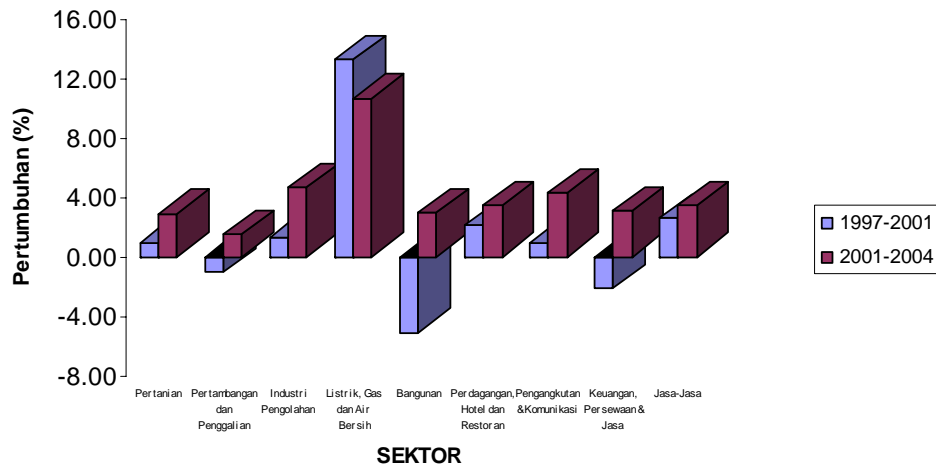
Sebagai Kabupaten Agraris secara umum struktur perekonomian pada tiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar atau memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar. Periode 1997-2004 sektor ini memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 30 % bagi PDRB Kabupaten Tanah Datar. Kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV.3
PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN TANAH DATAR
BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 1993 TAHUN 1997-2004

No	Sektor	PDRB (Jutaan Rupiah)								Kontribusi Rerata (%)
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	Pertanian	162,242.13	156,237.90	157,249.80	163,107.84	168,202.11	172,008.11	179,327.27	188,199.38	30.96
2	Pertambangan dan Penggalian	20,067.08	18,509.87	18,741.24	18,962.78	19,193.65	19,437.41	19,717.31	20,457.82	3.57
3	Industri Pengolahan	74,488.33	72,120.75	73,786.74	76,155.29	78,394.26	83,595.77	89,347.16	95,426.82	14.76
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,827.38	5,970.86	5,970.86	6,802.75	7,853.39	8,918.46	10,161.12	11,224.62	1.40
5	Bangunan	51,493.52	38,769.97	39,065.05	39,233.03	40,441.41	41,897.30	43,560.62	45,369.54	7.83
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	64,235.12	63,147.97	64,951.90	67,062.74	69,770.28	72,621.82	75,912.46	79,487.61	12.80
7	Pengangkutan & Komunikasi	30,036.01	28,735.77	28,895.53	29,944.34	31,125.16	32,814.31	34,574.42	36,966.63	5.81
8	Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	26,129.36	23,692.29	22,646.56	23,381.11	23,876.43	24,709.62	25,738.05	27,228.95	4.54
9	Jasa-Jasa	89,866.36	90,941.98	93,016.19	96,097.12	99,481.34	104,237.08	109,267.00	113,648.06	18.29
	Total	525,382.29	498,127.36	504,323.87	520,711.00	538,338.03	560,239.88	587,605.41	618,009.43	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar, diolah

Pada periode 1997-2004 rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Datar untuk semua sektor mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 1998 terjadi penurunan pada sektor pertanian, pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan keuangan yang disebabkan krisis moneter. Meskipun sektor pertanian juga terkena imbas krisis moneter namun pada tahun-tahun berikutnya sektor pertanian tetap menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar, maka dari itu pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah sepatutnya berupaya mengembangkan dan memajukan sektor pertanian dengan cara menyediakan infrastruktur yang handal yaitu terutama sarana dan prasarana transportasi serta penyediaan irigasi agar lebih mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dan sektor yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 13 %. Selengkapnya laju pertumbuhan tiap sektor periode 1997-2004 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Hasil Analisis

GAMBAR 4.3
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 1997-2004

4.1.2.1 Pertumbuhan Perekonomian

Pada periode 1990-2004 pertumbuhan perekonomian tiap-tiap kecamatan menunjukkan angka yang fluktuatif. Pendapatan kecamatan ini dilihat hanya dari sektor pertanian, dikarenakan tidak adanya data PDRB perkecamatan. Data sektor pertanian ini dianggap cukup mewakili dalam penelitian ini karena sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar dan merupakan sektor yang dominan pada seluruh kecamatan. Pada periode 1995-1998 rata-rata pendapatan tiap-tiap kecamatan mengalami penurunan yang disebabkan krisis moneter. Kecamatan X Koto adalah kecamatan yang memiliki tingkat pendapatan terbesar dari sektor pertanian, karena potensi tersebut maka pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan mengembangkannya sebagai kawasan agropolitan. Perkembangan pendapatan dan tingkat pertumbuhan pendapatan tiap kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV.4
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKECAMATAN BERDASARKAN
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 1990-2004

No	Kecamatan	Pendapatan (Jutaan Rupiah)					Jumlah
		1990	1995	1998	2000	2004	
1	X Koto	17,542.23	20,619.78	19,427.33	20,502.71	29,815.75	107,907.79
2	Batipuh	12,564.04	13,502.67	13,461.92	14,436.50	16,608.35	70,573.47
3	Batipuh Selatan	2,993.72	5,507.74	3,479.40	3,762.70	4,386.97	20,130.52
4	Pariangan	10,338.13	11,082.81	10,845.95	11,673.55	14,734.76	58,675.20
5	Rambatan	7,502.62	7,069.55	10,153.58	12,964.49	12,062.18	49,752.43
6	V Kaum	7,172.37	7,500.06	10,950.41	11,874.57	9,311.82	46,809.22
7	Tj. Emas	6,872.93	8,039.93	11,190.71	12,044.69	10,023.82	48,172.09
8	P. Ganting	4,308.24	5,443.82	5,233.39	5,699.44	7,843.22	28,528.12
9	Lintau Buo	8,136.38	11,391.52	10,587.92	11,675.56	12,024.03	53,815.40
10	Lintau Buo Utara	7,387.63	9,910.77	9,772.91	10,550.00	11,267.02	48,888.33
11	Sungayang	6,993.65	8,963.95	7,475.57	8,030.44	12,945.64	44,409.25
12	Sungai Tarab	12,662.95	14,646.71	16,803.51	19,019.17	20,108.13	83,240.46
13	Salimpaung	13,110.38	15,279.45	14,187.19	14,932.47	15,272.34	72,781.82
14	Tj. Baru	4,856.10	5,913.31	6,697.21	5,053.98	6,443.26	28,963.86
TOTAL		122,441.38	144,872.06	150,266.99	162,220.26	182,847.28	762,647.97

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar, diolah

TABEL IV.5
LAJU PERTUMBUHAN PENDAPATAN PERKECAMATAN
TAHUN 1990-2004

NO	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)				Rata-rata (%)
		1990-1995	1995-1998	1998-2000	2000-2004	
1	X Koto	3.28	1.96	2.73	9.81	4.45
2	Batipuh	1.45	-1.01	3.55	3.56	1.89
3	Batipuh Selatan	12.96	-14.19	3.99	3.91	1.67
4	Pariangan	1.40	-7.18	3.74	5.99	0.99
5	Rambatan	-1.18	12.8	12.99	-1.79	5.71
6	V Kaum	8.97	13.44	4.13	-5.89	5.16
7	Tj. Emas	3.18	11.65	3.74	-4.49	3.52
8	P. Ganting	4.79	-1.31	4.35	8.31	4.04
9	Lintau Buo	6.96	-2.41	5.01	7.37	4.23
10	Lintau Buo Utara	6.05	-4.69	3.89	1.65	1.73
11	Sungayang	5.08	-5.87	3.64	12.68	3.88
12	Sungai Tarab	2.95	4.68	6.39	1.40	3.86
13	Salimpaung	3.11	-2.44	2.59	5.64	2.23
14	Tj. Baru	4.02	4.23	-13.13	6.26	0.35
TOTAL		3.42	1.23	3.9	3.04	2.90

Sumber : Hasil Analisis

4.1.2.2 Basis Perekonomian

Dalam menentukan tingkat spesialisasi sektor-sektor di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau sektor leading pada suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis LQ (*Location quotient*). Analisis LQ banyak digunakan sebagai alat yang sederhana untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah pada sektor-sektor tertentu. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{\text{JumlahTenagaKerja}_{\text{Sektor A}} \text{Kec}}{\text{JumlahTenagaKerja}_{\text{Total}} \text{Kec}}}{\frac{\text{JumlahTenagaKerja}_{\text{Sektor A}} \text{Kab}}{\text{TenagaKerja}_{\text{Total}} \text{Kab}}}$$

Dari data jumlah tenaga kerja pada Tabel IV.6 tahun 1990-2004 diperoleh nilai LQ seperti yang termuat pada Tabel IV.7. Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu dilihat dari jumlah tenaga kerja lebih menonjol dan memiliki potensi ekspor karena dipandang mampu mengembangkan hasil produksinya. $LQ < 1$ artinya kecenderungan pada sektor tersebut pada suatu daerah memerlukan impor dari daerah lain. Dan apabila $LQ = 1$ menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan dan besarnya produk yang dihasilkan dalam sektor terkait.

Dari hasil analisis LQ terlihat bahwa pada tahun 1990 pertanian merupakan sektor basis dari kesembilan kecamatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ-nya lebih besar dari 1. Pada tahun 2004 terjadi pergeseran pada Kecamatan X Koto dimana pada tahun 1990 yang menjadi sektor basis adalah pertanian dan industri namun pada tahun 2004 yang menjadi sektor basis hanya

industri. Hal ini menarik karena kecamatan ini merupakan penyumbang sayur-sayuran terbesar dan merupakan sentra sayuran di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan X Koto memang penghasil tenunan songket dengan kualitas ekspor yang pemasarannya sudah menjangkau negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Sementara itu pada Kecamatan Salimpaung terjadi perubahan yaitu pada tahun 1990 yang menjadi basis adalah sektor pertanian dan pada tahun 1995 dan 1998 yang menjadi basis adalah sektor pertanian dan industri, namun pada tahun 2000 dan 2004 kembali pertanian yang menjadi basis. Kecamatan Salimpaung termasuk penyumbang terbesar dari sektor pertanian bagi PDRB Kabupaten Tanah Datar.

Dengan demikian sektor-sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ merupakan sektor basis yang peranannya lebih menonjol dan berpeluang untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Menurut teori basis Richardson (Tarigan 2004:55), kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain. Sedangkan pekerjaan non basis (*service*) adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah itu sendiri. Oleh karena itu pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah atau dengan kata lain pertumbuhannya tergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan.

TABEL IV.6
TENAGA KERJA PER SEKTOR TAHUN 1990-2004

NO	Kecamatan	1990			Jumlah	1995			Jumlah	1998			Jumlah	2000			Jumlah	2004			Jumlah
		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3	
1	X Koto	7,832	2,876	565	11,273	8,085	2,576	671	11,332	7,922	2,325	711	10,958	7,051	3,565	832	11,448	7,192	5,809	1,180	14,181
2	Batipuh	19,517	786	4,256	24,559	22,421	851	4,011	27,283	21,611	927	4,716	27,254	21,364	1,132	4,865	27,361	21,773	1,528	5,972	29,273
3	Batipuh Selatan	3,174	276	372	3,822	3,256	342	395	3,993	2,968	357	411	3,736	2,715	396	421	3,532	2,565	405	476	3,446
4	Pariangan	3,161	698	1,154	5,013	2,742	719	1,226	4,687	2,515	715	1,210	4,440	2,567	765	1,239	4,571	2,289	842	1,446	4,577
5	Rambatan	11,115	1,796	515	13,426	12,365	1,821	576	14,762	11,206	1,898	491	13,595	10,413	1,898	422	12,733	8,801	1,913	326	11,040
6	V Kaum	7,256	1,723	2,765	11,744	6,101	1,958	3,615	11,674	5,879	2,127	4,113	12,119	4,206	2,346	4,291	10,843	4,188	2,501	4,325	11,014
7	Tj. Emas	3,156	1,165	17,521	21,842	2,718	1,215	18,643	22,576	2,598	1,312	19,775	23,685	2,654	1,398	19,876	23,928	1,871	1,493	21,717	25,081
8	P. Ganting	6,892	1,065	723	8,680	5,434	1,420	765	7,619	4,876	1,367	838	7,081	5,018	1,325	857	7,200	5,217	1,338	873	7,428
9	Lintau Buo Lintau Buo Utara	3,645	1,876	2,546	8,067	2,817	2,213	2,570	7,600	2,957	2,546	2,341	7,844	3,112	2,598	2,278	7,988	3,752	2,444	2,250	8,446
10	Sungayang	7,765	153	1,250	9,168	5,832	276	1,876	7,984	6,784	382	2,061	9,227	6,823	487	2,244	9,554	7,816	529	2,454	10,799
11	Sungai Tarab	4,231	1,197	1,916	7,344	3,896	1,235	2,011	7,142	3,779	1,298	2,321	7,398	3,715	1,325	2,395	7,435	3,855	1,396	2,423	7,674
12	Salimpaung	15,786	1,654	1,432	18,872	15,112	1,811	1,675	18,598	14,981	1,987	1,816	18,784	14,011	2,056	1,988	18,055	13,816	2,254	2,031	18,101
13	Tj. Baru	17,231	1,915	1,325	20,471	16,754	2,325	1,547	20,626	16,096	2,654	1,959	20,709	16,323	2,731	2,011	21,065	16,761	2,874	2,158	21,793
14	Tj. Baru	6,156	431	571	7,158	6,341	578	678	7,597	6,234	681	832	7,747	6,012	695	854	7,561	5,895	799	896	7,590
TOTAL		116,917	17,611	36911	171,439	113,874	19,340	40259	173,473	110,406	20,576	43,595	174,577	105,984	22,717	44,573	173,274	105,791	26,125	48,527	180,443

Sumber : Monografi Kecamatan, BPS dan Profil Kab. Tanah Datar

Ket : 1= Sektor pertanian
2 = Sektor industri
3 = Sektor Jasa

TABEL IV.7
LQ TENAGA KERJA PER SEKTOR TAHUN 1990-2004

NO	Kecamatan	LQ 1990			LQ 1995			LQ 1998			LQ 2000			LQ 2004		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	X Koto	1.02	2.48	0.23	1.09	2.04	0.26	1.14	1.80	0.26	1.01	2.38	0.28	0.87	2.83	0.31
2	Batipuh	1.17	0.31	0.80	1.25	0.28	0.63	1.25	0.29	0.69	1.28	0.32	0.69	1.27	0.36	0.76
3	Batipuh Selatan	1.22	0.70	0.45	1.24	0.77	0.43	1.26	0.81	0.44	1.26	0.86	0.46	1.27	0.81	0.51
4	Pariangan	0.92	1.36	1.07	0.89	1.38	1.13	0.90	1.15	1.09	0.92	1.28	1.05	0.85	1.27	1.17
5	Rambatan	1.21	1.30	0.18	1.28	1.11	0.17	1.30	1.18	0.14	1.34	1.14	0.13	1.36	1.20	0.11
6	V Kaum	0.91	1.43	1.09	0.80	1.50	1.33	0.77	1.49	1.36	0.63	1.65	1.54	0.65	1.57	1.46
7	Tj. Emas	0.21	0.52	3.73	0.18	0.48	3.56	0.17	0.47	3.34	0.18	0.45	3.23	0.13	0.41	3.22
8	P. Ganting	1.16	1.19	0.39	1.09	1.67	0.43	1.09	1.64	0.47	1.14	1.40	0.46	1.20	1.24	0.44
9	Lintau Buo	0.66	2.26	1.47	0.56	2.61	1.46	0.60	2.75	1.20	0.64	2.48	1.11	0.76	2.00	0.99
10	Lintau Buo Utara	1.24	0.16	0.63	1.11	0.31	1.01	1.16	0.35	0.89	1.17	0.39	0.91	1.23	0.34	0.84
11	Sungayang	0.84	1.59	1.21	0.83	1.55	1.21	0.81	1.49	1.26	0.82	1.36	1.25	0.86	1.26	1.17
12	Sungai Tarab	1.23	0.85	0.35	1.24	0.87	0.39	1.26	0.90	0.39	1.27	0.87	0.43	1.30	0.86	0.42
13	Salimpaung	1.23	0.91	0.30	1.24	1.01	0.32	1.23	1.09	0.38	1.27	0.99	0.37	1.31	0.91	0.37
14	Tj. Baru	1.26	0.59	0.37	1.27	0.68	0.38	1.27	0.75	0.43	1.30	0.70	0.44	1.32	0.73	0.44
TOTAL		14.29	15.66	12.28	14.07	16.27	12.71	14.21	16.16	12.35	14.21	16.25	12.36	14.38	15.78	12.22

Sumber : Hasil Analisis

Ket : 1= Sektor pertanian
2 = Sektor industri
3 = Sektor Jasa

Dapat dilihat bahwa periode 1990-2004 yang menjadi basis adalah sektor pertanian dan industri yaitu industri kecil dan menengah. Dan sektor-sektor ini patut dikembangkan karena mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan surplus sehingga mampu ekspor ke daerah lain, selain itu kedua sektor ini terbukti mampu bertahan sewaktu terjadi krisis moneter yang lalu.

4.1.2.3 Kemiskinan dan Kesenjangan

Kemiskinan menurut Bank Dunia 2000 (LPEM UI, 2004), didefinisikan sebagai kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial. Kekurangan fisik meliputi ketidakcukupan dalam kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan dalam nutrisi, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Seseorang dikatakan miskin apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan sebaliknya ketidakcukupan sosial meliputi hal-hal yang lebih luas yaitu adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan dan kepercayaan diri yang kurang. Ada banyak penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Sharp (dalam Kuncoro, 2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara mikro, kemiskinan timbul karena ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Dan dalam menentukan keluarga sejahtera dan prasejahtera dapat dilihat berdasarkan alasan ekonomi dan

non ekonomi, misalnya dari pola konsumsi makanan, tingkat pendapatan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV.8
KRITERIA KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA

Alasan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera
Ekonomi (Sandang, Pangan dan Papan)	a. Pada umumnya anggota keluarga makan 2X sehari atau lebih b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian c. Bagian lantai terluas bukan dari tanah	a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan dan telur b. Setahun sekali anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel baju sebagai pakaian baru c. Luas lantai rumah paling kurang 8 m ² untuk tiap penghuni

Sumber : BKKBN Kab. Tanah Datar

Jumlah penduduk miskin pada tiap-tiap kecamatan dari tahun 2000-2004 rata-rata mengalami peningkatan, dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ada di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu lebih dari 17 % dari total jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar berada di Kecamatan Lintau Buo Utara. Sedangkan di Kecamatan Lintau Buo Utara itu sendiri dari total jumlah penduduk yang ada jumlah penduduk miskin sebesar 32 %. Jumlah penduduk miskin kedua terbanyak ada di Kecamatan Rambatan yaitu hampir 10 % penduduk miskin dari total penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan pada tahun 2004 hampir 40 % penduduknya adalah penduduk miskin. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Rambatan dan Batipuh Selatan, diantaranya yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan rendahnya akses bagi penduduk yang mayoritas adalah petani dalam memasarkan produk-produk pertanian.

Dari sebaran penduduk miskin dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan distribusi pendapatan antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya sebaran penduduk miskin tahun 2000 dan 2004 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV.9
JUMLAH KELUARGA SEJAHTERA, PRA SEJAHTERA DAN
KELUARGA MISKIN TAHUN 2000-2004

NO	Kecamatan	KK Miskin				Prasejahtera		KK Sejahtera	
		2000	Proporsi (%)	2004	Proporsi (%)	2000	2004	2000	2004
1	X Koto	38	0.35	416	2.27	6	-	2728	3663
2	Batipuh	909	8.37	1478	8.06	82	120	2881	3190
3	Batipuh Selatan	647	5.96	1052	5.74	14	19	1018	1127
4	Pariangan	532	4.90	1233	6.72	6	6	1675	1718
5	Rambatan	1097	10.10	1883	10.27	42	25	2369	2641
6	Lima Kaum	796	7.33	1809	9.86	29	14	7843	5655
7	Tanjung Emas	360	3.32	943	5.14	70	29	1500	1662
8	Padang Ganting	728	6.71	534	2.91	21	2	1530	1661
9	Lintau Buo	304	2.80	612	3.34	5	-	1449	1524
10	Lintau Buo Utara	1569	14.45	3153	17.19	176	114	2676	2814
11	Sungayang	678	6.24	1219	6.65	3	1	1582	1488
12	Sungai Tarab	1806	16.63	1828	9.97	10	-	2661	2919
13	Salimpaung	996	9.17	1557	8.49	14	9	1943	1820
14	Tanjung Baru	397	3.66	621	3.39	10	7	1163	1090
TOTAL		10857	100.00	18338	100	487.5	346	33018	32972

Sumber: BPS Kab Tanah Datar

4.1.2.4 Tipologi Daerah

Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan daerah dan pendapatan daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dalam penelitian ini adalah kecamatan dapat dibagi menjadi empat klasifikasi (lihat Tabel IV.6), yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*), daerah maju tapi tertekan (*high*

income and low growth) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Kuncoro, 2004:118).

Kriteria yang digunakan untuk membagi kecamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan.
- Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan.
- Daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan.
- Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan.

TABEL IV.10
TIPOLOGI DAERAH

Pendapatan (y) Laju pertumb (r)	($y_i > y$)	($y_i < y$)
($r_i > r$)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
($r < r$)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber : Kuncoro, 2004:118

Keterangan : r : Rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan
y : Rata-rata pendapatan kecamatan
 y_i : Pertumbuhan ekonomi kecamatan yang diamati (i)
 y_i : Pendapatan kecamatan yang diamati (i)

TABEL IV.11
PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN
RATA-RATA KECAMATAN 1990-2004

No	Kecamatan	Pendapatan Rata-rata (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Rata-rata (%)
1	X Koto	21.581.56	4.45
2	Batipuh	14.114.69	1.89
3	Batipuh Selatan	4.026.10	1.67
4	Pariangan	11.735.04	0.99
5	Rambatan	9.950.49	5.71
6	V Kaum	9.361.84	5.16
7	Tj. Emas	9.634.42	3.52
8	P. Ganting	5.705.62	4.04
9	Lintau Buo	10.763.08	4.23
10	Lintau Buo Utara	9.777.67	1.73
11	Sungayang	8.881.85	3.88
12	Sungai Tarab	16.648.09	3.86
13	Salimpaung	14.556.36	2.23
14	Tj. Baru	5.792.77	0.35
TOTAL		10.894.97	3.12

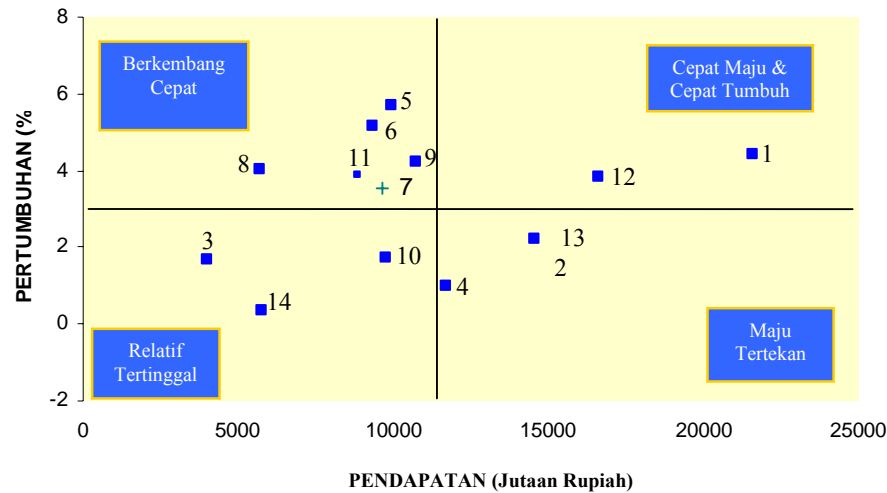
Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dan pertumbuhan rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 10894.97 dibulatkan 11.000 dan 3,12 %, maka tipologi kecamatan dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5.

Dari tipologi kecamatan dapat dilihat bahwa :

- Kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh yaitu Kecamatan X Koto dan Sungai Tarab.
- Kecamatan maju tertekan yaitu Kecamatan ParianganBatipuh dan Salimpaung.
- Kecamatan berkembang cepat yaitu Kecamatan Rambatan, V Kaum, Tj. Emas, Padang Ganting, Lintau Buo dan Sungayang.

- Kecamatan relatif tertinggal yaitu Kecamatan Tanjung Baru, Batipuh Selatan dan Kecamatan Lintau Buo Utara.



- 1= X Koto 4= Pariangan 7= Tj. Emas 11= Sungayang 14= Tj. Baru
 2= Batipuh 5= Rambatan 8= Pd. Ganting 12= Sungai Tarab
 3= Batipuh Selatan 6= V Kaum 9= Lintau Buo 13= Salimpaung

Sumber : Hasil Analisis

GAMBAR 4.4
POSISI PEREKONOMIAN KECAMATAN-
KECAMATAN MENURUT TIPOLOGI DAERAH
TAHUN 1990-2004

4.1.3 Analisis Potensi Sumber Daya Alam

Analisis ini bertujuan untuk menemukenali potensi wilayah studi meliputi analisis potensi pertanian dan pariwisata.

4.1.3.1 Potensi Pertanian

Periode 1990-2004 produksi pertanian tanaman pangan terbesar adalah Kecamatan X Koto, diikuti Kecamatan Sungai Tarab, Rambatan dan Batipuh. Dari segi produksi pertanian sayur-sayuran, Kecamatan X Koto merupakan penghasil terbesar, dan merupakan pusat pengembangan dan pemasaran *organic*

farming yang dikenal dengan KASO (Kawasan Agribisnis Sayuran Organik). Jangkauan pemasaran sayur-sayuran dari Kecamatan X Koto tidak hanya melayani Kabupaten Tanah Datar tapi juga hinterlandnya yaitu Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Solok, Lima Puluh Kota, Padang dan bahkan juga sampai luar propinsi yaitu ke Batam, Pekanbaru dan Dumai. Dan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan X Koto, pemerintah daerah akan mengembangkan kecamatan ini sebagai kawasan agropolitan. Sedangkan Kecamatan Batipuh dan Sungai Tarab adalah penghasil padi sawah terbesar. Kecamatan Rambatan produksi tanaman pangan meningkat tajam pada tahun 1998 dan 2000, namun tahun 2004 menurun drastis. Dari jumlah produksinya yang fluktuatif, laju pertumbuhan ekonominya lebih kecil dari seluruh kecamatan yang ada sehingga pada tipologi daerah kecamatan ini masuk kedalam kuadran III yaitu berkembang cepat. Kecamatan terendah produksi pertaniannya adalah Batipuh Selatan dan Padang Ganting. Namun Padang Ganting tinggi dalam produksi ternaknya. Sedangkan Batipuh Selatan memang kurang berhasil dalam pertanian karena lahan yang kurang subur sehingga sering terjadi gagal panen. Selengkapnya produksi pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV.12
PRODUKSI TANAMAN PANGAN 1990-2004

NO	Kecamatan	Produksi (Ton)					Rata rata (%)
		1990	1995	1998	2000	2004	
1	X Koto	57734.88	62912.32	28137.48	38083.44	49707.02	4731502.79
2	Batipuh	29885.44	32565.45	26620.39	36030.09	25729.96	3016626.57
3	Batipuh Selatan	8012.934	8731.50	7076.31	9577.62	6898.76	805942.44
4	Pariangan	27660.15	30140.61	24001.71	32485.76	23814.09	2762046.29
5	Rambatan	22975.75	25036.12	47883.92	64809.80	19781.04	3609732.66
6	V Kaum	17694.81	19281.61	21575.03	29201.31	15234.40	2059743.17
7	Tj. Emas	18647.01	20319.20	23780.66	32186.59	16054.20	2219753.33
8	P. Ganting	8964.60	9768.51	8728.36	11813.64	7718.10	939864.27

Lanjutan

NO	Kecamatan	1990	1995	1998	2000	2004	(%)
9	Lintau Buo	15344.97	16721.05	15963.54	21606.29	13211.30	1656943.07
10	Lintau Buo Utara	18879.31	20572.33	19511.00	26407.69	16254.20	2032490.58
11	Sungayang	18390.22	20039.39	11886.61	16088.26	15833.12	1644752.13
12	Sungai Tarab	36621.74	39905.84	33938.97	45935.62	31529.60	3758635.32
13	Salimpaung	29900.93	32582.33	23365.32	31624.43	25743.30	2864326.43
14	Tj. Baru	12762.25	13906.72	10013.71	13553.33	10987.70	1224474.23
TOTAL		323475.00	352483.00	302483.00	409403.87	278496.79	33326833.3

Sumber : BPS Tanah Datar

4.1.3.2 Potensi Pariwisata

Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten yang kaya akan objek-objek wisata, baik wisata alam, sejarah maupun wisata budaya dan objek-objek wisata ini tersebar hampir diseluruh kecamatan. Namun sayangnya dari sekian banyak objek-objek wisata, yang dikelola baru sebagian kecil saja sedangkan yang lainnya masih berupa bentuk alamiah dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang seperti toilet, kios makanan, bahkan moda angkutan. Padahal jika objek-objek wisata ini dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar khususnya dan akan dapat pula memicu perkembangan wilayah.

Potensi pariwisata ini termasuk penting untuk melihat sumberdaya yang dimiliki kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan menggali faktor-faktor apa yang menyebabkan kurang berkembangnya suatu daerah, apakah karena daerah itu benar-benar miskin tidak memiliki sumberdaya apapun yang dapat dikembangkan atau daerah tersebut sebenarnya punya sumberdaya namun tidak mampu memanfaatkan potensinya.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah suatu objek wisata berkembang dengan baik atau tidak yaitu dari banyaknya jumlah

pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut. Dan jika objek wisata tersebut tidak berkembang faktor apa yang mempengaruhinya, diantaranya dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasarana penunjang dan tingkat aksesibilitas menuju ke objek wisata. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa di Kabupaten Tanah Datar hampir semua kecamatannya memiliki objek wisata. Demikian pula halnya dengan kecamatan-kecamatan yang pertumbuhannya lambat bahkan memiliki objek wisata yang menarik, seharusnya dengan adanya sumberdaya objek wisata ini kecamatan-kecamatan tersebut dapat memicu perkembangan daerah dan tentunya dapat pula meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar. Tetapi kenyataannya daerah tersebut tetap saja stagnan perkembangannya, tentu menjadi hal yang menarik untuk mengetahui ada apa sebenarnya dibalik ini semua. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada diantaranya yaitu dengan melihat tingkat aksesibilitas, yang dibatasi hanya pada objek wisata yang telah dikelola dan paling banyak pengunjungnya.

TABEL IV.13
TINGKAT AKSESSIBILITAS MENUJU TEMPAT WISATA

NO	Objek Wisata	Kecamatan	Jumlah Pengunjung	Tingkat Aksesibilitas
1	Istano Pagaruyung	Tj. Emas	117.695	Tinggi
2	Panorama Tabek Patah	Salimpaung	12.653	Rendah
3	Rumah Adat Ds. Belimbing	Rambatan	15.805	Sedang
4	Batu Angkek-Angkek	Sungayang	21.678	Sedang
5	Rumah Adat Balerong Bunta	Sungai Tarab	13.611	Rendah
6	Ngalau Pangian	Lintau Buo	22.264	Rendah
7	Nagari Tuo Pariangan	Pariangan	11.793	Rendah
8	Tanjung Mutiara	Batipuh Selatan	16.703	Rendah
9	Balairung Sari	Pariangan	12.263	Sedang
10	Puncak Pato	L. Buo Utara	10.655	Sedang
11	Lembah Anai	X Koto	50.113	Tinggi
12	Batu Basurek Lima Kaum	Lima Kaum	18.901	Tinggi
13	Batu Basurek Pagaruyung	Tj. Emas	11.793	Tinggi

Sumber : Dinas Pariwisata

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa akses tertinggi ada pada objek wisata Istando Pagaruyung, Batu Basurek, dan Lembah Anai. Sementara akses yang rendah berada pada objek wisata Panorama Tabek Patah, Rumah Adat Balerong Bunta, Rumah Tuo Pariangan, Tanjung Mutiara dan Ngalau Pangian. Rendahnya akses karena moda angkutan yang kurang, jarak jauh dan kondisi jalan yang rusak.

Objek wisata Tanjung Mutiara yang berada di Kecamatan Batipuh Selatan seharusnya mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sekitar, karena objek wisata tersebut adalah satu-satunya objek wisata bahari di Kabupaten Tanah Datar. Padahal cukup banyak wisatawan terutama domestik yang ingin berkunjung kesana karena selain wisata bahari juga memiliki pemandangan yang indah, namun sayangnya objek wisata tersebut belum dikelola dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya akses dan minimnya sarana pendukung bagi suatu objek wisata sehingga pengunjung menjadi enggan datang kesana.

Begitu pula halnya dengan objek wisata di Kecamatan Rambatan, meskipun didukung dengan akses yang sedang tetapi objek wisata yang ada disana yaitu Rumah Adat Kampai Nan Panjang merupakan suatu bangunan rumah hunian yang berarsitektur khas Minang terdiri dari enam (6) kamar dengan pintu berbentuk oval dengan ukuran kecil dan keunikan lain bangunan ini dibuat tanpa menggunakan paku serta telah berumur \pm 350 tahun, masih berupa objek wisata alamiah tanpa dilengkapi dengan sarana penunjang dan atraksi budaya. Pengunjung yang datang kesana cenderung cukup sekali ingin datang berkunjung

karena yang dilihat hanya bangunan tersebut tidak ada atraksi-atraksi lain yang mampu memikat pengunjung untuk datang berkali-kali.

Sedangkan puncak pato yang berada di Kecamatan Lintau Buo Utara, yaitu objek wisata yang terkenal dengan sejarah “Sumpah Satie Bukik Marapalam” dan merupakan benteng pertahanan perang Padri sama pula halnya dengan objek wisata yang ada di Kecamatan Rambatan belum dikemas dalam suatu paket wisata yang menarik dan penduduk sekitarpun tidak mampu memanfaatkan keberadaan objek wisata ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya penjual makanan dan penjual souvenir. Kecamatan Tanjung Baru hanya memiliki satu objek wisata yaitu Panorama Puncak Alai suatu tempat yang berada di ketinggian dengan panorama yang cukup indah. Objek wisata ini kurang diminati, dan pengunjungnya hanya masyarakat sekitar.

Dari uraian diatas dapat dilihat faktor-faktor apa yang membuat kecamatan-kecamatan tersebut lambat pertumbuhannya, memiliki cukup sumberdaya namun tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan utama dalam pengembangan objek-objek wisata ini adalah belum adanya paket-paket wisata yang dikemas sedemikian rupa dan kurangnya promosi dan informasi tentang objek-objek wisata tersebut. Selama ini pemerintah daerah hanya memfokuskan pada pengembangan objek wisata utama yaitu Istana Pagaruyung. Sedangkan objek wisata Lembah Anai yaitu berupa air terjun yang berada di Kecamatan X Koto dapat menyerap pengunjung kedua terbanyak karena berada di pinggir jalan koridor jalan propinsi. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa potensi sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah mempengaruhi terhadap

perkembangan daerah tersebut, dan daerah yang relatif tertinggal dibanding daerah lainnya memang memiliki potensi yang kurang dibanding daerah lainnya.

4.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Disparitas

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar daerah diantaranya yaitu perbedaan sumberdaya alam yang dimiliki antar daerah yang didasari pemikiran klasik yang menyatakan bahwa pembangunan didaerah yang kaya sumberdaya alam akan cenderung lebih maju dan masyarakatnyapun lebih makmur dibanding daerah yang mis yang miskin sumberdaya alam (Tambunan, 2001:176-181). Dan hal-hal tersebut telah dianalisis pada sub bab sebelumnya. Tetapi untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana terjadinya disparitas antar sub wilayah tidak cukup hanya melalui data sekunder.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut melalui data primer yaitu dengan observasi langsung ke lapangan dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dan kemudian diolah dengan analisis faktor.

Dalam analisis faktor variabel-variabel yang di teliti sebanyak dua puluh empat (24) variabel (lihat lampiran). Pada tahap awal akan dihitung koefesien korelasi antar variabel yang selanjutnya disusun dalam matrik korelasi. Matrik ini mencerminkan kedekatan hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang berkorelasi secara substansial berarti variabel-variabel tersebut memiliki faktor variansi yang sama (mengukur sesuatu hal yang sama). Nilai elemen matriks korelasi dihitung dengan menggunakan program SPSS *for Windows Release 12*,

dan harus memenuhi besaran nilai KMO and Bartlett's Test. Berdasarkan angka K-M-O Measure of Sampling Adequacy (MSA) menunjukkan 0,883 (88,30%) artinya bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam analisis faktor ini dapat diproses lebih lanjut. Dan ini juga ditunjukkan dengan signifikansi angka Barlett's Test (0,000) yang menunjukkan bahwa kumpulan variabel memang signifikan untuk diproses.

Selanjutnya tiap variabel dianalisis untuk mengetahui mana variabel yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang tidak dapat diproses (harus dikeluarkan) dengan didasarkan pada besaran MSA yang membentuk diagonal yang bertanda 'a'. Variabel yang dapat diproses adalah yang memiliki besaran $MSA > 0,5$. Dari tabel *anti image matrices* khususnya pada bagian bawah (*anti image correlation*) terlihat bahwa tidak ada variabel yang $MSA < 0,5$, ini berarti seluruh variabel dapat diproses lebih lanjut.

Tahap selanjutnya yaitu proses ekstraksi. Pada tahap ini akan dilakukan reduksi terhadap data, sehingga diperoleh faktor-faktor yang independen atau tidak berkorelasi satu sama lain. Secara umum hasil pengoperasian akan menghasilkan faktor-faktor yang akan tersusun menurut kepentingan masing-masing, sehingga faktor pertama akan menjadi faktor terpenting pertama, faktor kedua akan menjadi faktor terpenting kedua dan demikian seterusnya. Pada tabel *communalities* (lampiran) angka-angka yang terbentuk memiliki arti bahwa varians dari variabel yang ada dapat dijelaskan oleh faktor yang nanti terbentuk, dengan ketentuan semakin kecil besaran komunalita suatu variabel berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Seperti variabel

ketersediaan sarana prasarana transportasi (X4) angka yang terbentuk adalah 0,855, ini berarti bahwa sekitar 85,5 % varians dari variabel X4 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Harga komunalita adalah jumlah kuadrat dari masing-masing bobot faktor (*loading factor*) sebuah variabel.

Hasil *variance explained* menunjukkan bahwa dari total dua puluh empat (24) komponen variabel diekstrak menjadi enam (6) faktor, dengan nilai tingkat keberartian (*eigenvalue*) terhadap disparitas antar sub wilayah sebagai berikut :

- Faktor pertama adalah 30,057 %
- Faktor kedua adalah 10,645 %
- Faktor ketiga adalah 10,126 %
- Faktor keempat adalah 7,556 %
- Faktor kelima adalah 7,030 %
- Faktor keenam adalah 6,932 %

Total keenam faktor akan dapat menjelaskan 72,34 % dari variabilitas ke 24 variabel asli tersebut. Susunan *eigenvalue*/tingkat keberartian selalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan ketentuan bahwa angka *eigenvalue* dibawah satu tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. Pada tabel komponen matrik dapat dilihat faktor *loading* (bobot faktor) yaitu besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang terbentuk. Namun hasil yang diperoleh pada tahap ekstraksi masih memberikan hasil yang agak sulit diinterpretasikan sehingga belum optimum, untuk itu perlu dilakukan proses rotasi faktor dengan tujuan untuk mendapatkan solusi faktor yang lebih sederhana.

Komponen matrik hasil dari proses rotasi memperlihatkan distribusi

variabel kedalam faktor-faktor yang terbentuk menjadi lebih jelas dan nyata. Dari ke 24 variabel hanya 22 variabel yang dapat didistribusikan kedalam faktor-faktor yang terbentuk, sedangkan dua variabel lainnya yaitu pendidikan terakhir dan frekuensi ke ibukota kabupaten tidak dapat dimasukkan atau dengan kata lain terpaksa dikeluarkan karena tidak ada satupun korelasi yang melewati ”*cut off point*” sebesar 0,55. Angka pembatas (*cut off point*) agar sebuah variabel dapat secara nyata termasuk suatu faktor, untuk sekitar 100 data adalah 0,55 (Santoso & Tjiptono, 2001: 263).

Dari hasil perhitungan rotasi, faktor pertama terbentuk oleh 11 variabel, faktor kedua oleh 3 variabel, faktor ketiga dengan 2 variabel, faktor keempat oleh 2 variabel, faktor kelima oleh 2 variabel dan faktor keenam oleh dua variabel. Selengkapnya hasil reduksi ke 24 variabel menjadi 6 faktor dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL IV.14
PENAMAAN FAKTOR**

Faktor	Variabel	Pemberian Identitas Faktor Baru
1	Ketersediaan sarana transportasi (X4) Kondisi sarana prasarana transportasi (X5) Kondisi fasilitas umum (X6) Kemudahan pencapaian lokasi fasilitas umum (X7) Kondisi jaringan air bersih (X8) Kondisi jaringan listrik (X9) Kondisi drainase (X10) Jalur alternatif ke ibukota kabupaten (X11) Kondisi fasilitas ekonomi (X15) Kegiatan perekonomian (X16) Pelaksanaan pembangunan 5-10 tahun terakhir (X23)	Ketersediaan sarana prasarana
2	Penyediaan lapangan kerja (X14) Investasi masyarakat/swasta (X21) Subsidi pemerintah terhadap UKM (X22)	Ketersediaan lapangan usaha

Faktor	Variabel	Pemberian Identitas Faktor Baru
3	Dukungan pemda terhadap aktivitas masyarakat (X19) Pelaksanaan pembangunan terhadap kemajuan daerah (X24)	Kebijakan Pemerintah
4	Pekerjaan utama (X2) Penghasilan (X3)	Pendapatan masyarakat
5	Kegiatan masyarakat (X17) Lokasi kegiatan masyarakat (X18)	Kondisi sosial budaya
6	Jarak jangkau dari rumah ke ibukota kecamatan (X13) Keamanan lingkungan (X20)	Kondisi internal

Sumber : Hasil Analisis

Dari ke 6 (enam) faktor yang terbentuk berdasarkan variabel-variabel yang mengelompok dalam faktor-faktor tersebut selanjutnya diberi nama, sehingga diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar sub wilayah adalah faktor ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan lapangan usaha, kebijakan pembangunan, pendapatan masyarakat, kondisi sosial budaya dan kondisi internal. Berdasarkan nilai tingkat keberartian (*eigenvalue*) terhadap disparitas antar sub wilayah faktor pertama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana adalah faktor yang paling mempengaruhi terjadinya disparitas antar sub wilayah, kemudian diikuti oleh faktor ketersediaan lapangan usaha, faktor kebijakan pembangunan, faktor pendapatan masyarakat, faktor kondisi sosial budaya dan terakhir adalah faktor kondisi internal.

4.2.1 Ketersediaan Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana adalah urat nadi bagi perkembangan suatu daerah, kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari kelengkapan ketersediaan sarana prasarananya. Terkonsentrasinya sarana dan prasarana pada suatu daerah juga menunjukkan terkonsentrasinya penduduk dan terkonsentrasinya penduduk tentu

karena adanya pusat aktivitas pada daerah tersebut. Sarana dan prasarana yang akan dianalisis pada sub bab ini terkait dengan sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana dan prasarana transportasi.

4.2.1.1 Fasilitas Pendidikan

Perkembangan fasilitas pendidikan selama kurun waktu 1990-2000 memperlihatkan terjadi peningkatan. Dimana pada tahun 1990, ada lima kecamatan yang belum tersedia SLTA namun di tahun 2000 hanya dua kecamatan saja. Pada tahun 2004 terjadi pengurangan fasilitas pendidikan yang disebabkan adanya penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah muridnya di bawah standar. Dari ketersediaan fasilitas pendidikan terlihat kesenjangan semakin berkurang dengan hampir terlayannya seluruh kecamatan. Hanya Kecamatan Tanjung Baru dan Batipuh Selatan yang belum tersedia SLTP dan SLTA. Perkembangan ketersediaan fasilitas pendidikan periode 1990-2004 selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.15.

Berdasarkan analisis kebutuhan terhadap sarana pendidikan pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar (lihat Tabel IV.16) dapat dilihat bahwa pada dasarnya sarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA) telah terpenuhi dan bahkan telah melebihi kebutuhan yang didasarkan pada standar PU. Hanya di Kecamatan Tanjung Baru yang tidak tersedia SLTA dan di Kecamatan Batipuh Selatan tidak tersedia SLTP, sehingga penduduk harus pergi kekecamatan lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kejenjang SLTP dan SLTA.

TABEL IV.15
PERKEMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1990-2004

NO	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan														
		1990			1995			1998			2000			2004		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	X Koto	19	2	1	28	3	1	36	4	1	35	10	5	34	10	5
2	Batipuh	20	2	1	26	4	1	35	4	1	38	8	1	28	9	1
3	Batipuh Selatan	6	-	-	12	-	-	15	-	-	15	-	1	12	-	1
4	Pariangan	9	-	1	18	1	1	29	3	1	29	9	3	22	7	3
5	Rambatan	18	2	1	30	2	1	36	4	2	34	7	3	31	9	3
6	Lima Kaum	16	2	1	29	3	1	33	4	2	31	12	10	26	8	9
7	Tanjung Emas	9	-	-	16	1	-	22	2	1	18	4	-	19	4	1
8	Padang Ganting	5	1	-	9	1	-	13	2	1	13	3	2	13	3	2
9	Lintau Buo	4	2	1	7	3	1	12	4	1	15	7	2	13	5	2
10	L. Buo Utara	16	-	-	25	-	-	35	1	-	37	5	3	34	5	3
11	Sungayang	12	1	1	17	2	1	22	2	1	19	4	3	14	4	2
12	Sungai Tarab	19	2	1	31	3	1	37	4	2	31	5	2	27	5	2
13	Salimpaung	13	1	1	16	2	1	24	3	2	24	7	3	20	5	3
14	Tanjung Baru	7	-	-	9	-	-	16	-	-	18	1	-	15	1	-
TOTAL		173	15	9	273	25	9	365	37	15	357	82	38	308	75	37

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar

Keterangan : 1=SD, 2=SLTP, 3= SLTA

Meskipun sarana pendidikan sesuai standar PU telah terpenuhi bahkan telah melebihi kebutuhan, namun dari hasil survei primer terungkap bahwa:

Tingkat aksesibilitas yang rendah menyebabkan penduduk bahkan harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi akibat dari kurang tersedianya moda angkutan (3/SRP/4).

Bahkan pada beberapa desa tidak tersedia sarana angkutan perdesaan yang ada hanya ojek dengan jumlah sangat terbatas. Sedangkan SLTP dan SLTA berada pada ibu kota kecamatan, dan tidak ditunjang dengan akses yang baik menyebabkan penduduk terutama di desa tertinggal menjadi semakin enggan untuk melanjutkan pendidikan sehingga tidaklah mengherankan mengapa pendidikan penduduk banyak yang tamat SD. Rendahnya akses dan kondisi sarana pendidikan yang kurang memadai menyebabkan penduduk semakin tertinggal dan terpuruk dalam lingkaran kemiskinan.

TABEL IV.16
TINGKAT KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 2004

N0	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Standar	Jumlah	Kebutuhan
		2004	Penduduk Pendukung	Fasilitas Eksisting	Fasilitas (Unit)
1	X Koto	39,287			
	a. SD		1,300	34	30
	b. SLTP		12,900	10	3
	c. SLTA		28,000	5	1
2	Batipuh	31,353			
	a. SD		1,300	28	24
	b. SLTP		12,900	9	2
	c. SLTA		28,000	1	1
3	Batipuh Selatan	11,262			
	a. SD		1,300	12	9
	b. SLTP		12,900	-	1
	c. SLTA		28,000	1	0
4	Pariangan	21,005			
	a. SD		1,300	22	16
	b. SLTP		12,900	7	2
	c. SLTA		28,000	3	1
5	Rambatan	34,075			
	a. SD		1,300	31	26
	b. SLTP		12,900	9	3
	c. SLTA		28,000	3	1
6	Lima Kaum	34,238			
	a. SD		1,300	26	26
	b. SLTP		12,900	8	3
	c. SLTA		28,000	9	1
7	Tanjung Emas	20,768			
	a. SD		1,300	19	16
	b. SLTP		12,900	4	2
	c. SLTA		28,000	1	1
8	Padang Ganting	13,684			
	a. SD		1,300	13	11
	b. SLTP		12,900	3	1
	c. SLTA		28,000	2	0
9	Lintau Buo	15,580			
	a. SD		1,300	13	12
	b. SLTP		12,900	5	1
	c. SLTA		28,000	2	1
10	Lintau Buo Utara	32,930			
	a. SD		1,300	34	25
	b. SLTP		12,900	5	3
	c. SLTA		28,000	3	1
11	Sungayang	16,686			
	a. SD		1,300	14	13
	b. SLTP		12,900	4	1
	c. SLTA		28,000	2	1
12	Sungai Tarab	28,950			
	a. SD		1,300	27	22
	b. SLTP		12,900	5	2
	c. SLTA		28,000	2	1
13	Salimpaung	21,044			
	a. SD		1,300	20	16
	b. SLTP		12,900	5	2
	c. SLTA		28,000	3	1
14	Tanjung Baru	13,164			
	a. SD		1,300	15	10
	b. SLTP		12,900	1	1
	c. SLTA		28,000	-	0

Sumber : Hasil Analisis

4.2.1.2 Fasilitas Kesehatan

Demikian pula dengan fasilitas kesehatan pada tiap-tiap kecamatan rata-rata telah mencukupi kebutuhan. Hanya rumah sakit yang dirasakan kurang, satu-satunya baru terdapat di Kota Batusangkar dan fasilitasnya pun masih belum lengkap sehingga penduduk cenderung berobat ke Kota Bukittinggi dan Padang Panjang. Namun yang menjadi persoalan pada Kecamatan Batipuh Selatan, Tanjung Baru, Lintau Buo Utara dan Rambatan di banding kecamatan lainnya di Kabupaten Tanah Datar adalah sulitnya pencapaian lokasi ke fasilitas kesehatan. Kurangnya moda angkutan dan buruknya kondisi jalan menjadi penyebab rendahnya akses menuju lokasi. Hal inilah yang paling dikeluhkan masyarakat pada empat kecamatan tersebut. Pencapaian lokasi kesehatan yang sulit dapat menyebabkan kondisi kesehatan penduduk tidak dapat terlayani dengan baik.

Namun perkembangan sebaran fasilitas kesehatan selama kurun waktu 1990-2004 memperlihatkan kesenjangan dari segi ketersediaan fasilitas kesehatan semakin berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan telah terlayani semua kecamatan akan fasilitas kesehatan. Puskesmas yang pada tahun 1990 hanya melayani delapan (8) kecamatan, pada tahun 1998 meningkat dengan hanya satu kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Baru yang belum terlayani. Dan saat ini seluruh kecamatan telah terlayani puskesmas. Sedangkan puskesmas pembantu dari tahun 1990 ke tahun 2004 bertambah sebesar 27 % (lihat tabel III.12). Selengkapnya kebutuhan fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel IV.17.

TABEL IV.17
TINGKAT KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2004

N0	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2004	Standar Penduduk Pendukung	Jumlah Fasilitas Eksisting	Kebutuhan Fasilitas (Unit)
1	X Koto	39,287			
	a. Puskesmas		16,000	3	2
	b. Pustu		10,000	6	4
2	Batipuh	31,353			
	a. Puskesmas		16,000	2	2
	b. Pustu		10,000	7	3
3	Batipuh Selatan	11,262			
	a. Puskesmas		16,000	1	1
	b. Pustu		10,000	2	1
4	Pariangan	21,005			
	a. Puskesmas		16,000	1	1
	b. Pustu		10,000	5	2
5	Rambatan	34,075			
	a. Puskesmas		16,000	2	2
	b. Pustu		10,000	8	3
6	Lima Kaum	34,238			
	a. Puskesmas		16,000	2	2
	b. Pustu		10,000	6	3
7	Tanjung Emas	20,768			
	a. Puskesmas		16,000	2	1
	b. Pustu		10,000	5	2
8	Padang Ganting	13,684			
	a. Puskesmas		16,000	1	1
	b. Pustu		10,000	3	1
9	Lintau Buo	15,580			
	a. Puskesmas		16,000	2	1
	b. Pustu		10,000	6	2
10	Lintau Buo Utara	32,930			
	a. Puskesmas		16,000	1	2
	b. Pustu		10,000	2	3
11	Sungayang	16,686			
	a. Puskesmas		16,000	1	1
	b. Pustu		10,000	4	2
12	Sungai Tarab	28,950			
	a. Puskesmas		16,000	2	2
	b. Pustu		10,000	5	3
13	Salimpaung	21,044			
	a. Puskesmas		16,000	1	1
	b. Pustu		10,000	4	2
14	Tanjung Baru	13,164			
	a. Puskesmas		16,000	1	1
	b. Pustu		10,000	2	1

Sumber : Hasil Analisis

4.2.1.3 Fasilitas Perekonomian

Sedangkan sarana perekonomian, pada tiap ibu kota kecamatan telah terdapat pasar, namun pasar tersebut tidak buka setiap hari hanya pada hari-hari tertentu yang disebut hari pasar yang buka sekali atau dua kali dalam satu minggu.

Pada hari pasar, pedagang-pedagang hampir dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan pedagang dari kota/kabupaten *hinterland* akan berjualan di pasar tersebut. Hanya pasar di Kota Batusangkar, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lintau Buo Utara yang buka setiap hari sedangkan pada kecamatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk biasanya belanja ke warung atau ke kota terdekat, seperti penduduk di Kecamatan X Koto, Batipuh Selatan dan Kecamatan Batipuh cenderung ke Kota Padang Panjang dalam memenuhi kebutuhan hariannya karena letaknya lebih dekat ke kota tersebut. Sementara penduduk di Kecamatan Tanjung Baru dan Salimpaung cenderung ke Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Dan penduduk dalam memasarkan hasil pertanian berkeliling ke kecamatan-kecamatan yang sedang menggelar hari pasar.

4.2.1.4 Listrik

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa masih ada desa yang belum dialiri listrik yaitu satu desa di Kecamatan Tanjung Emas dan empat desa di Kecamatan Lintau Buo Utara. Belum masuknya listrik pada desa-desa tersebut karena rendahnya akses. Aksesibilitas yang rendah menuju Desa Mawar I, Mawar II, Tanjung Lansek dan Pamusian di Kecamatan Lintau Buo Utara yang dapat dilihat dari kondisi jalan yang sangat memprihatinkan masih berupa jalan setapak mengakibatkan penduduk pada keempat desa tersebut menjadi terisolir.

Dari data jumlah kk yang berlangganan listrik juga dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar baru sekitar 65 % rumah tangga yang berlangganan listrik. Dan hanya Kecamatan Lima Kaum yang penduduknya telah 100 % berlangganan listrik, diikuti Kecamatan Lintau Buo, X Koto dan Sungayang yang rata-rata telah

diatas 70 % penduduknya berlangganan listrik. Sedangkan kecamatan terendah jumlah pelanggan listriknya adalah Kecamatan Tanjung Baru, Tanjung Emas, Lintau Buo Utara dan Rambatan yang jumlah rumah tangganya tidak sampai 50 % yang berlangganan listrik. Pada dasarnya rumah tangga yang telah dialiri listrik bergantung pada kemampuan finansial rumah tangga itu sendiri untuk dapat berlangganan listrik.

Pada kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Tanjung Emas rendahnya jumlah rumah tangga yang berlangganan listrik disebabkan karena memang ada desa yang belum dialiri listrik. Namun pada Kecamatan Tanjung Baru dan Kecamatan Rambatan rendahnya jumlah rumah tangga yang berlangganan listrik terkait dengan rendahnya pendapatan penduduk. Sementara itu perkembangan desa yang belum dialiri listrik selama 1990-2004 terlihat terjadi peningkatan, dimana dari 54 desa pada tahun 1990 menjadi 5 desa saja pada tahun 1998-2004. Belum terlayannya kelima desa tersebut hingga saat ini dikarenakan sulitnya akses dan jarak antar desa yang jauh.

TABEL IV.18
PERKEMBANGAN JUMLAH DESA YANG BELUM
DIALIRI LISTRIK TAHUN 1990-2004

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Belum Dialiri Listrik				
			1990	1995	1998	2000	2004
1	X Koto	33	3	2	-	-	-
2	Batipuh	29	4	3	-	-	-
3	Batipuh Selatan	15	5	3	-	-	-
4	Pariangan	21	-	-	-	-	-
5	Rambatan	17	6	3	-	-	-
6	Lima Kaum	30	-	-	-	-	-
7	Tanjung Emas	19	7	4	1	1	1
8	Padang Ganting	7	3	2	-	-	-
9	Lintau Buo	18	6	4	-	-	-
10	Lintau Buo Utara	20	9	7	4	4	4
11	Sungayang	14	-	-	-	-	-

Lanjutan

NO	Kecamatan	Jumlah	1990	1995	1998	2000	2004
12	Sungai Tarab	28	3	1	-	-	-
13	Salimpaung	19	3	2	-	-	-
14	Tanjung Baru	10	5	3	-	-	-
TOTAL		280	54	34	5	5	5

Sumber :BPS Kab. Tanah Datar

4.2.1.5 Air Bersih

Di Kabupaten Tanah Datar kecamatan yang telah dialiri jaringan PDAM baru sebagian kecil saja yaitu Kecamatan Lima Kaum, Sungai Tarab, Salimpaung, X Koto, Rambatan, Sungayang, Tanjung Emas, Lintau Buo dan Padang Ganting, itupun belum seluruh kecamatan yang dialiri PDAM hanya pada ibu kota kecamatan. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang belum dialiri PDAM memanfaatkan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih.

4.2.1.6 Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Tanah Datar, yang sudah dimasuki jaringan telepon baru terbatas pada ibukota kecamatan sedangkan jaringan telepon seluler baru melayani Kecamatan Lima Kaum, Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, sebagian Kecamatan Tanjung Emas, sebagian Kecamatan X Koto, sebagian Kecamatan Pariangan, sebagian Kecamatan Rambatan, dan sebagian Kecamatan Salimpaung. Sementara kecamatan yang belum dilayani jaringan telekomunikasi adalah Kecamatan Tanjung Baru. Sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan baru setahun terakhir ini dilayani jaringan telepon. Sulitnya hubungan telekomunikasi dapat menjadi penghambat bagi penduduk yang bergerak dibidang home industri dan perdagangan dalam mengembangkan usahanya terutama dalam mencari

pemasaran terutama bagi penduduk di Kecamatan Tanjung Baru, sehingga tidaklah mengherankan mengapa Kecamatan Tanjung Baru termasuk lambat perkembangannya dibanding kecamatan-kecamatan lainnya.

4.2.1.7 Transportasi

Dari sebagian besar responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini rata-rata menjawab bahwa permasalahan utama di daerah mereka adalah rendahnya aksesibilitas baik dari buruknya kondisi jaringan jalan maupun dari rendahnya jumlah moda angkutan, terutama pada kecamatan-kecamatan yang lambat perkembangannya yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Rambatan. Akses yang rendah mempersulit penduduk untuk mencapai lokasi yang dituju baik dalam pencapaian ke fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, dan kelokasi lainnya. Dan sebagian besar menjawab yang paling sulit adalah rendahnya jumlah moda angkutan yang melayani. Meskipun ada angkutan ojek namun penduduk mengeluhkan ongkosnya yang cukup mahal dibanding angkutan perdesaan dan muatan yang dibawapun terbatas terutama dalam memasarkan produktivitas pertanian.

Dari data moda angkutan Kecamatan Batipuh Selatan hanya dilayani tiga (3) angkutan perdesaan, dengan jumlah penduduk sebesar 11.262 jiwa dengan asumsi satu moda dapat mengangkut 15 penumpang maka kapasitas angkut untuk tiga moda untuk satu kali angkut yaitu hanya 45 lima penumpang. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa aksesibilitas pada Kecamatan Batipuh Selatan sangat rendah. Sedangkan Kecamatan Lintau Buo Utara yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Tanah Datar yaitu seluas 203,26 Km² hanya

dilayani sepuluh moda angkutan. Jumlah ini tentu sangat tidak memadai. Demikian pula dengan Kecamatan Rambatan yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk ketiga terbesar hanya dilayani 16 moda angkutan. Rendahnya jumlah moda angkutan yang melayani terkait juga dengan kondisi jalan yang memang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Berdasarkan analisis terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap terjadinya disparitas di Kabupaten Tanah Datar, sarana dan prasarana transportasi adalah yang paling mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas tersebut. Transportasi adalah urat nadi bagi perkembangan suatu daerah, karena dengan transportasi yang baik potensi-potensi daerah dapat dipasarkan ke dunia luar dan dengan transportasi pula penduduk dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan kebutuhan lainnya.

4.2.2 Ketersediaan Lapangan Usaha

Menurut Tambunan (2001:176-181) salah satu faktor utama terjadinya disparitas antar wilayah yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu. Ekonomi dari wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan wilayah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Kabupaten Tanah Datar adalah kabupaten yang perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian, dan belum terdapat industri dalam skala besar. Potensi pertanian dari masing-masing kecamatan telah diuraikan pada sub bab

sebelumnya dan pada sub bab ini akan di analisis usaha industri kecil dan menengah (UKM). Dari data yang ada dapat dilihat bahwa UKM terbesar terdapat di Kecamatan X Koto, diikuti oleh Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Salimpaung. Kecamatan terendah jumlah UKMnya yaitu Kecamatan Tanjung Baru, Batipuh Selatan dan Kecamatan Lintau Buo Utara.

Pekerjaan adalah faktor utama bagi penduduk untuk dapat terus melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika pekerjaan tidak ada maka akan timbul pengangguran dan pengangguran sangat dekat dengan kemiskinan dan kemiskinan erat kaitannya dengan kemunduran suatu bangsa. Bagaimana mungkin suatu daerah dapat berkembang jika penduduknya saja sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bagaimana pula dapat diharapkan peningkatan SDM melalui jenjang pendidikan jika kemiskinan telah melingkupi bagi lingkaran setan.

Kecamatan X Koto, Salimpaung, Lima Kaum dan Kecamatan Sungai Tarab dapat berkembang dengan cepat dibanding kecamatan lainnya selain memiliki potensi pertanian yang baik juga didukung dengan banyaknya lapangan usaha. Sedangkan Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanjung Baru dan Kecamatan Batipuh Selatan kurang mampu berkembang karena memang minimnya lapangan usaha yang tersedia. Selain itu rendahnya kualitas SDM menyebabkan ketidakmampuan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sedangkan Kecamatan Rambatan meski memiliki unit usaha industri yang cukup banyak yaitu sekitar seribu unit lebih dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak hampir dua ribu tenaga kerja, namun sayangnya kurang di dukung dengan ketersediaan sarana dan

prasarana transportasi. Jika dilihat dari tingkat aksesibilitas dari kota kecamatan ke Kota Batusangkar, aksesnya termasuk sedang. Tetapi sayangnya tidak demikian halnya dengan akses di desa-desa. Tingkat aksesibilitas berdasarkan observasi kelapangan dan berdasarkan hasil dari kuesioner rata-rata menunjukkan aksesnya rendah. Akses yaitu kemudahan pencapaian menuju ke suatu lokasi yang rendah mengakibatkan penduduk kesulitan dalam memasarkan dan mengembangkan usahanya, ditambah lagi jalur telekomunikasi yang belum melayani seluruh kecamatan semakin membuat UKM sulit untuk berkembang.

Sedangkan Kecamatan X Koto, Salimpaung dan Sungai Tarab diuntungkan dengan letak geografis yang berada di koridor regional dan berbatasan dengan Kota Padang Panjang (Kec. X Koto) dan Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh (Kec. Sungai Tarab dan Salimpaung) sehingga memudahkan dalam pemasaran. Sedangkan Kecamatan Lima Kaum merupakan bagian dari ibu kota kabupaten, dimana seluruh sarana prasarana, penduduk dan aktivitas terkonsentrasi di sana.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan suatu wilayah salah satunya dipengaruhi dengan ketersediaan lapangan usaha. Dan penyediaan lapangan pekerjaan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti harga mutlak. Masyarakat juga bertanggungjawab untuk dapat dan mampu membuka lapangan usaha sendiri jika pemerintah tidak mampu menyediakannya. Pada dasarnya pembangunan itu bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah semata tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat untuk dapat bersama-sama bahu membahu membangun negerinya.

4.2.3 Kebijakan Pemerintah

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun ini (2001–2005) telah berjalan dan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama 5 tahun yang lalu antara lain Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2000 – 2004, Propeda Kabupaten Tanah Datar tahun 2000 – 2004 dan Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 – 2005.

Sesuai dengan visi Kabupaten Tanah Datar saat ini yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Sejahtera dan Berkeadilan dilandasi Filosofi ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah“*”, tentu saja masyarakat Kabupaten Tanah Datar sangat mengharapkan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sesuai dengan visi tersebut. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak semudah yang tertulis diatas kertas. Masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang dapat dilihat langsung dari perkembangan pusat-pusat kecamatan yang pada akhirnya berimplikasi pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan wilayah itu sendiri.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 tahun ini menganut sistem gabungan antara *Bottom Up Planning* dengan *Top Down Planning*. Kedua sistem ini dilaksanakan melalui *Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi* dan *Sinergisitas* (KISS) antara skala prioritas kebutuhan masyarakat nagari dengan perencanaan yang dilakukan satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini pada dasarnya mengakui bahwa ketimpangan antar kecamatan itu memang ada. Bahwa perimbangan pembangunan yang diharapkan masih belum terpenuhi.

Hal utama yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan tersebut adalah perencanaan yang telah berjalan selama ini masih belum komprehensif dengan kata lain masih ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi dalam menetapkan program pembangunan tanpa mengkaji potensi dan kebutuhan (2/MSP/4).

Meskipun dalam menetapkan suatu kegiatan telah dibuat indikator-indikator yang dijadikan acuan dalam penentuan skala prioritas yaitu : (1) pengentasan kemiskinan, (2) memberikan manfaat bagi orang banyak, (3) peningkatan ekonomi, dan (4) sentra ekonomi dan pendidikan. Namun kenyataannya indikator-indikator tersebut hanya sebatas diatas kertas saja tidak terimplementasikan sebagaimana seharusnya.

Hal ini juga tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Datar yang menyebutkan bahwa dalam perencanaan lima tahun sejak tahun 2001 s/d 2005 perencanaan partisipatif sebagai salah satu mekanisme untuk penyusunan kegiatan setiap tahunnya masih belum dapat secara optimal mengakomodir seluruh hasil perencanaan partisipatif tahun yang bersangkutan dan boleh diartikan persentasenya masih belum memuaskan dan kadangkala masih ada kegiatan-kegiatan yang muncul setelah hasil musrenbang ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang muncul setelah hasil musrenbang ditetapkan juga menjadi pemicu terjadinya ketimpangan antar kecamatan.

Disadari atau tidak egosektoral para elite-elite politik telah ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Siapa yang paling berkuasa saat itu kesanalah kecenderungan kegiatan pembangunan akan terkonsentrasi. Pada saat sidang dengan anggota dewan yang terhormat, usulan-usulan yang telah ditetapkan saat proses musrenbang menjadi mentah dan bahkan dihilangkan karena permintaan dari anggota dewan agar suatu kegiatan dialihkan kedaerahnya. Karena keterbatasan dana mau tidak mau harus ada yang dikorbankan, sehingga kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang menjadi korban. Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa :

Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar belum memiliki grand desain pembangunan yaitu bentuk dan arahan yang jelas dari pembangunan (1/MSP/1).

Meskipun telah merumuskan misi untuk mencapai visi, namun kemana arah dan bentuk pembangunan yang akan dilakukan masih belum jelas.

Selain hal diatas penyebab lainnya yaitu belum optimalnya pembangunan yang dilaksanakan sektor-sektor terkait. Pelaksanaan pembangunan pada setiap sektor disamping belum optimal, juga kurang memperhatikan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain, sehingga tidak terciptanya keterpaduan dalam menghasilkan produk-produk daerah. Dilain pihak dinas teknis pelaksana belum mampu sepenuhnya menyerap kebutuhan masyarakat yang perlu direspon sesuai dengan lingkup kewenangannya. Hal ini terlihat dari usulan rencana kegiatan dinas masih banyak yang belum berorientasi pada pemecahan masalah di lapangan. Akibatnya ketika usulan-usulan rencana kegiatan dinas dipadukan

dengan aspirasi masyarakat yang dijangkau melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif, masih banyak yang belum sinkron.

Sebagian besar responden memberikan jawaban yang senada bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tanah Datar selain kebijakan pemerintah juga berkaitan dengan,

letak geografis kabupaten yang kurang strategis dibanding hinterlandnya, kurangnya atensi dan pemahaman aparat pemda terhadap rencana tata ruang yang ada dan kurang sosialisasi terhadap program-program pembangunan kepada masyarakat (1/MSP/1).

Kebijakan pembangunan yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat juga dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Dari hasil kuesioner hampir sebagian besar responden dari kecamatan-kecamatan yang pertumbuhannya lambat yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Tanjung Baru menyatakan bahwa kegiatan pembangunan sedikit sekali di daerah mereka. Dari kecamatan yang pertumbuhannya lambat tersebut hanya Kecamatan Lintau Buo Utara yang sebagian besar menjawab kegiatan pembangunan cukup banyak di daerah mereka. Memang kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan pembangunan cukup gencar diarahkan ke daerah tersebut, dan sudah selangkah demikian karena Kecamatan Lintau Buo Utara parah sekali kondisinya. Namun meskipun demikian kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan tersebut masih terbatas pada pusat ibu kota kecamatan, belum menyentuh desa-desa lainnya. Ada empat desa yang kondisinya sangat memprihatinkan yaitu Desa Mawar I, Mawar II, Desa Tanjung Lansek dan Desa Pamusian. Jalan menuju ke desa-desa tersebut sangat parah kondisinya dan tidak dapat dilewati kendaraan roda empat serta desa-desa tersebut masih belum dialiri listrik. Dan penduduk

miskin terbanyak berada pada Kecamatan Lintau Buo Utara. Kondisi ini bertolak belakang dengan kecamatan lain yaitu Kecamatan Sungai Tarab, Salimpaung, Lima Kaum dan Kecamatan Sungayang yang hampir sebagian besar jalannya sudah bagus semua.

Namun yang menjadi pertanyaan disini sesuai dengan dua paradigma yang mendasari penelitian ini yaitu apakah pembangunan itu harus merata atau tidak. Jika dilihat kepadatan penduduk pada sub-sub wilayah Kabupaten Tanah Datar pada umumnya tergolong rendah. Dan dana pembangunan sangat terbatas, sehingga dengan tersebarnya penduduk pada seluruh wilayah menyebabkan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika penduduk terkonsentrasi pada titik-titik tertentu maka pemerintah akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan pada titik-titik tersebut, penyediaan infrastruktur dan utilitas pun akan menjadi lebih efisien, dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertanian akan dapat terlindungi dari terjadinya alih guna lahan menjadi lahan terbangun. Maka dari itu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal diatas adalah dengan ketidakmerataan pembangunan.

4.2.4 Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan usaha pada suatu daerah. Dari income perkapita dapat diketahui sejauh mana terjadi disparitas antar daerah. Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara/daerah dengan melihat besarnya kontribusi dari 40 % penduduk termiskin. Namun karena data income perkapita tidak ada, maka analisis

pendapatan masyarakat dikaitkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk miskin.

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan tentang ketersediaan lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan. Bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan peluang penduduk untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin besar kesempatan penduduk suatu daerah mendapatkan pekerjaan maka semakin rendah pula angka pengangguran, dan rendahnya jumlah pengangguran maka akan semakin jauh pula penduduk tersebut dari kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada Kecamatan Batipuh Selatan yaitu hampir 40 % dari total penduduknya adalah penduduk miskin. Kemiskinan yang ada di kecamatan ini erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan usaha dan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah itu sendiri baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan bahwa Kecamatan Batipuh Selatan memang rendah tingkat ketersediaan lapangan usaha. Mayoritas penduduknya adalah petani, dengan hasil pertanian yang kurang memuaskan dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Daerah yang memiliki income perkapita tinggi menunjukkan bahwa daerah itu maju yang terlihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya disparitas salah satunya sangat dipengaruhi dari kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan Lay (1993:53) bahwa indikator ekonomi ketidakmerataan

suatu daerah salah satunya yaitu kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan penduduk.

4.2.5 Kondisi Sosial Budaya

Pada prinsipnya pembangunan bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah semata tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Permasalahan pembangunan yang paling besar di Sumatera Barat pada umumnya yaitu sulitnya pembebasan lahan karena terkait dengan tanah kaum/ulayat. Demikian pula dengan Kabupaten Tanah Datar, pembebasan lahan seringkali menjadi sengketa dengan masyarakat. Kesadaran penduduk yang rendah akan arti dan pentingnya pembangunan menjadi pemicu masalah lahan ini.

Daerah yang maju cenderung memiliki penduduk dengan pemikiran yang maju pula demikian pula sebaliknya. Kecamatan X Koto, Kecamatan Sungayang dan Kecamatan Sungai Tarab merupakan kecamatan yang memiliki partisipasi yang tinggi dari penduduknya, hal ini terungkap dari jawaban yang diberikan responden yang menyatakan bahwa di daerah mereka cukup banyak terdapat investasi pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Selain itu ketiga kecamatan tersebut juga terpilih dalam pemilihan nagari berprestasi yang dinilai berdasarkan besarnya tingkat partisipasi dari masyarakat. Tingkat partisipasi tersebut juga dapat dilihat dari kesediaan penduduk dalam memberikan tanahnya secara sukarela bagi pembangunan.

Hal ini bertolak belakang dengan penduduk di Kecamatan Rambatan, Batipuh Selatan dan Kecamatan Lintau Buo Utara. Penduduknya memiliki kesadaran yang rendah terhadap pembangunan, ini terlihat dari rendahnya pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Selain itu juga mengapa pelaksanaan pembangunan kurang berhasil di kecamatan ini karena sulitnya masalah pembebasan lahan. Pada dasarnya hampir diseluruh bagian di Kabupaten Tanah Datar sulit dalam pembebasan lahan, namun dengan bantuan tokoh-tokoh masyarakat masalah ini dapat diatasi. Namun pada Kecamatan Lintau Buo Utara, Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan atensi masyarakat terhadap pembangunan dapat dikatakan paling rendah dibanding kecamatan-kecamatan lainnya, penduduk cenderung beranggapan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Pada waktu pemilihan nagari berprestasi dengan memberikan dana stimulan bagi pembangunan jalan dan irigasi, penduduk kecamatan-kecamatan lainnya berusaha sebaik mungkin dengan memberikan tanah mereka bagi pembangunan jalan. Padahal dana stimulan yang diberikan bagi pembangunan jalan hanya sepuluh juta per nagari dan panjang jalan yang ditetapkan hanya 1,5 km. Namun kecamatan-kecamatan lainnya mampu memenuhi ketentuan tersebut dan bahkan Kecamatan X Koto, Sungayang dan Sungai Tarab mampu membangun jalan sepanjang 3 km. Sedangkan Kecamatan Lintau Buo Utara, Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, jalan yang mereka bangun panjangnya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya disparitas bukan hanya kesalahan dan tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga menjadi kesalahan masyarakat juga. Masyarakat yang cenderung sulit menerima pembaharuan dan kurang bersikap kooperatif dalam pembangunan dapat memicu timbulnya kesenjangan antar daerah.

4.2.6 Kondisi Internal

Variabel yang masuk kedalam faktor ini yaitu keamanan lingkungan dan jarak jangkau dari rumah ke kota kecamatan. Keamanan lingkungan secara luas dapat mempengaruhi iklim investasi. Daerah yang tidak aman membuat orang enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Pada umumnya responden memberikan jawaban yang senada bahwa di daerah mereka lingkungannya termasuk aman. Sedangkan jarak jangkau dari rumah ke kota kecamatan untuk melihat seberapa besar tingkat aksesibilitas menuju kota kecamatan. Namun untuk melihat tingkat aksesibilitas tidak cukup didasarkan hanya pada jarak jangkau, juga perlu dilihat ketersediaan moda angkutan. Seperti yang telah diuraikan pada sub bab transportasi bahwa permasalahan yang dihadapi pada Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanjung Baru, Batipuh Selatan dan Rambatan yaitu kurangnya ketersediaan moda angkutan dan kondisi jaringan jalan yang buruk, sehingga mempersulit penduduk dalam melakukan aktivitas terutama dalam memasarkan produktivitas pertanian yang mengakibatkan keempat kecamatan ini lebih tertinggal dibanding kecamatan lainnya.

4.3 Analisis Kebijakan Pembangunan

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kebijaksanaan pembangunan yaitu sebagai arahan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar dan interaksi antar kecamatan dengan hinterlandnya. Sesuai konsep pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux bahwa pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah dan perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian (Adisasmita, 2005:59).

Pada masa orde baru kota-kota di Indonesia pada umumnya menerapkan konsep kutub pertumbuhan dengan mengkonsentrasikan pembangunan pada titik-titik tertentu yang dijadikan sebagai pusat aktivitas, dengan harapan kutub-kutub pertumbuhan tersebut akan memberikan penetesan kedaerah hinterland (*trickling down effect*). Namun konsep ini dianggap gagal karena kecenderungan yang terjadi bukannya *trickling down effect* malahan pengurasan sumberdaya dari wilayah hinterland.

Kabupaten Tanah Datar juga menerapkan konsep kutub pertumbuhan dalam kebijaksanaan pembangunannya. Pada RTRW tahun 1997-2002, Kabupaten Tanah Datar dibagi dalam dua sub wilayah pembangunan (SWP) yaitu SWP III-1 terdiri atas Kecamatan Lintau Buo, Tanjung Emas, Sungayang, Lintau Buo Utara, Padang Ganting dengan pusatnya di Kecamatan Lintau Buo dan WP III-2 terdiri atas Kecamatan V Kaum, Tanjung Baru, Salimpaung, X Koto, Sungai

Tarab, Batipuh, Batipuh Selatan, Pariangan dan Rambatan dengan pusatnya di Kota Batusangkar. Pengaruh dari kebijaksanaan pembangunan ini yang tumbuh dan berkembang hanya Kota Batusangkar (meliputi seluruh wilayah Kecamatan V Kaum, 7 desa di Kecamatan Tanjung Emas, 10 desa di Kecamatan Sungai Tarab, 3 desa di Kecamatan Sungayang dan 2 desa di Kecamatan Rambatan). Sedangkan wilayah lainnya yang diharapkan dapat terjadi *trickling down effect* dari Kota Batusangkar malah yang terjadi sebaliknya pengurasan sumberdaya ke Kota Batusangkar. Pengaruh kebijaksanaan ini menyebabkan Kecamatan Sungai Tarab, Sungayang, Kecamatan V Kaum dan Kecamatan Tanjung Emas lebih maju dibanding kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Rambatan hanya maju pada dua desa (satu nagari) tersebut. Kecamatan X Koto dapat berkembang dengan baik karena potensinya sebagai sentra pertanian di Kabupaten Tanah Datar.

Kemudian dalam kebijaksanaan pembangunan saat ini, sebagai langkah untuk memicu perkembangan daerah tertinggal yaitu Kecamatan Lintau Buo Utara dijadikan sebagai pusat wilayah pembangunan. Dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi tiga wilayah pembangunan yaitu (lihat Gambar 4.6):

1. WP Timur, terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Lintau Buo Utara dengan pusat pengembangan berada di Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara.
2. WP Tengah, terdiri dari 8 kecamatan yaitu Salimpaung, Tanjung Baru, Sungai Tarab, Sungayang, Lima Kaum, Tanjung Emas, Rambatan dan Padang Ganting dengan pusat pelayanan berada di Kota Batusangkar.

3. WP Barat, terdiri dari 4 kecamatan yaitu X Koto, Pariangan, Batipuh dan Batipuh Selatan dengan pusat pelayanan berada di Koto Baru Kecamatan X Koto.

Namun pembagian wilayah pembangunan ini masih belum berjalan, seperti pada WP Barat orientasinya masih ke Kota Padang Panjang. Kondisi geografis Kecamatan X Koto, Batipuh, Pariangan dan Batipuh Selatan yang berada lebih dekat dengan Kota Padang Panjang membuat keempat kecamatan ini lebih berinteraksi dengan Kota Padang Panjang dibanding ke Kota Batusangkar sebagai ibu kota kabupaten. Dan dengan pembagian wilayah pembangunan dengan pusat pelayanan di Koto Baru Kecamatan X Koto diharapkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lagi ke Padang Panjang sehingga pendapatan masyarakat tidak terbangun ke daerah lain. Namun hingga saat ini Koto Baru masih dalam tahap pengembangan dan belum mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan.

Kondisi geografis Kecamatan X Koto, Batipuh dan Pariangan yang berada di jalur regional yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang menguntungkan ketiga kecamatan tersebut dalam menuju pemasaran produksi pertanian yang lebih besar sehingga lebih cepat tumbuh dan berkembang di banding Kecamatan Batipuh Selatan yang tidak berada di jalur regional. Karena Kota Padang Panjang berada di koridor jalan provinsi dan menjadi pusat konsumsi setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Sedangkan Kecamatan Lintau Buo diuntungkan dengan kondisi geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung cenderung interaksinya

ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kota Batusangkar dibanding ke Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara. Hal ini disebabkan belum mampunya Balai Tangah berfungsi sebagai pusat pelayanan. Kecamatan Lintau Buo Utara dijadikan pusat pelayanan diharapkan akan mampu memicu perkembangan daerah tersebut, namun yang terjadi malah sebaliknya kecamatan tersebut tetap stagnan perkembangannya. Ketidakmampuan kecamatan Lintau Buo Utara sebagai pusat pelayanan disebabkan lambatnya pembangunan di kecamatan tersebut.

Wilayah pembangunan tengah yang terdiri dari 8 kecamatan dengan pusat pelayanan di Kota Batusangkar. Kecamatan Salimpaung, Tanjung Baru dan Sungai Tarab interaksinya lebih cenderung ke Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dibanding ke Kota Batusangkar, selain disebabkan kondisi geografis yang berada lebih dekat ke kota-kota hinterland tersebut dibanding ke Kota Batusangkar juga karena Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh skala pelayanannya jauh lebih besar dibanding Kota Batusangkar. Sedangkan kelima kecamatan lainnya lebih cenderung ke Kota Batusangkar. Selengkapnya interaksi ruang dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Kedekatan geografis suatu daerah dengan daerah yang jauh lebih maju di satu sisi diharapkan mampu memberikan *feed back* bagi daerah tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat jika ditunjang dengan ketersediaan sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia. Namun yang terjadi pada Kecamatan Tanjung Baru justru sebaliknya, karena minimnya potensi sumberdaya alam yang tersedia dan kondisi iklim yang kurang menunjang sehingga panen kurang berhasil menyebabkan kecamatan ini kurang

mampu berkembang dibanding Kecamatan Sungai Tarab dan Salimpaung yang posisinya juga berada dekat dengan Kota Bukittinggi dan Payakumbuh. Malahan yang terjadi Kota Bukittinggi dan Payakumbuh menyerap pendapatan masyarakat dari Kecamatan Tanjung Baru yang cenderung lebih suka memenuhi kebutuhan hidupnya ke kota-kota tersebut dibanding ke Kota Batusangkar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lambatnya pertumbuhan Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan dibanding *hinterland* karena Kabupaten Tanah Datar kurang mampu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding *hinterland*, sehingga pendapatan masyarakat pergi ke daerah lain. Kondisi geografis juga dapat mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas antar daerah. Daerah yang berada pada posisi yang strategis cenderung lebih cepat berkembang dibanding daerah yang kurang strategis posisinya. Selain itu kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar meski belum terlaksana namun telah ada upaya untuk mengurangi disparitas antar sub wilayah dengan dijadikannya Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai pusat wilayah pembangunan.

4.4 Temuan Studi

Dari hasil analisis kondisi empiris dan potensi wilayah studi diperoleh temuan studi yaitu:

- Terjadi disparitas antar sub wilayah.
- Berdasarkan tipologi daerah menurut pertumbuhan dan pendapatan kecamatan, sub-sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar dapat di klasifikasikan dalam empat (4) kelompok yaitu (1) daerah maju : Kecamatan X Koto dan Sungai Tarab, (2) daerah maju tertekan : Kecamatan Salimpaung, Pariangan dan

Batipuh, (3) berkembang cepat : Kecamatan Rambatan, Sungayang, Padang Ganting, Tanjung Emas, V Kaum dan Lintau Buo, (4) relatif tertinggal : Kecamatan Batipuh Selatan, Tanjung Baru dan Lintau Buo Utara,

- Faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar yaitu potensi sumberdaya alam yang dimiliki, dan berdasarkan hasil analisis faktor yang memetakan variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar diperoleh temuan studi yaitu dari hasil ekstraksi faktor yang telah dirotasi menunjukkan dari 24 variabel yang diamati dapat diekstraksi menjadi enam faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas antar sub wilayah di Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

- Faktor pertama : ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai tingkat keberartian/*eigenvalue* 30,057 %
- Faktor kedua : ketersediaan lapangan usaha dengan *eigenvalue* 10,645 %
- Faktor ketiga : kebijakan pembangunan dengan *eigenvalue* 10,126 %
- Faktor keempat : pendapatan masyarakat dengan *eigenvalue* 7,556 %
- Faktor kelima : kondisi sosial budaya masyarakat dengan *eigenvalue* 7,030 %
- Faktor keenam : kondisi internal dengan *eigenvalue* 6,932 %

4.5 Sintesa Hasil Analisis

Dari hasil analisis diatas sesuai dengan variabel-variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Sosial kependudukan: kepadatan penduduk yang rendah dan tersebar penduduk secara tidak merata kedalam wilayah yang luas membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dalam penyediaan infrastruktur. Dan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah akibat tingginya angka migrasi dapat menimbulkan kerugian bagi perkembangan daerah terutama jika yang melakukan migrasi adalah penduduk yang memiliki potensi dan keahlian.
- Kondisi perekonomian: dari tenaga kerja persektor, pertanian dan industri adalah sektor yang berpotensi untuk dikembangkan terutama industri kecil dan menengah yang ditunjukkan dengan nilai $LQ > 1$.
- Potensi SDA: pertanian dan pariwisata dimiliki hampir seluruh kecamatan, jika keduanya dikembangkan dengan sungguh-sungguh akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah sehingga dapat memperkecil kesenjangan pendapatan antar daerah.
- Ketersediaan sarana prasarana: penyediaan sarana prasarana akan dapat diefisienkan jika penduduk terkonsentrasi pada titik-titik tertentu, dan pembukaan jalur transportasi disatu sisi dapat membuka keterisolan namun disisi lain dapat pula menimbulkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam seperti *illegal logging* yang cukup marak di Kabupaten Tanah Datar, sementara wilayah dengan tingkat kemiringan $> 15\%$ mempunyai porsi terluas hampir mencapai 60% dari total luas kabupaten, jika tidak diperhatikan dengan serius dapat menimbulkan bahaya longsor.

- Kondisi geografis: kecamatan-kecamatan yang berada pada posisi strategis dan kaya akan sumberdaya alam dapat dikembangkan sebagai titik atau kutub pertumbuhan.
- Kebijakan pemerintah: konsep perencanaan pembangunan yang tidak jelas dan masih bersifat egosektoral dapat menimbulkan kurang tergalinya potensi-potensi yang dimiliki daerah dan memperlebar disparitas antar kecamatan.
- Kebijakan pembangunan: konsep kutub pertumbuhan yang diterapkan di Kabupaten Tanah Datar disatu sisi menimbulkan *backwash effect* lebih besar daripada *spread effect*, namun disisi lain dapat pula sebagai strategi dalam menghadapi minimnya dana pembangunan.

4.6 Hubungan Konsep Disparitas Dengan Kondisi Empiris Wilayah Studi

Mengacu pada konsep-konsep disparitas yang dikemukakan oleh para ahli diatas dan menggabungkannya dengan kondisi empiris wilayah studi dapat dirumuskan suatu konsep disparitas bagi Kabupaten Tanah Datar. Pembangunan dalam suatu wilayah tidak harus merata, dengan kata lain ada daerah yang berkembang dan dikembangkan sebagai kota dan ada daerah yang dibiarkan tetap tumbuh menjadi kawasan perdesaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam suatu daerah dan juga untuk melindungi habitat dan ekosistem wilayah itu sendiri, karena jika semua daerah tumbuh dan berkembang sebagai kota dapat merusak ekosistem dan habitat yang hidup didalamnya. Harus dipahami bahwa dunia ini bukan hanya manusia yang memiliki tapi juga makhluk hidup lainnya.

Dalam pengertian diatas, dengan tujuan untuk melindungi ekosistem maka ada daerah yang dibiarkan tidak berkembang dengan kata lain tetap dipertahankan kealamiahannya. Membiarkan daerah yang satu tumbuh dan berkembang dan daerah yang lain tetap stagnan atau kurang tersentuh pembangunan dengan tujuan seperti yang diuraikan diatas tidak dapat dikatakan terjadi disparitas atau kesenjangan dalam suatu wilayah. Selama ini pembangunan di Indonesia selalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengacu pada konsep pemerataan pembangunan, karena disparitas dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Disparitas diaanggap dapat mengancam stabilitas wilayah karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Jika dilihat kepadatan penduduk pada sub-sub wilayah Kabupaten Tanah Datar pada umumnya tergolong rendah dan jarak antar desa sangat jauh dan penduduk tersebar sampai keseluruh pelosok. Sementara dana pembangunan sangat terbatas sehingga dengan tersebarnya penduduk pada seluruh wilayah menyebabkan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam penyediaan infrastruktur, tambahan lagi sulit dalam hal pembebasan lahan. Dan pertanian adalah sandaran utama bagi kehidupan masyarakat, sehingga harus dijaga jangan sampai terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun. Jika penduduk terkonsentrasi pada titik-titik tertentu maka pemerintah akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan pada titik-titik tersebut, dapat mengurangi biaya transportasi publik, penyediaan infrastruktur dan utilitaspun akan menjadi lebih efisien, dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertanian akan dapat terlindungi dari terjadinya alih guna lahan menjadi lahan terbangun.

Maka dari itu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal di atas adalah dengan ketidakmerataan pembangunan. Dengan ketidakmerataan pembangunan diharapkan akan menarik penduduk ke titik-titik tertentu sehingga terjadi pemusatan penduduk pada titik-titik tersebut sehingga pelaksanaan pembangunan akan dapat lebih optimal karena terkonsentrasi pada titik-titik tertentu.

Berdasarkan hal di atas dan dikaitkan dengan kondisi empiris wilayah studi, dapat dirumuskan konsep disparitas di Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- Pembangunan di Kabupaten Tanah Datar tidak dilakukan secara merata sampai keseluruhan pelosok kabupaten, sehingga tidak seluruh kecamatan dikembangkan sebagai kota.
- Pembangunan dipusatkan pada kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi untuk maju sehingga daerah-daerah yang memiliki potensi pertanian akan dapat dilindungi dari alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun.
- Pembangunan di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil analisis tipologi daerah ditetapkan menjadi:
 - Kawasan pembangunan intensif yaitu Kecamatan X Koto, Sungai Tarab, Salimpaung, Batipuh dan Pariangan.
 - Kawasan pembangunan kurang intensif yaitu Kecamatan Rambatan, Sungayang, Padang Ganting, Tanjung Emas, V Kaum dan Lintau Buo.
 - Kawasan pembangunan tidak intensif yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Tanjung Baru dan Lintau Buo Utara.

Selengkapnya arahan pembangunan dan pengembangan kawasan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Gambar 4.8.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Teori-teori tentang disparitas yang dikembangkan oleh para ahli ada yang beranggapan bahwa pembangunan itu harus merata disegala sektor dan disemua tempat yang dikemukakan oleh ahli yang menganut paham teori pembangunan yang seimbang (*balance development*) dan ada pula yang beranggapan bahwa pembangunan tidak harus merata yang dikemukakan oleh ahli yang menganut paham teori pembangunan tidak seimbang (*unbalance development*). Selama ini ketidakmerataan pembangunan dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas antar daerah. Disparitas dipandang sebagai hal yang negatif karena dianggap dapat mengancam stabilitas wilayah.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar daerah diantaranya yaitu perbedaan potensi sumberdaya alam. Daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang lebih potensial cenderung akan dapat berkembang dan cepat pertumbuhannya dibanding daerah yang minim akan sumberdaya. Kebijakan pemerintah disatu sisi akan dapat mengurangi disparitas antar daerah namun disisi lain dapat pula mengakibatkan disparitas semakin melebar apabila dalam pelaksanaan pembangunan tidak memiliki konsep perencanaan yang jelas dan tidak memiliki skala prioritas dalam artian lebih mementingkan kepentingan elite politik dibanding potensi dan kebutuhan masyarakat. Kebijaksanaan pembangunan yang menerapkan konsep kutub pertumbuhan di satu sisi dapat menyebabkan disparitas semakin melebar akibat terkonsentrasinya aktivitas di

suatu tempat namun disisi lain dapat pula sebagai strategi dalam mensiasati minimnya dana pembangunan.

Dan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dan sesuai dengan tujuan studi ini yaitu untuk menemukenali konsep disparitas melalui studi kasus di Kabupaten Tanah Datar maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan dalam suatu wilayah tidak harus merata sampai keseluruhan pelosok, dengan kata lain ada daerah yang berkembang dan dikembangkan sebagai kota dan ada daerah yang dibiarkan tetap tumbuh menjadi kawasan perdesaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam suatu daerah dan juga untuk melindungi habitat dan ekosistem wilayah itu sendiri, karena jika semua daerah tumbuh dan berkembang sebagai kota dapat merusak ekosistem dan habitat yang hidup didalamnya. Harus dipahami bahwa dunia ini bukan hanya manusia yang memiliki tapi juga makhluk hidup lainnya. Dan jika lingkungan alam sudah rusak maka yang akan menanggung akibatnya adalah manusia itu sendiri. Banyak kasus yang terjadi akibat dari terbukanya akses ke desa-desa, terjadi eksplorasi sumberdaya alam, *illegal logging* meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya longsor.

Dan membiarkan daerah yang satu tumbuh dan berkembang dan daerah yang lain tetap stagnan atau kurang tersentuh pembangunan dengan tujuan seperti yang diuraikan diatas tidak dapat dikatakan terjadi disparitas atau kesenjangan dalam suatu wilayah. Jadi berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan juga bahwa disparitas merupakan suatu strategi dalam pengembangan wilayah dan bukan merupakan suatu hal yang negatif.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan studi dan kesimpulan diatas, rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu :

- Konsep disparitas yang dihasilkan dari studi ini bukan suatu ketentuan mutlak yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanah Datar atau daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah yang sama, perlu studi lanjutan dan komprehensif.
- Dalam menjalankan konsep pembangunan tidak merata, sesuai dengan temuan studi berdasarkan hasil analisis tipologi daerah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanah Datar diklasifikasikan dalam empat (4) kelompok yaitu (1) daerah maju : Kecamatan X Koto dan Sungai Tarab, (2) daerah maju tertekan : Kecamatan Salimpaung, Pariangan dan Batipuh, (3) berkembang cepat : Kecamatan Rambatan, Sungayang, Padang Ganting, Tanjung Emas, V Kaum dan Lintau Buo, (4) relatif tertinggal : Kecamatan Batipuh Selatan, Tanjung Baru dan Lintau Buo Utara, maka pembangunan di Kabupaten Tanah Datar ditetapkan menjadi:
 - Kawasan pembangunan intensif yaitu Kecamatan X Koto, Sungai Tarab, Salimpaung, Batipuh dan Pariangan.
 - Kawasan pembangunan kurang intensif yaitu Kecamatan Rambatan, Sungayang, Padang Ganting, Tanjung Emas, V Kaum dan Lintau Buo.
 - Kawasan pembangunan tidak intensif yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Tanjung Baru dan Lintau Buo Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Alkadri, et.al (penyunting). 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah – Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi*. Jakarta: BPPT Press.
- Ambardi, Urbanus M dan Prihawantoro, Socia (penyunting). 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah – Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: BPPT Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit: PT. Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. (1st ed.). Yogyakarta: BPFU-UGM.
- Blair, John P. 1991. *Urban and Regional Economic*. Boston : Richard D Irwin Inc.
- Conyers, Diana. 1984. *Bridging The Gap Between North & South; Towards a Common Approach to Intra-Regional Planning*. Third World Planning Review, 339-361.
- Daldjoeni, Nathaniel. 1992. *Geografi Baru – Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Dawkins, CJ. 2003. *Regional Development Theory – Conceptual Foundations Classis Works, and Recent Developments*. Journal of Planning Literature.
- Douglass, Mike. 1998. *A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages – an Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia*. Third World Planning Review, pp 1-25.
- Esmara, Hendra. 1986. *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan dan Prospek*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Faridad, A. 1981. *The Nature & Scope of Regional Planning & Development*. Prantilla (ed) National Development & Regional Policy, Nagoya: Maruzen Asia, pp. 85-99.
- Firman, Tommy. 1995. *Pengembangan Wilayah Unuk Jangka Panjang*. Jakarta: Artikel dalam Harian Kompas Edisi 5 September 1995.

- Friedman, John & Weaver, Clyde. 1979. *Territory & Function - The Evolution of Regional Planning*. London: Edward Arnold.
- Glasson, John. 1974. *An Introduction to Regional Planning: Concept, Theory and Practice*. London: Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd
- Hill, Hal. 1998. *The Challenge of Regional Development in Indonesia*. Australian Journal of International Affairs. Vol. 52 no.1.
- Hirschman, Albert O. 1968. *The Strategy of Economic Development*. New Haven and London: Yale University Press.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit: BPFE-Yogyakarta
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Jhingan, M.L. 1996. *Ekonomi Pembangunan & Perencanaan*. Edisi 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan – Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2004*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2004.
- Lo, Fu Chen & Salih, Kamal. 1978. *Growth Pole Strategy & Regional Development Polic; Asian Experience and Alternative Approaches*. UNCRD. Nagoya, Japan: Pergamon Press.
- Lay, Cornelis. 1993. *Ketimpangan dan Keterbelakangan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Sosial UGM.
- Meier, Gerald M. 1989. *Leading Issues Economic Development*. 5th. Edition. New York.: Oxford University Press.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurzaman, Siti Sutriah. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia – Pada Masa Sekitar Krisis*. Bandung: ITB.

- Ridwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Jakarta: Alfa Beta.
- Rondinelli, Denis A. dan Ruddle, Kenneth. 1978. *Urbanization and Rural Development – A Spatial Policy for Equiteable Growth*. New York: Preagher Publisher.
- Singgih, Santoso & Tjiptono, Fandy. 2001. *Riset Pemasaran – Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sitohang, Paul. (trans) Glasson, John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: LPFE-UI.
- _____. (trans) Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: LPFE-UI.
- Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi – Studi Empiris Pada Kebijakan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*. Jakarta : PerPod.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- United Nations. 1979. *Economic & Social Commision for Asia & The Pacific - Guidelines for Rural Center Planning*. New York.
- Williamson, J.G. 1975. *Regional Inequality and The Process of National Development – A Description of The Patterns*. Friedman and Alonso (ed). *Regional Policy. Reading in Theory and Application*. Cambridge: MIT Press.

TESIS

- Winarno. 2003. *Faktor-Faktor Terjadinya Disparitas Ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur*. Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITB.

MAKALAH DALAM SEMINAR/LOKAKARYA/PERTEMUAN ILMIAH

Susilo, Kasru. 2002. *Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Di Masa Yang Akan Datang dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Analisis Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis*. Makalah disampaikan pada Seminar Prospek SIG di ITB, Bandung.

BUKU DATA/LAPORAN

Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2004. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2004.

Paket Rencana Program Pengembangan Wilayah Terpadu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2010, Bappeda Kabupaten Tanah Datar.

Laporan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003, Bappeda Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004.

HASIL PENELITIAN

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003-2013, Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar